

PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

MOKHAMAD NATSIR | ANDIK PRATAMA
LUTFI ASNAN QODRI | JUWITA PURNAMI RESTU SUWONDO
LUTFI HIDAYATI FAUZIAH | RENALDI | EGA EFRIANDINI



PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Ditulis oleh:

**MOKHAMAD NATSIR
ANDIK PRATAMA
LUTFI ASNAN QODRI
JUWITA PURNAMI RESTU SUWONDO
LUTFI HIDAYATI FAUZIAH
RENALDI
EGA EFRIANDINI**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2025

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal

Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

ISBN : 978-634-234-565-8

viii + 146 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2025



Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “Masalah Kebijakan Ekonomi” ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Buku ini merupakan salah satu bentuk luaran penelitian yang didanai oleh Hibah Penelitian Fundamental Saintek Tahun 2025, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kehadiran buku ini berangkat dari suatu kebutuhan akademik sekaligus praktis, yakni perlunya analisis yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan ekonomi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional maupun global. Kompleksitas persoalan ekonomi dewasa ini tidak hanya terbatas pada isu pertumbuhan, tetapi juga menyangkut pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, ketidakpastian global, hingga transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks demikian, kebijakan ekonomi harus dipahami tidak semata-mata sebagai instrumen teknis, melainkan juga sebagai produk dari interaksi antara faktor struktural, institusional, dan sosial-politik yang menyertainya.

Buku ini disusun sebagai upaya memperkaya literatur kebijakan ekonomi di Indonesia, dengan menghadirkan perspektif yang analitis, kritis, sekaligus aplikatif. Secara garis besar, isi buku menguraikan beberapa tema utama yang saling berkaitan, antara lain: dinamika kebijakan fiskal dan

moneter, tantangan dalam pengelolaan sumber daya, persoalan ketenagakerjaan dan pengangguran, transformasi sektor industri dan UMKM, serta implikasi kebijakan ekonomi terhadap pembangunan berkelanjutan. Setiap bab dihadirkan tidak hanya dalam kerangka teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan analisis empiris dan refleksi kontekstual terhadap pengalaman Indonesia serta perbandingan dengan negara lain.

Sebagai karya kolaboratif dari Mokhammad Natsir, Andik Pratama, Lutfi Asnan Qodri, Juwita Purnami Restu Suwondo, Lutfi Hidayati Fauziah, Renaldi, dan Ega Efriandini, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan para pemangku kepentingan dalam memahami sekaligus mengkritisi berbagai persoalan kebijakan ekonomi kontemporer. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai salah satu bukti capaian luaran penelitian dalam rangka pelaksanaan Hibah Penelitian Fundamental Saintek 2025. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup pembahasan maupun kedalaman analisis. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang telah memberikan dukungan pendanaan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang turut memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan ekonomi di Indonesia.

Malang, September 2025

Tim Penulis



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	xiii

BAB I

PENDAHULUAN—1

A. Indikator Pembangunan Ekonomi.....	3
---------------------------------------	---

BAB II

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI—7

A. Teori Klasik.....	7
B. Model ketergantungan neokolonial	11
C. Model Paradigma Palsu	12
D. Pembangunan-Dualistis	12
E. Kontrarevolusi pasar bebas neoklasik.....	13
F. Teori Neo Klasik	14
G. Teori Modern	15
H. Teori Postmodern.....	21
I. Pendekatan institusi dalam pembangunan	24

BAB III

STRUKTUR EKONOMI DAN PERUBAHAN—27

A. STRUKTUR EKONOMI DAN SEKTOR-SEKTORNYA.....	27
B. PROSES INDUSTRIALISASI DAN URBANISASI	30
C. PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM EKONOMI BERKEMBANG.....	34

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI—41

A. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.....	41
B. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI.....	45
C. KEBIJAKAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	49

BAB V

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN—53

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA MENENGAH	53
B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025	57
C. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024	58
D. PERENCANAAN SEKTOR DAN PROYEK	60
E. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	62

BAB VI

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN—65

- A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI65
- B. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI71
- C. MASALAH KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN UPAYA REDUKSINYA74

BAB VII

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN—77

- A. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN77
- B. ISU LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM.....83
- C. STRATEGI UNTUK PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN.....86

BAB VIII

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN—87

- A. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN87
- B. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL.....89
- C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN Keadilan Sosial 92

BAB IX

GLOBALISASI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN—95

- A. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI95
- B. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI ASING.....98

C. PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN	108
--	-----

BAB X

KASUS STUDI PEMBANGUNAN EKONOMI—111

A. STUDI KASUS NEGARA BERKEMBANG	111
B. STUDI KASUS NEGARA MAJU	115
C. PELAJARAN DARI KESUKSESAN DAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN	116

BAB XI

INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN—119

A. PERAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI.....	119
B. TEKNOLOGI DAN TRANSFORMASI DIGITAL	121
C. DAMPAK TEKNOLOGI PADA PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI	125

BAB XII

TANTANGAN DAN MASA DEPAN PEMBANGUNAN EKONOMI—129

A. TANTANGAN GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	129
B. PERSOALAN EKONOMI DAN SOSIAL KONTEMPORER	136
C. VISI DAN PROYEKSI PEMBANGUNAN EKONOMI MASA DEPAN.....	139

Daftar Pustaka.....	141
Tentang Penulis.....	143



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah salah satu isu sentral dalam studi ekonomi dan kebijakan publik. Ia menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan manusia bagaimana suatu masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dipahami semata sebagai upaya memperbesar angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi harus dilihat sebagai sebuah proses menyeluruh yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan kelestarian lingkungan.

Sejarah mencatat bahwa konsep pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan besar sepanjang abad ke-20 hingga sekarang. Pada awalnya, pembangunan dipahami secara sempit sebagai pertumbuhan ekonomi mengacu pada teori pertumbuhan klasik dan neoklasik yang menitikberatkan pada akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Namun, seiring perkembangan zaman, para ekonom dan pembuat kebijakan menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak selalu berarti kesejahteraan yang merata. Muncul kritik dari kalangan strukturalis, ekonom pembangunan, dan lembaga internasional yang menegaskan pentingnya pemerataan, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam dekade 1950 – 1970, pembangunan ekonomi identik dengan industrialisasi cepat dan urbanisasi masif. Negara-negara berkembang diarahkan untuk mengejar pertumbuhan tinggi melalui pembangunan

infrastruktur besar-besaran dan kebijakan substitusi impor. Akan tetapi, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek pemerataan dan perlindungan lingkungan. Akibatnya, walau PDB naik, kesenjangan sosial meningkat dan kerusakan alam meluas.

Memasuki dekade 1980 – 1990, Bank Dunia dan UNDP mulai mempopulerkan konsep pembangunan manusia (*human development*), yang diperkenalkan oleh Amartya Sen. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, menekankan pentingnya memperluas kapabilitas dan kebebasan mereka untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Di akhir abad ke-20, kesadaran akan keterbatasan sumber daya alam dan ancaman perubahan iklim memunculkan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kini, pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses multidimensi yang menggabungkan pertumbuhan, pemerataan, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan. Pembangunan ekonomi yang efektif harus mencakup beberapa dimensi utama:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan tetap penting karena menyediakan sumber daya untuk membiayai program pembangunan. Namun, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif, memanfaatkan teknologi, dan memperluas kesempatan kerja. Ini berbeda dengan pertumbuhan eksploitatif yang hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan kelestarian.

2. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan bersifat multidimensi, meliputi kurangnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta minimnya peluang ekonomi. Upaya pengentasan kemiskinan melibatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan penguatan kelembagaan lokal.

3. Pemerataan Kesejahteraan

Tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi bisa memicu ketegangan sosial. Pemerataan menuntut distribusi hasil pembangunan secara adil antara daerah perkotaan dan pedesaan, wilayah maju dan tertinggal, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda.

4. Peningkatan Kualitas Hidup

Pembangunan ekonomi harus berujung pada peningkatan kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan lingkungan hidup yang sehat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kemajuan di bidang ini.

5. Keberlanjutan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak daya dukung bumi. Prinsip keberlanjutan mengharuskan setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem, ketersediaan sumber daya, dan iklim.

A. Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi merupakan seperangkat alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah, menilai keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, serta memahami sejauh mana proses pembangunan ekonomi berlangsung. Indikator-indikator ini berfungsi layaknya “instrumen navigasi” bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat untuk melihat arah perkembangan ekonomi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merancang strategi perbaikan yang tepat.

Melalui indikator pembangunan ekonomi, kita dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, hingga kualitas hidup. Keunggulan indikator ini adalah kemampuannya mengubah fenomena ekonomi yang kompleks menjadi data terukur yang dapat dianalisis secara obyektif. Namun, setiap indikator memiliki fokus dan keterbatasannya masing-masing. Karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh,



dibutuhkan kombinasi dari berbagai indikator yang saling melengkapi. Secara umum, indikator pembangunan ekonomi dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama berikut:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Indikator ini menjadi ukuran standar untuk menilai ukuran perekonomian suatu negara. Pertumbuhan PDB dari waktu ke waktu dapat menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi, perkembangan sektor-sektor produktif, dan daya beli masyarakat. Namun, PDB hanya mencerminkan nilai produksi, bukan pemerataan manfaatnya. Misalnya, PDB dapat meningkat pesat meskipun ketimpangan sosial tetap tinggi, sehingga indikator ini perlu dibaca bersama indikator lain.

2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Angka ini menggambarkan rata-rata pendapatan setiap individu di suatu negara, sehingga sering digunakan sebagai proksi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang tinggi umumnya mencerminkan daya beli yang lebih baik, namun seperti PDB, rata-rata ini tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil. Dalam masyarakat dengan kesenjangan besar, angka rata-rata dapat menutupi realitas sebagian besar penduduk yang berpendapatan rendah.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menggabungkan tiga dimensi utama kesejahteraan: angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Dengan demikian, IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kualitas hidup masyarakat. Indikator ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi sejati tidak hanya mengukur kemajuan materi, tetapi juga keberhasilan dalam meningkatkan kesehatan, memperluas pendidikan, dan memberikan kesempatan yang setara untuk hidup produktif. IPM

yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi diiringi oleh perbaikan dalam dimensi sosial.

4. Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan mengukur sejauh mana hasil pembangunan didistribusikan secara merata di antara penduduk. Indeks Gini adalah alat ukur yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan ini, dengan skala antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kohesi sosial dan mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

5. Tingkat Pengangguran

Indikator ini mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, meskipun sedang mencari kerja dan siap untuk bekerja. Tingkat pengangguran yang rendah biasanya mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, angka pengangguran perlu dilengkapi dengan data tentang kualitas pekerjaan, karena pekerjaan yang tidak layak atau bergaji sangat rendah tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan.

6. Inflasi

Inflasi mengukur persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi yang moderat dan terkendali menunjukkan stabilitas harga, yang penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat menggerus pendapatan riil, sedangkan deflasi dapat mengindikasikan lemahnya permintaan dalam perekonomian.

7. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

IKH menilai kualitas hidup berdasarkan dimensi seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Indikator ini melengkapi IPM dengan menambahkan perspektif lingkungan dan aspek sosial lain yang tidak selalu tercermin dalam pendapatan. Negara dengan IKH yang tinggi umumnya memiliki fasilitas kesehatan yang baik, akses

pendidikan yang luas, lingkungan yang bersih, serta keamanan sosial yang memadai.

Penggunaan indikator-indikator ini sangat penting untuk memantau kemajuan pembangunan ekonomi dan membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan. Indikator tersebut memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, stabilitas, distribusi pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



BAB II

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Teori Klasik

Setiap negara berusaha keras untuk menjalankan pembangunan, kemajuan ekonomi ialah bagian yang penting, tetapi bukan satu-satunya. Pembangunan tidak hanya fenomena ekonomi saja. Dalam pengertian yang lebih luas, pembangunan harus meliputi lebih dari tentang materi dan faktor keuangan dalam kehidupan manusia, melainkan juga meliputi adanya peningkatan kebebasan manusia. Oleh karena itu, pembangunan sebaiknya dipelajari dan dipahami sebagai proses yang bersifat kompleks, mencakup penataan ulang dan perubahan petunjuk seluruh sistem ekonomi dan sosial. selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan hasil (output), pembangunan membutuhkan perubahan mendasar dalam berbagai struktur yaitu lembaga, sosial, dan administrasi, serta melibatkan perubahan dalam sikap, kebiasaan, dan kepercayaan pada masyarakat. Pada akhirnya, walaupun pembangunan biasanya dideskripsikan dalam ruang lingkup nasional, pelaksanaan yang lebih luas memerlukan situasi perubahan dalam sistem ekonomi dan sosial.

Karya tulis klasik setelah Perang Dunia II tentang pembangunan ekonomi didominasi oleh empat aliran pemikiran utama yang bersaing satu sama lain: (1) model pertumbuhan linear, (2) teori dan pola perubahan struktural, (3) revolusi ketergantungan internasional, dan (4) kontrarevolusi

pasar bebas neoklasik. Belakangan ini, pendekatan eklektik muncul, yang menggabungkan elemen terbaik dari semua teori klasik tersebut.

1. Model pertumbuhan linear yang membagi perkembangan ke dalam tahap-tahap tertentu

Setelah Perang Dunia II, fokus terhadap negara-negara miskin mulai semakin meningkat, dan para ahli ekonomi di negara-negara maju sangat terkejut karena mereka tidak memiliki model yang jelas untuk menganalisis proses pertumbuhan ekonomi di banyak masyarakat agraris yang belum memiliki struktur ekonomi modern. Namun, mereka memiliki pengalaman dari Marshall Plan, di mana bantuan keuangan dan teknis besar-besaran dari Amerika Serikat membantu negara-negara Eropa yang hancur akibat perang untuk membangun kembali dan modernisasi ekonomi mereka dalam waktu singkat.

Selain itu, mereka berpikir bahwa semua negara industri modern dulunya adalah masyarakat agraris yang terbelakang. Pengalaman sejarah negara-negara maju dalam mengubah ekonomi mereka dari masyarakat pertanian subsisten menjadi raksasa industri bisa menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara “terbelakang” di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Logika sederhana dari dua pemikiran ini, pentingnya bantuan modal besar-besaran dan pengalaman sejarah negara-negara maju, terlalu menarik untuk diabaikan oleh para ilmuwan, politisi, dan pemerintah negara-negara kaya.

1. Tahapan pertumbuhan Walt W. Rostow, merupakan seorang sejarawan ekonomi asal Amerika. Ia menjelaskan bahwa transisi dari keterbelakangan ke perekonomian maju dapat dijelaskan melalui serangkaian langkah atau tahap yang harus dilalui oleh semua negara. Dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth*, Rostow menyatakan bahwa semua masyarakat bisa dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: masyarakat tradisional, tahap pra lepas landas, lepas landas, tahap menuju kematangan ekonomi, dan tahap konsumsi massal yang tinggi.
2. Menurutny, setiap tahap ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki logika yang saling berkaitan. Dia berargumen bahwa

negara-negara maju telah melalui semua tahap ini menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, sementara negara-negara berkembang masih berada pada tahap masyarakat tradisional atau dalam tahap pra lepas landas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, negara-negara ini perlu mengikuti serangkaian langkah tertentu.

3. Model pertumbuhan menurut Harrod-Domar menjelaskan bahwa setiap perekonomian perlu menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mengganti barang-barang modal yang telah habis atau rusak, seperti gedung, peralatan, dan bahan-bahan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi baru yang merupakan tambahan bersih terhadap cadangan atau stok modal yang ada.

2. Teori dan pola perubahan struktural

Model Perubahan-Struktural menjelaskan bahwa keterbelakangan terjadi karena kurangnya pemanfaatan sumber daya yang disebabkan oleh faktor struktural dan kelembagaan yang ada di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan lebih dari sekadar peningkatan pembentukan modal. Perubahan struktural merupakan proses di mana perekonomian diubah sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional melebihi kontribusi sektor pertanian. Secara umum, ini adalah perubahan besar dalam komposisi sektor-sektor ekonomi. Model dua-sektor adalah teori yang menyatakan bahwa surplus dari sektor pertanian tradisional digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor industri modern.

Teori perubahan-struktural (structural-change theory) berfokus pada cara-cara yang digunakan oleh negara-negara terbelakang untuk mengubah struktur perekonomian mereka, dari yang sangat bergantung pada pertanian subsisten menjadi perekonomian yang lebih modern, lebih urban, dan lebih beragam dalam industri manufaktur serta jasa. Teori ini menggunakan pendekatan neoklasik mengenai harga dan alokasi sumber daya, serta metode ekonometrika modern untuk menjelaskan bagaimana proses transformasi berlangsung. Dua contoh model terkenal dalam pendekatan ini adalah model “surplus tenaga kerja dua-sektor” dari W. Arthur Lewis dan analisis “pola pembangunan” dari Hollis B. Chenery dan rekan-rekannya.



Teori Pembangunan Lewis adalah salah satu model awal yang terkenal dalam bidang pembangunan, yang berfokus pada transformasi struktural ekonomi dari sistem subsisten. Model ini dikembangkan oleh W. Arthur Lewis pada pertengahan 1950-an, lalu dimodifikasi dan diperluas oleh John Fei dan Gustav Ranis. Model dua-sektor Lewis menjadi teori yang umum digunakan untuk menjelaskan proses pembangunan di negara-negara berkembang dengan surplus tenaga kerja, terutama selama tahun 1960-an dan awal 1970-an. Model ini terkadang masih diterapkan untuk memahami pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja di negara-negara berkembang saat ini.

Menurut model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri dari dua sektor: sektor subsisten pedesaan yang tradisional dan sektor industri modern di perkotaan. Sektor pertanian memiliki kelebihan tenaga kerja dengan produktivitas marginal yang dianggap nol. Lewis menyebut situasi ini sebagai surplus tenaga kerja, karena pekerja dapat diambil dari sektor pertanian tanpa mengurangi hasil produksi. Sektor industri modern di kota adalah sektor yang lebih produktif dan dapat secara bertahap menyerap tenaga kerja dari sektor subsisten.

Model perubahan struktural berhipotesis bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang memiliki pola umum, meskipun setiap negara dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus seperti sumber daya, kebijakan pemerintah, modal, teknologi, dan perdagangan internasional. Namun, pendekatan ini terkadang terlalu fokus pada pola yang terlihat di negara maju, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami sebab-akibat. Misalnya, beberapa pembuat kebijakan di negara berkembang mungkin mengabaikan sektor pertanian atau terlalu cepat menekankan pendidikan tinggi tanpa memastikan pendidikan dasar telah memadai, yang justru memperburuk kesenjangan. Meskipun pola pembangunan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi domestik dan internasional, para ahli ekonomi perubahan struktural percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, pendekatan ini cenderung lebih optimis dibandingkan dengan teori ketergantungan internasional yang lebih pesimis.

3. Revolusi ketergantungan internasional

Selama tahun 1970-an, teori ketergantungan internasional menjadi populer, terutama di kalangan intelektual dari negara berkembang yang merasa kecewa dengan model pertumbuhan tahapan dan model perubahan struktural. Teori ini melihat negara-negara berkembang sebagai korban dari ketergantungan ekonomi dan politik yang dikuasai oleh negara-negara kaya. Ketergantungan ini membuat negara berkembang terjebak dalam siklus eksploitasi dan dominasi yang menghambat perkembangan mereka. Teori ini memiliki tiga aliran utama, yaitu model ketergantungan neokolonial, model paradigma palsu, dan tesis pembangunan dualistik.

B. Model ketergantungan neokolonial

Aliran yang pertama yang utama yaitu Model ketergantungan neokolonial (*neo colonial defence model*), adalah pendekatan yang terlahir dari pemikiran marxis, model ini menjelaskan bahwa keterbelakangan (*underdevelopment*) dan kelangsungannya yang berkaitan dengan perkembangan sejarah kapitalis internasional, yang dimana hubungan antara negara kaya dan negara miskin sangat tidak seimbang. meskipun dari apakah negara-negara kaya secara sengaja memanfaatkan atau tidak sengaja mengabaikan negara-negara miskin, adanya kesenjangan kekuasaan yang besar antara negara maju (pusat) dan negara berkembang (pinggiran) dalam sistem internasional membuat negara-negara miskin sulit untuk mencapai kemandirian, bahkan mungkin hal itu dapat tercapai.

Pandangan neo-Marxis yang anti neokolonialisme ini mengaitkan sebagian besar kemiskinan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang dengan keberadaan dan kebijakan kelompok negara kapitalis industri dari belahan bumi bagian utara serta perluasan jangkauan kekuasaan mereka ke sekelompok kecil elite berkuasa atau kelompok komprador (*komprador group*) di negara-negara kurang maju. Dengan demikian, keterbelakangan dipandang sebagai gejala yang ditimbulkan oleh kekuatan eksternal, kebalikan dipanokus teori tahapan-linear dan perubahan struktural pada kendala inter seperti tidak memadainya tabungan dan investasi

atau kurangnya pendidikan seperti terampil. Oleh sebab itu, diperlukan perjuangan revolusioner atau paling tidak penataan ulang sistem kapitalis dunia guna membebaskan ketergantungan negara-negara berkembang dari kendali ekonomi negara maju secara langsung.

C. Model Paradigma Palsu

Pendekatan yang kedua dari teori ketergantungan internasional dalam pembangunan, model ini menghubungkan keterbelakangan dengan ketidaktepatan saran penasehat internasional yang memiliki maksud baik tetapi kurang informasi yang jelas dari badan negara maju menjadikan informasi serta kebijakan yang tidak tepat, tingginya kesenjangan kepemilikan lahan dan hak-hak lainnya; kurangnya kontrol elite lokal terhadap aset, serta akses yang tidak adil terhadap hasil dan kebijakan yang sudah diterapkan. kebijakan ini menyebabkan banyak kasus yang menguntungkan kepentingan kelompok berkuasa, baik dalam negeri maupun internasional.

Sebagai contohnya dalam pendidikan ekonomi di Universitas, dalam pembelajaran seringkali fokus terhadap konsep dan model barat yang “tidak relevan.” sedangkan diskusi tentang kebijakan pemerintah lebih banyak mengutamakan pengukuran rasio modal-output, peningkatan rasio tabungan investasi, privatisasi, serta deregulasi ekonomi, atau memaksimalkan GDP. Akibatnya, perbaikan kelembagaan dan struktural yang sebenarnya diinginkan seringkali di acuhkan atau hanya mendapatkan perhatian yang sangat kurang.

D. Pembangunan-Dualistis

Konsep aliran dualisme ini menjelaskan perbedaan yang signifikan antara negara kaya dengan negara miskin, serta antara orang kaya dan miskin di berbagai kalangan masyarakat di dalam suatu negara, aliran dualisme ini memiliki beberapa pendapat utama. Ada berbagai kondisi yang berbeda, di mana unsur-unsur “superior” dan “inferior” ada berdampingan di tempat yang sama. Contohnya, di perkotaan maupun pedesaan, terdapat koeksistensi antara elit kaya dan terdidik dengan kerumunan orang miskin yang

buta huruf. Selain itu, ada hubungan ketergantungan antara negara industri yang kaya dan negara pertanian yang lemah dalam perekonomian internasional. Koeksistensi ini bersifat permanen, bukan sementara. Koeksistensi tersebut bukanlah fenomena sementara yang suatu saat akan menghilangkan kesenjangan antara unsur superior dan inferior. Dengan kata lain, perbedaan antara negara kaya dan miskin tidak hanya merupakan fase sejarah yang akan membaik seiring waktu. Meskipun teori pertumbuhan dan model perubahan struktural mengasumsikan adanya perbaikan, para pendukung tesis pembangunan dualistis melihat fakta bahwa ketimpangan internasional justru semakin melebar.

Kadar superioritas dan inferioritas menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda penurunan; sebaliknya, kecenderungan untuk meningkat. Misalnya, kesenjangan produktivitas antara pekerja di negara maju dan pekerja di sebagian besar negara berkembang semakin melebar seiring waktu. Hubungan antara unsur superior dan inferior sangat timpang, sehingga keberadaan unsur superior tidak memberikan banyak manfaat bagi unsur inferior, apalagi untuk “menyebarkan” keuntungan ke bawah. Sebaliknya, hubungan tersebut justru menekan unsur inferior dan memperburuk keadaan mereka, sehingga memperkuat keterbelakangan yang ada.

E. Kontrarevolusi pasar bebas neoklasik

Kembalinya pendekatan neoklasik pada masalah pembangunan muncul kembali pada tahun 1980-an, seiring dengan munculnya kekuatan politik pemerintahan konservatif di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman Barat. Pendekatan ini dikenal sebagai kontrarevolusi neoklasik dalam teori dan kebijakan pembangunan ekonomi. Pada negara-negara maju, pendekatan ini mendukung kebijakan makroekonomi yang berfokus pada sisi penawaran, teori harapan rasional, dan privatisasi perusahaan milik negara. Sementara di negara-negara berkembang, pendekatan kontrarevolusi ini mendorong adanya pasar yang lebih bebas dan pengurangan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, termasuk dalam hal perusahaan negara, perencanaan statis, dan regulasi pemerintah.



Para pendukung teori neoklasik memiliki pengaruh besar di lembaga-lembaga keuangan utama dunia, seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Dengan menurunnya pengaruh organisasi internasional lain seperti International Labor Organization (ILO), United Nations Development Program (UNDP), dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), yang lebih mewakili suara negara-negara berkembang, para pendukung pasar bebas neokon-servatif semakin mendapatkan momentum untuk menantang argumen para pendukung campur tangan pemerintah dalam teori ketergantungan. Argumen utama dari teori kontrarevolusi neoklasik menyatakan bahwa keterbelakangan disebabkan oleh pengalokasian sumber daya yang tidak efektif.

F. Teori Neo Klasik

Teori ekonomi neoklasik merupakan teori yang berkembang dari teori klasik dengan fokus utama pada penentuan harga, output, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Teori ini berasumsi bahwa konsumen dan produsen bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan mereka berdasarkan sumber daya yang terbatas. konsep penting dalam teori ini termasuk penggunaan rumus matematika untuk menggambarkan interaksi di pasar dan penekanan pada marginalisme, yaitu keputusan diambil berdasarkan diambil berdasarkan perubahan kecil (marginal) dalam konsumsi atau produksi. pemikiran ini mengubah pendekatan teori ekonomi dari penjelasan berbasis biaya produksi menjadi teori utilitas marginal.

Salah satu pengembang utama teori ini adalah Robert Solow, yang mendapatkan Hadiah Nobel pada tahun 1987. Teorinya menekankan peran modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori neoklasik juga mendapat pengaruh dari pemikiran utilitarianisme, yang menekankan bahwa nilai suatu barang didasarkan pada kegunaanya bagi konsumen. Tokoh Penting lainnya, seperti Herman Heinrich Gossen, memperkenalkan konsep Hukum Gossen I dan II, yang menjelaskan hubungan antara kuantitas konsumsi barang dan tingkat

kepuasan, serta cara konsumen mengalokasikan pendapatan mereka untuk berbagai barang sesuai dengan kebutuhan mereka.

G. Teori Modern

Pembangunan merupakan salah satu agenda utama yang selalu menjadi prioritas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Rahayu (2014:70), teori modernisasi menjadi landasan yang cukup dominan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan nasional. Teori modernisasi dipengaruhi oleh dua teori besar, yaitu teori evaluasi dan teori fungsional. Asumsi dasar teori modernisasi berlandaskan pada gagasan teori evolusi, yang memandang perubahan sosial sebagai sesuatu yang berjalan secara bertahap dan terus maju ke depan. Dalam teori evolusi, masyarakat dianggap berkembang seperti “garis lurus” yang artinya masyarakat bergerak dari kondisi awal yang sederhana seperti masyarakat tradisional atau primitif menuju keadaan yang lebih maju dan kompleks seperti masyarakat modern.

Berdasarkan asumsi tersebut, para teoritikus dalam perspektif modernisasi merumuskan teori dan tesis dengan beberapa karakteristik. Pertama, modernisasi dilihat sebagai proses yang berlangsung secara bertahap. Teori Rostow tentang “tinggal landas” menjelaskan bahwa masyarakat melewati beberapa tahap pertumbuhan ekonomi, dimulai dari kondisi primitif dan sederhana, hingga akhirnya mencapai tatanan masyarakat yang maju dan kompleks. Kedua, modernisasi dipahami sebagai proses homogenisasi. Proses ini menunjukkan bahwa modernisasi menuntut adanya kesamaan dan keseragaman, yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Homogenisasi ini terjadi dalam beberapa tingkat, salah satunya adalah homogenisasi internal, yaitu keberagaman yang terjadi di dalam suatu negara. Ini berarti bahwa kesenjangan ekonomi dan sosial di antara masyarakat semakin mengecil.

Yang kedua adalah homogenisasi eksternal, yaitu terciptanya kemiripan dan keragaman antara negara maju dan negara berkembang. Proses ini dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari para pemikir teori modernisasi dalam upaya melaksanakan pembangunan secara efektif. Dengan demikian, modernisasi bukan hanya berfokus pada perubahan internal

dalam suatu negara, tetapi juga pada pencapaian kesamaan dengan negara-negara yang telah lebih dahulu maju. Homogenisasi, baik secara internal maupun eksternal, dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam proses pembangunan, karena menunjukkan pengurangan kesenjangan sosial, ekonomi, serta peningkatan kemiripan antara negara-negara di berbagai tingkat pembangunan.

Ketiga, modernisasi seringkali diidentikkan dengan proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau lebih umum dianggap sebagai upaya untuk meniru model Barat. Hal ini terlihat dari anggapan bahwa keberhasilan pembangunan selalu terkait dengan ciri-ciri negara Barat. Negara-negara Barat dianggap sebagai tolok ukur tak tertandingi dalam hal kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik, sehingga negara-negara maju ini sering dijadikan panutan atau mentor bagi negara-negara berkembang. Dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi di negara berkembang banyak meniru apa yang dilakukan negara-negara maju. Sayangnya, pendekatan ini sering mengabaikan faktor-faktor penting seperti budaya lokal, sejarah, dan kondisi spesifik dari negara berkembang itu sendiri, sehingga modernisasi tidak selalu cocok atau efektif dalam konteks lokal yang berbeda. Hal ini menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan pembangunan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Keempat, modernisasi dipandang sebagai proses yang tidak dapat dibalik atau dihentikan setelah dimulai. Begitu suatu negara mulai berinteraksi dengan negara-negara maju, negara berkembang atau dunia ketiga tidak dapat menghindari atau menghentikan laju modernisasi yang terus berlanjut. Kontak dengan negara maju membawa perubahan yang berkelanjutan, di mana masyarakat di negara berkembang secara bertahap terdorong mengikuti pola modernisasi tersebut. Dalam hal ini, modernisasi dianggap sebagai proses yang bergerak maju secara permanen, dan begitu dimulai, sulit untuk dihindari atau dihentikan, karena pengaruh global dari negara-negara maju sangat kuat dan terus berlanjut.

Kelima, modernisasi dianggap sebagai perubahan yang bersifat progresif. Para pemikir pembangunan umumnya menerima gagasan ini, tetapi

mereka juga menyadari bahwa proses modernisasi dapat memiliki efek samping yang signifikan. Proses ini sering kali mengakibatkan banyak dampak negatif yang bisa menjadi beban sosial yang berat. Biaya sosial yang tinggi ini mencakup peningkatan ketidakadilan, hilangnya nilai-nilai budaya lokal, dan munculnya kesenjangan ekonomi yang lebih besar di antara masyarakat. Oleh karena itu, meskipun modernisasi membawa potensi kemajuan, penting untuk mempertimbangkan dan mengelola dampak negatifnya agar pembangunan yang dilakukan benar-benar inklusif dan berkelanjutan, serta tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keenam, modernisasi adalah proses yang memerlukan waktu yang cukup lama. Mengingat bahwa modernisasi bersifat evolusioner, perubahan yang terjadi tidak dapat terlihat dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang panjang untuk mengamati perubahan yang dialami, dan terkadang bahkan dibutuhkan waktu antar generasi untuk sepenuhnya memahami seluruh proses modernisasi serta dampak yang ditimbulkannya. Ini menunjukkan bahwa modernisasi adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran dan pengamatan yang cermat untuk mengevaluasi hasil dan efek dari perubahan yang sedang berlangsung. Beberapa teori yang berkaitan dengan teori modernisasi adalah sebagai berikut:

Teori Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori Harrod-Domar, yang dikembangkan secara terpisah oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat tabungan dan investasi, di mana rendahnya keduanya akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Negara maju cenderung memiliki tingkat investasi tinggi melalui berbagai instrumen seperti saham dan reksa dana, dan asumsi dasar teori ini adalah bahwa masalah pembangunan berkaitan langsung dengan investasi modal; jika investasi berkembang baik, maka pembangunan ekonomi juga akan meningkat.

Di Indonesia, pemerintah mendorong investasi dengan mendirikan lembaga Penanaman Modal Nasional sebagai langkah strategis, tetapi kritik muncul ketika investasi asing membeli aset strategis yang dapat merugikan



ekonomi nasional. Teori ini lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan modal, tanpa memperhatikan aspek pengembangan kualitas manusia. Rumus Harrod-Domar, yang terkenal di kalangan ekonom pembangunan, berlandaskan pada prinsip bahwa kekurangan modal, tabungan, dan investasi adalah masalah utama pembangunan. Para ekonom di negara-negara berkembang berusaha mencari tambahan modal dari dalam negeri dan luar negeri untuk mengatasi keterbelakangan, sementara teori ini terus dimodifikasi, dengan teori Rostow sebagai contoh yang menekankan pentingnya peningkatan tabungan dan investasi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Max Weber: Etika Protestan

Max Weber, sosiolog Jerman yang lahir pada 21 April 1864, dikenal sebagai bapak sosiologi modern dan fokus pada hubungan antara agama dan perubahan sosial ekonomi. Ia memulai pendidikan di Universitas Heidelberg dan menyelesaikan gelar Ph.D. dengan disertasi tentang asosiasi perdagangan abad pertengahan. Karya terkenalnya, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, terbit pada 1904 dan menjelaskan bagaimana etika Protestan berkontribusi pada perkembangan kapitalisme di Eropa dan Amerika Serikat. Weber berargumen bahwa nilai-nilai budaya, terutama yang berasal dari agama, membentuk perilaku manusia dan memengaruhi kemajuan ekonomi. Ia mengaitkan perbedaan antara budaya Barat dan Timur dengan pemikiran agama, serta menekankan pentingnya rasionalitas dan sistematis dalam perkembangan ekonomi. Studi Weber menjadi pionir dalam meneliti hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa etika Protestan berperan penting dalam membentuk semangat kapitalisme, bertentangan dengan pandangan yang menyatakan bahwa agama tidak mempengaruhi ekonomi.

David McClelland: Dorongan Berprestasi

Pertanyaan utama yang diajukan oleh McClelland adalah apa yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan di banyak masyarakat di dunia. Ia terpengaruh oleh pandangan Weber dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang menekankan bahwa semangat kapitalisme

sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai individu. Pendekatan ini menjadi dasar penting bagi teorinya tentang dorongan berprestasi. McClelland berargumen bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masyarakat perlu mengubah dorongan berprestasi individu yang ada di dalamnya. Ia menyimpulkan bahwa *n-ach* (need for achievement) berfungsi sebagai semacam “virus” yang perlu ditularkan kepada anggota masyarakat yang ingin mencapai kemajuan ekonomi. Dengan menumbuhkan dorongan berprestasi, McClelland percaya bahwa individu akan lebih termotivasi untuk berinovasi dan berusaha, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rostow: Proses Pembangunan

Rostow memberikan perhatian besar terhadap proses pembangunan dengan membagi tahapan tersebut menjadi Lima Tahap Pembangunan, yaitu:

1. Masyarakat Tradisional,
2. Prakondisi untuk Lepas Landas,
3. Lepas Landas,
4. Bergerak ke Kedewasaan, dan
5. Zaman Konsumsi Massal yang Tinggi.

Melalui lima tahap ini, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dianalisis berdasarkan apakah semua proses tersebut telah dilalui. Perbedaan antara tahap-tahap ini bersifat dikotomis, memisahkan masyarakat tradisional dari masyarakat modern. Rostow menegaskan bahwa negara yang mendukung kepentingan pengusaha dalam melakukan akumulasi modal akan mulai bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pendekatannya ini menunjukkan pengaruh teori Harrod-Domar, yang menekankan pentingnya tabungan dan investasi dalam mendorong pertumbuhan. Dengan menekankan peran aktif negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung investasi, Rostow memberikan pandangan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya hasil dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan dalam negeri yang mendorong akumulasi modal dan inovasi.



Bert F. Hoselitz : Non Ekonomi atau Lingkungan Pekerjaan

Hoselitz mengkaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak diperhatikan oleh Rostow, dengan menyoroti pentingnya kondisi lingkungan dalam proses pembangunan. Meskipun faktor ekonomi memiliki peranan penting, perubahan kelembagaan dalam masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu faktor non-ekonomi yang krusial adalah penyediaan tenaga ahli dan terampil. Ketersediaan tenaga kerja terampil sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, karena tanpa dukungan tersebut, modal dan investasi tidak akan cukup untuk mendorong proses pembangunan. Pemikiran Hoselitz menarik karena menekankan aspek kelembagaan yang mendukung pembangunan, seperti lembaga pendidikan dan mobilisasi modal. Selain itu, ia juga mengkaji faktor-faktor individual dan budaya, tetapi beralih ke masalah yang lebih konkret, yaitu lembaga politik dan sosial, untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh terhadap pembangunan.

Inkeles-Smith: Manusia Modern

Inkeles dan Smith mengkaji pentingnya faktor manusia sebagai penopang utama dalam pembangunan. Mereka berargumen bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal dan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada manusia sebagai pelaksana teknologi dan agen perubahan. Mereka kemudian mengidentifikasi ciri-ciri manusia modern, seperti keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, orientasi pada masa kini dan masa depan, kemampuan merencanakan, serta keyakinan bahwa manusia dapat menguasai alam. Dari penelitian mereka, Smith dan Inkeles menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga yang paling efektif untuk mengubah karakter manusia. Mereka berpendapat bahwa dampak pendidikan tiga kali lebih besar dibandingkan pendekatan lainnya. Dalam konteks Indonesia, pendidikan menjadi faktor krusial untuk pengembangan; jika negara ingin mencapai modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka perhatian besar harus diberikan pada sektor pendidikan.

H. Teori Postmodern

Kemunculan postmodernisme tidak bisa dipisahkan dari modernisme itu sendiri. Istilah modernisme merujuk pada sesuatu yang maju, cemerlang, dan progresif. Modernisme selalu menawarkan janji untuk membawa kita menuju perubahan ke arah dunia yang lebih stabil, di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi. Melalui rasionalitas, kita dapat mengatasi mitos dan keyakinan tradisional yang tidak berdasar, yang sering membuat manusia merasa tak berdaya dalam menghadapi realitas (Maksum, 2014: 309).

Postmodernisme awalnya muncul sebagai tanggapan terhadap modernisme. Istilah ini merujuk pada bentuk-bentuk kebudayaan, pemikiran, dan seni yang tidak lagi mengikuti satu aturan atau prinsip yang jelas. Sebaliknya, postmodernisme ditandai oleh kerumitan, kontradiksi, kebingungan, dan variasi, sehingga sering kali sulit dibedakan dari parodi. Dengan kata lain, postmodernisme menantang pandangan tradisional dan mendorong cara baru dalam melihat realitas, dimana berbagai perspektif dianggap penting dan tidak ada satu cerita yang dianggap paling benar.

Sementara itu, istilah “postmodernisme” adalah istilah yang berasal dari postmodernisme dan merujuk pada aspek-aspek non-seni dalam sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan baru. Terutama, istilah ini mencakup perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya sejak tahun 1960-an. Dengan kata lain, postmodernitas menggambarkan perubahan yang terjadi di masyarakat, cara orang berinteraksi, serta transformasi dalam ekonomi dan budaya yang terjadi setelah era modern.

Terdapat dua golongan ekstrim dalam memahami postmodern yaitu (Lubis, 2004, 75). Pertama, para pemikir yang bersikap moderat, yang menganggap bahwa postmodern hanyalah kelanjutan dari modern. Beberapa tokoh yang sejalan dengan pandangan ini antara lain Daniel Bell yang menyebutnya sebagai “post-industri,” Anthony Giddens yang menggunakan istilah seperti era modernisme radikal dan high modernity, serta Jurgen Habermas yang menyebutnya sebagai “post pencerahan” atau lanjutan dari pencerahan. Menurut pemahaman ini, postmodern bukan berarti menghapus semua yang berhubungan dengan modern, dan bukan pula gerakan untuk kembali ke masa lalu. Sebaliknya, postmodern masih dapat

mengambil elemen positif dari era modern (*reuse*) dan menyusun kembali berbagai unsur dari tradisi dan modernitas dalam konteks yang baru (*collage*). Ini terlihat jelas dalam bidang seni rupa, arsitektur, dan desain busana postmodern.

Kedua, ada pandangan ekstrem yang menganggap peralihan dari modern ke postmodern sebagai perubahan paradigma yang radikal, bukan sekadar kelanjutan dari yang sebelumnya. Salah satu penganut pandangan ini adalah Francois Lyotard, yang berpendapat bahwa tidak ada kesinambungan (diskontinuitas) dalam cara berpikir antara kedua era tersebut. Menurut Lyotard, postmodern adalah era dimana terjadi ketidakpercayaan terhadap narasi besar atau meta-narasi, dan hal ini digantikan oleh narasi-narasi kecil. Berikut adalah pembahasan mengenai postmodernisme menurut berbagai ahli.

Menurut Bauman, kebudayaan postmodern sangat beragam dan bergantung pada cara interpretasi dan penyampaian melalui media (Bauman, 1997:31). Awalnya, modernisme adalah istilah yang memiliki makna dalam berbagai bidang seperti seni, arsitektur, perencanaan kota, politik, teologi, tradisi, dan budaya lainnya. Bauman merasa penting untuk memperjelas konsep postmodernisme, karena dia melihat bahwa di berbagai bidang postmodernisme masih kurang jelas, sehingga diperlukan pemurnian konsep modernisme. Postmodernisme muncul dari individu-individu dengan ide-ide unik yang berbeda dari yang umum pada zamannya, yang memiliki potensi untuk mengubah segalanya. Bauman berpendapat bahwa dalam postmodernisme, dibutuhkan pihak-pihak berwenang untuk menjelaskan dan memberi kejelasan tentang konsep ini.

Menurut Habermas, seperti yang dijelaskan dalam karya Tom Turner, *City as Landscape: a Post Post-Modern*, modernisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa agama dan tradisi tidak selalu menjadi pengatur utama dalam kehidupan manusia; sebaliknya, kehidupan bisa diatur melalui pendekatan filsafat dan politik. Habermas juga mengamati bahwa seni modern, yang banyak muncul pada abad ke-20, seringkali hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga banyak karya seni tersebut tidak dapat diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara penciptaan seni modern dan pemahaman atau apresiasi publik terhadapnya.

Lloyd dalam Tom Turner “City as Landscape a Post PostModern”, menjelaskan bahwa postmodern adalah memutus total teori dan kultur modern karena kegagalan modern theory dalam melihat realitas dan paradigma yang ada saat ini. Postmodern theory tidak membicarakan sesuatu yang baku dalam benar atau salah, semua bisa lebih terbuka. Misalnya modern arsitektur adalah sebutan untuk karya arsitek mulai abad ke-20, modern planning adalah ide untuk membuat suatu kota menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih multifungsi mulai abad ke-19. Semua teori postmodernisme menginginkan sesuatu yang lebih dari modernism (Turner, 1996: 3).

Menurut Akbar S. Ahmed, seorang antropolog Muslim, postmodernisme mencakup berbagai esai yang menyajikan pemikiran-pemikiran baru. Beberapa di antara pemikiran tersebut sangat signifikan, seperti:

1. Menelusuri pemikiran postmodern menunjukkan adanya keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proyek modernitas yang dibangun di atas prinsip totalitas universal. Postmodernisme lebih memerlukan pemahaman yang kompleks dan tidak sekadar berpikir dalam hitam-putih.
2. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi (cyberspace) berfungsi sebagai alat yang kuat dalam mempromosikan budaya dominan dari peradaban global saat ini. Contohnya, Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi berskala besar ini untuk menyebarkan virus kapitalisme hegemoni di berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia.
3. Para tokoh postmodern lebih cenderung berperan sebagai filsuf dibandingkan dengan antropolog (etnograf), karena fokus utama postmodernisme adalah pada penguraian ide-ide sosial-politik yang terfragmentasi dan perubahan pemikiran.

Menurut Ahimsa Putra dan Heddy Shri (2005), pemikiran postmodern dalam antropologi budaya berusaha untuk lebih jujur terhadap diri sendiri dan lebih berani menerima kenyataan, termasuk kritik bahwa etnografi sering kali dianggap sebagai fiksi. Dengan pendekatan ini, para penulis

etnografi yang terpengaruh oleh postmodernisme bisa lebih kreatif dalam menggunakan cara mereka untuk menyampaikan ide dan pesan, terutama melalui penulisan dan retorika. Pemikiran postmodern dalam antropologi budaya juga melakukan refleksi yang lebih mendalam dan kritis terhadap kemampuan dan batasan dari retorika dalam penulisan etnografi, serta memberikan perhatian lebih pada cara kebudayaan direpresentasikan.

I. Pendekatan institusi dalam pembangunan

Institusi adalah seperangkat aturan, norma, nilai, dan praktik yang membentuk dan mengatur perilaku serta interaksi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Institusi berfungsi sebagai “aturan main” yang memberikan struktur dan stabilitas, sehingga memungkinkan masyarakat berfungsi secara tertib dan efektif (North, 1990). Institusi didirikan untuk mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, baik dalam bentuk formal maupun informal. Institusi formal merupakan struktur yang diatur oleh hukum dan peraturan tertulis yang diakui secara resmi, seperti pemerintahan, sistem hukum, lembaga keuangan, dan sistem pendidikan. Sementara itu, institusi informal mencakup aturan dan norma yang tidak tertulis tetapi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat, seperti norma sosial, nilai budaya, dan adat istiadat (Acemoglu & Robinson, 2012).

Institusi mendapat peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk suasana interaksi sosial dan ekonomi dengan mengurangi ketidakpastian, menegakkan aturan, memfasilitasi kerja sama, dan mendistribusikan sumber daya. Institusi yang kuat dianggap menjadi prasyarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Institusi yang baik dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, mengurangi ketimpangan, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan penegakan kontrak (Rodrik, 2003). Nyatanya, institusi tidak selalu bekerja secara optimal.

Tantangan yang terjadi di lapangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan efektivitas pelaksanaan kegiatan institusi.

Institusi yang lemah seringkali tidak mampu menegakkan hukum dan aturan, membuka peluang korupsi, serta mencampakkan kelompok tertentu dari akses terhadap sumber daya dan peluang. Kondisi ini menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (World Bank, 2002). Kualitas institusi suatu negara atau wilayah sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan institusi dalam pembangunan ekonomi menekankan betapa pentingnya peran institusi dalam menentukan hasil pembangunan ekonomi dan sosial. Pemikiran ekonom institusional seperti Douglass North, Daron Acemoglu, dan James Robinson menegaskan bahwa institusi yang baik merupakan prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012). Institusi yang baik memberikan perlindungan terhadap instrumen seperti hak kepemilikan, menegakkan kontrak, dan mencegah korupsi, sehingga menciptakan kepercayaan bagi investor untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Selain itu, institusi yang adil memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Institusi politik yang dianggap kuat adalah institusi yang mampu mengelola konflik sosial dan politik melalui proses demokratis yang adil, transparan, dan akuntabel. Stabilitas politik dan hukum yang terjaga adalah faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Rodrik et al., 2004). Reformasi institusi, meskipun penting, seringkali menghadapi resistensi dari kelompok yang diuntungkan oleh status quo. Reformasi memerlukan waktu yang lama serta komitmen kuat untuk mengatasi tantangan struktural (Acemoglu et al., 2005). Dengan demikian, pendekatan institusi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi seperti modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial. Institusi yang kuat, inklusif, dan responsif mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012).





BAB III

STRUKTUR EKONOMI DAN PERUBAHAN

A. STRUKTUR EKONOMI DAN SEKTOR-SEKTORNYA

Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai pendorong utama terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara. Proses transformasi struktural ini melibatkan peralihan dari ketergantungan pada sektor primer, seperti pertanian dan sumber daya alam, menuju sektor sekunder dan tersier yang lebih fokus pada industrialisasi dan jasa. Transformasi ini mencerminkan peningkatan kompleksitas ekonomi yang ditandai dengan diversifikasi kegiatan ekonomi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor.

Seperti yang dikemukakan oleh Todaro (1999), proses perubahan ini umumnya mencakup beberapa indikasi utama: (1) adanya penurunan pangsa sektor primer dalam kontribusinya terhadap PDB, yang menggambarkan menurunnya ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam; (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder, khususnya industri, yang menunjukkan pertumbuhan dalam kapasitas manufaktur dan pengolahan; dan (3) sektor tersier yang semakin memberikan kontribusi besar, mencerminkan meningkatnya peran sektor jasa dalam perekonomian yang semakin maju. Hal ini menyatakan bahwa dengan adanya proses

perubahan perekonomian secara otomatis menurunnya pangsa sektor primer yang ditandai dengan perubahan struktur perekonomian.

Struktur ekonomi digunakan untuk menggambarkan komposisi atau susunan sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Struktur ini juga merupakan bentuk penerapan dari berbagai sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Struktur perekonomian dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu perspektif makro-sektoral, perspektif keuangan, perspektif kenegaraan, dan perspektif birokrasi dalam pengambilan keputusan. Perspektif makro-sektoral dan keuangan merupakan bagian dari analisis ekonomi murni, sedangkan perspektif kenegaraan dan birokrasi pengambilan keputusan berada dalam ranah politik. Sektor ekonomi yang dominan atau unggul adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk nasional dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi karakteristik dari perekonomian tersebut.

Struktur ekonomi yang kita hadapi saat ini sebenarnya merupakan struktur yang bersifat transisi. Kita sedang mengalami peralihan dari struktur agraris ke industrial, dari struktur etatis ke borjuis, serta dari struktur pedesaan/tradisional ke perkotaan/modern. Di sisi lain, dalam aspek birokrasi dan pengambilan keputusan, terdapat kecenderungan untuk desentralisasi. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia sangat diperlukan oleh negara dan bangsa. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia perlu dirombak agar dapat mendorong dan mengembangkan budaya inovasi, bukan hanya budaya menghafal yang berlaku saat ini.

Sistem perekonomian merupakan bagian dari struktur perekonomian. Kata “struktur” berasal dari bahasa Inggris “structure,” yang berarti kerangka atau susunan. Sedangkan “ekonomi” berasal dari bahasa Latin “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti mengatur atau menyusun. Dengan demikian, ekonomi dapat dipahami sebagai proses pengelolaan suatu rumah tangga. Jika kedua kata ini digabungkan, maka pengertian Struktur Perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga. Dalam pengertian yang lebih luas, struktur

perekonomian merujuk pada bagian-bagian dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga negara tersebut.

Sektor-Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah kategori-kategori utama aktivitas ekonomi yang mencerminkan jenis pekerjaan atau industri yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sektor-sektor ini mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan kesamaan fungsi atau jenis produk yang dihasilkan.

Sektor Primer

Sektor primer adalah sektor ekonomi yang fokus pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Contoh utamanya meliputi:

- Pertanian: Menanam tanaman atau memelihara hewan untuk menghasilkan bahan pangan, seperti padi, jagung, sayuran, daging, dan susu.
- Perikanan: Penangkapan ikan di laut, danau, atau sungai, serta budidaya ikan (akuakultur).
- Kehutanan: Pengelolaan dan pemanfaatan hutan, seperti penebangan pohon untuk kayu.
- Pertambangan: Pengambilan sumber daya alam dari dalam tanah, seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan mineral lainnya.

Sektor Sekunder

Sektor sekunder adalah sektor yang berfokus pada kegiatan manufaktur. Sektor ini sangat bergantung pada sektor primer karena bahan mentah dari sektor tersebut diperlukan dalam proses pengolahan. Secara umum, kegiatan di sektor sekunder dibagi menjadi tiga kategori utama:

- Mengambil bahan mentah dari sektor primer dan mengolahnya menjadi barang konsumsi, seperti dalam produksi makanan.
- Mengolah kembali barang yang sudah diproduksi oleh sektor sekunder untuk menciptakan produk baru, seperti pembuatan kendaraan.

- Mendaur ulang barang modal bekas untuk memproduksi barang konsumsi atau non-konsumsi, misalnya memanfaatkan ban bekas untuk membuat produk lain.

Sektor Tersier

Sektor tersier adalah sektor yang fokus pada penyediaan layanan dalam bentuk jasa. Meskipun tidak memproduksi barang fisik, sektor ini tetap mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Sektor ini bisa dioperasikan oleh siapa saja, tetapi umumnya dikelola oleh perusahaan swasta dan pemerintah. Contoh yang umum ditemukan adalah perusahaan asuransi swasta dan bank yang dimiliki oleh pemerintah. Berikut adalah contoh produksi sektor tersier:

- Salon (pemotongan dan penataan rambut)
- Bank (penyimpanan uang)
- Bioskop (jasa hiburan)
- Jasa real estate
- Angkutan atau transportasi
- Pariwisata
- Layanan kesehatan
- Administrasi
- Keamanan
- Pertahanan

B. PROSES INDUSTRIALISASI DAN URBANISASI

Proses Industrialisasi

Konsep industrialisasi yang dikendalikan oleh negara sudah dimulai sejak abad ke-19 dan semakin berkembang di Jepang dan negara-negara Barat. Revolusi industri terjadi pada awal abad 19, dengan nama lain dapat disebut sebagai zaman mesin. Sebelumnya, semua produksi barang secara manual menggunakan tangan, sehingga tempat produksi tidak terlalu besar dan biasanya terletak dengan tempat tinggal pemilik usaha. meskipun jumlah barang yang diproduksi lebih sedikit karena jumlah pegawai yang terbatas,

namun terjadi hubungan emosional (baik buruk) antara pegawai dan pemilik usaha. Industrialisasi kemudian dianggap sebagai bagian dari “Ideologi Pembangunan Nasional” di banyak negara berkembang, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan produktivitas kerja. Pada tahap awal, banyak negara memilih untuk mengembangkan industri substitusi impor, yang menghasilkan kemajuan pesat di awal tetapi lambat ketika perlindungan industri dikurangi. Di Indonesia, industrialisasi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi sejak 1969, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, industrialisasi sering dianggap sebagai kunci dalam pembangunan ekonomi. Industrialisasi dianggap sebagai strategi penting untuk memperbaiki kondisi ekonomi, dilihat sebagai langkah bertahap yang harus dilalui dalam mengubah struktur ekonomi negara. Selain itu, industrialisasi juga dilihat sebagai solusi efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan, keterbelakangan, dan pengangguran, terutama jika industri yang dibangun berbasis tenaga kerja padat, memanfaatkan sumber daya lokal, dan memberikan efek positif pada pendapatan, lapangan kerja, serta teknologi di daerah sekitar.

Teori Smith tentang industrialisasi menjelaskan bahwa Peningkatan produktivitas bergantung pada fokus produk tertentu atau penggunaan sumber daya tertentu. Smith berpendapat bahwa pengelompokan tenaga kerja memberikan dampak besar pada peningkatan produktivitas. Dalam penelitiannya tentang pabrik yang memproduksi pin, ia menemukan bahwa pekerja yang memiliki tugas khusus dapat memproduksi lebih banyak pin dibandingkan dengan pekerja yang melakukan semua proses pembuatan secara keseluruhan. Smith menjelaskan bahwa produktivitas pekerja yang memiliki tugas spesifik bisa dibagi menjadi tiga faktor: (1) Peningkatan keterampilan, Pekerja dapat fokus pada tugas tertentu, sehingga keterampilannya meningkat; (2) Penghematan waktu, Waktu yang biasanya terbuang untuk berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya dapat dihemat; (3) Penggunaan mesin, Pekerja dapat lebih efisien dengan bantuan mesin.

Dengan pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan ini, terjadi perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan cara kerja sebelumnya. Menurut Alan Mountjoy dalam Latief (2002), sektor industri memiliki beberapa kelebihan dibanding produksi primer atau sektor pertanian, antara lain :

- Memiliki metode, persaingan, dan output yang lebih fleksibel daripada sektor pertanian ;
- *Decreasing return* adalah situasi di mana setiap penambahan faktor produksi dan biaya menghasilkan peningkatan produksi yang semakin kecil, hingga pada titik tertentu tidak lagi menguntungkan. Dalam hal ini, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan unit produksi baru. Sektor industri manufaktur berkembang lebih lambat dibandingkan sektor pertanian, karena pertanian terus mengalami peningkatan teknologi yang membuat prosesnya lebih efisien dan produktivitasnya meningkat.
- Kontrol produksi dapat lebih tepat sehingga lebih mudah menyesuaikan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga supply atau produksinya lebih mudah disesuaikan bila terjadi perubahan permintaan atau perubahan harga.
- Proporsi antara biaya operasi dan biaya tetap lebih baik, dalam bidang pertanian biaya tetap relatif lebih tinggi daripada biaya operasional sehingga perkembangannya lambat. Dalam industri manufaktur, biaya yang besar diperlukan untuk bahan baku, tenaga, dan jasa-jasa lain, termasuk biaya operasional.
- Perekonomian industri lebih mampu menyerap tenaga kerja. karena itu, sasaran umum kebijakan industri: (a) Untuk menyediakan lapangan pekerjaan, terutama dari sektor pertanian yang jumlahnya semakin banyak, sedangkan kesempatan untuk bekerja sangat sedikit; (b) Meningkatkan taraf hidup; (c) Untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran.

Urbanisasi

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh negara berkembang saat ini adalah urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses pengkotaan yang saling

berkaitan dengan masalah pembangunan lainnya. Tjiptoherijanto (1999) menyatakan urbanisasi sering dipahami sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Namun, pemahaman ini tidak sepenuhnya tepat. Urbanisasi sebenarnya mengacu pada persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, yang berbeda dari arti kota itu sendiri. Daerah perkotaan memiliki tiga kriteria, yaitu:

1. Kepadatan penduduk minimal 500 orang per kilometer persegi.
2. Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian tidak lebih dari 25%.
3. Terdapat delapan jenis fasilitas perkotaan atau lebih.

Urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai masalah kependudukan, tetapi juga sebagai masalah yang berkaitan dengan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin baik perekonomian suatu daerah, semakin tinggi tingkat urbanisasinya. Jadi, urbanisasi adalah fenomena alami yang terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Namun, perlu diingat bahwa konsentrasi penduduk yang terlalu tinggi di satu wilayah dapat menyebabkan masalah, seperti aglomerasi atau primacy, yang harus dihindari. Dengan demikian, perpindahan penduduk dari desa menuju kota hanyalah sebagian dari faktor yang mempengaruhi tingkat urbanisasi, berbagai studi dan data memperlihatkan bahwa semakin maju tingkat perekonomian suatu negara, semakin tinggi pula tingkat urbanisasinya.

Salim (2006) menyatakan bahwa Indonesia telah menerapkan kebijakan urbanisasi dengan dua pendekatan. Pertama, mengembangkan daerah pedesaan agar menjadi lebih maju dan memiliki karakteristik seperti daerah perkotaan, yang dikenal dengan istilah “urbanisasi pedesaan.” Kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut “daerah penyangga pusat pertumbuhan.” Pendekatan pertama bertujuan untuk “mempercepat” urbanisasi tanpa harus menunggu pertumbuhan ekonomi, dengan melakukan berbagai inovasi yang tidak terkait langsung dengan ekonomi. Diharapkan perubahan dalam urbanisasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, daerah pedesaan didorong untuk tumbuh dan memiliki ciri-ciri perkotaan. Penduduk desa dapat dianggap

sebagai “orang kota,” meskipun mereka masih tinggal di lingkungan pedesaan. Contohnya termasuk istilah seperti wisata pantai, kota pantai, dan desa wisata agribisnis. Pendekatan kedua adalah mengembangkan kota-kota kecil dan menengah yang sudah ada untuk menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan.

Urbanization economies dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mendorong suatu usaha untuk berlokasi di kota-kota besar, di mana terdapat konsentrasi penduduk dan infrastruktur perkotaan. Ini termasuk potensi konsumen dan sumber tenaga kerja, serta infrastruktur produksi seperti listrik, pelabuhan, air, dan lainnya, yang memungkinkan kegiatan usaha berjalan lebih efisien. Faktor-faktor ini umumnya tidak ditemukan di kota-kota kecil atau di daerah pedesaan. Belakangan ini, semakin banyak kegiatan ekonomi terpusat di kota-kota besar di Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai deregulasi di sektor industri dan keuangan yang dilakukan pemerintah. Tujuan dari deregulasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi dalam sektor-sektor tersebut. Kebijakan ini cenderung lebih menguntungkan kota-kota besar dibandingkan kota kecil atau pedesaan, terutama di Pulau Jawa, yang sudah lebih siap dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang didorong oleh deregulasi tersebut.

C. PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM EKONOMI BERKEMBANG

Perubahan struktural dalam ekonomi berkembang merujuk pada transformasi mendasar dalam komposisi serta dinamika perekonomian suatu negara. Proses ini mencerminkan bagaimana proporsi kontribusi sektor-sektor utama—pertanian, industri, dan jasa—mengalami pergeseran seiring dengan berlangsungnya pembangunan ekonomi. Fenomena ini tidak hanya bersifat statistik, melainkan juga menyangkut realitas keseharian masyarakat: di mana mereka bekerja, bagaimana mereka hidup, dan sejauh mana mereka dapat mengakses peluang ekonomi baru.

Pada tahap awal pembangunan, sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian yang berorientasi pada produksi subsisten dengan

produktivitas rendah. Pola ini bisa dilihat pada banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada pertengahan abad ke-20, ketika mayoritas penduduk masih bergantung pada pertanian tradisional. Namun, seiring meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi, tenaga kerja mulai bergerak menuju sektor manufaktur dan jasa yang lebih produktif serta mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Pergeseran ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan lokasi kerja dari desa ke kota, melainkan juga dengan peningkatan efisiensi, adopsi teknologi baru, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Modernisasi Pertanian sebagai Titik Awal

Transformasi struktural biasanya dimulai dengan modernisasi sektor pertanian. Penggunaan teknologi, mekanisasi, benih unggul, pupuk kimia, serta perbaikan sistem irigasi memungkinkan peningkatan produktivitas meskipun jumlah tenaga kerja di sektor tersebut menurun. Inovasi pertanian inilah yang menciptakan apa yang disebut surplus tenaga kerja, yakni kelompok masyarakat yang tidak lagi dibutuhkan secara penuh di sektor pertanian dan kemudian bermigrasi ke sektor industri maupun perkotaan.

Contoh nyata adalah Revolusi Hijau di Asia Selatan dan Asia Tenggara pada dekade 1960–1980. Melalui adopsi varietas padi berproduksi tinggi dan modernisasi sistem irigasi, negara-negara seperti India, Indonesia, dan Filipina mampu meningkatkan produksi pangan secara drastis. Hasilnya, meskipun jumlah tenaga kerja pertanian berkurang, produksi pangan tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Surplus pekerja yang dihasilkan kemudian menjadi basis tenaga kerja murah bagi industrialisasi tahap awal.

Urbanisasi sebagai Motor Perubahan

Urbanisasi menjadi faktor kunci yang mempercepat perubahan struktural. Kota menawarkan lebih banyak peluang kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang lebih baik dibandingkan pedesaan. Migrasi besar-besaran ke kota menciptakan pusat-pusat ekonomi baru dengan jaringan transportasi, pasar tenaga kerja, dan ekosistem bisnis yang lebih beragam.

Namun, urbanisasi bukan hanya sekadar perpindahan geografis. Ia membawa perubahan gaya hidup, pola konsumsi, bahkan nilai-nilai sosial. Di kota, masyarakat cenderung mengakses barang konsumsi modern, menggunakan layanan keuangan, dan lebih terpapar pada inovasi teknologi. Perubahan ini menciptakan permintaan baru yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor jasa, mulai dari perdagangan ritel, transportasi, perbankan, hingga teknologi informasi.

Jika dicermati, negara-negara yang berhasil memanfaatkan urbanisasi sebagai kekuatan pembangunan adalah mereka yang mampu mengelola kota dengan baik. Korea Selatan, misalnya, dalam beberapa dekade berhasil mentransformasi desa-desa agraris menjadi kota-kota industri modern. Namun, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan masalah serius, seperti yang terlihat di banyak negara Afrika Sub-Sahara, di mana pertumbuhan kota jauh lebih cepat dibandingkan penyediaan infrastruktur dasar.

Diversifikasi Ekonomi dan Ketahanan Perekonomian

Pertumbuhan kota dan industrialisasi mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang semakin beragam. Diversifikasi ini sangat penting bagi negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau komoditas tertentu. Ketika ekonomi bergantung pada ekspor bahan mentah—misalnya minyak, tembaga, atau karet—fluktuasi harga global dapat menimbulkan guncangan yang parah terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Diversifikasi melalui pengembangan sektor manufaktur dan jasa modern memperkuat ketahanan perekonomian. Contohnya, Malaysia yang dulunya sangat bergantung pada karet dan timah berhasil melakukan transformasi menuju basis industri elektronik dan jasa keuangan. Demikian pula, Vietnam dalam dua dekade terakhir berkembang pesat sebagai pusat manufaktur elektronik, tekstil, dan alas kaki, sekaligus mulai membangun sektor jasa berbasis digital.

Peran Strategis Sektor Jasa

Pada tahap perkembangan lebih lanjut, sektor jasa muncul sebagai motor utama pertumbuhan. Sektor ini tidak hanya mencakup layanan tradisional seperti perdagangan dan transportasi, tetapi juga meluas ke bidang jasa modern seperti perbankan, telekomunikasi, teknologi digital, kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan sektor jasa sering kali beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena layanan ini membutuhkan tenaga kerja terampil dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Selain menyerap tenaga kerja, sektor jasa juga menjadi pusat inovasi yang mendorong daya saing global. Misalnya, India sukses menempatkan diri sebagai salah satu pusat jasa teknologi informasi dunia, sementara Filipina menjadi tujuan utama layanan business process outsourcing (BPO). Keunggulan di sektor jasa ini tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap PDB, tetapi juga menciptakan konektivitas yang erat dengan ekonomi global.

Dampak Positif Perubahan Struktural

Perubahan struktural memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat karena produktivitas meningkat di berbagai sektor. Lapangan kerja dengan pendapatan lebih tinggi tercipta, sehingga standar hidup masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita memperluas akses terhadap barang konsumsi modern, layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas infrastruktur.

Dari sisi makro, transformasi struktural memperkuat kapasitas fiskal negara. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi meningkatkan penerimaan pajak, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan sosial dan infrastruktur. Negara yang berhasil melakukan perubahan struktural biasanya juga mengalami perbaikan dalam stabilitas politik, karena peningkatan kesejahteraan masyarakat mengurangi ketidakpuasan sosial.

Tantangan dan Risiko yang Mengiringi

Namun, transformasi struktural tidak lepas dari tantangan. Pertama, ketimpangan pendapatan sering muncul antara kelompok yang cepat beradaptasi dengan modernisasi dan mereka yang tertinggal. Masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada pertanian tradisional sering kali terpinggirkan, sementara masyarakat perkotaan menikmati pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Kedua, urbanisasi yang terlalu cepat dapat menimbulkan masalah sosial seperti munculnya kawasan kumuh, ketidakmerataan infrastruktur, kemacetan, serta meningkatnya biaya hidup di perkotaan. Fenomena ini bisa menghambat produktivitas jangka panjang dan memunculkan ketidakstabilan sosial.

Ketiga, dari sisi lingkungan, pertumbuhan industri dan ekspansi kota berpotensi memperparah polusi udara, pencemaran air, deforestasi, serta hilangnya lahan pertanian produktif. Negara-negara yang terlalu mengandalkan ekspansi industri berat sering kali menghadapi degradasi lingkungan yang parah, yang justru mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Keempat, perubahan struktural sering terkendala oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang tersedia. Pendidikan dan pelatihan sering kali tertinggal dibandingkan kecepatan perubahan ekonomi, sehingga terjadi skills mismatch. Akibatnya, meskipun ada banyak peluang kerja baru, sebagian tenaga kerja tidak mampu mengisinya.

Pentingnya Kebijakan Publik yang Mendukung

Mengingat peluang sekaligus tantangan tersebut, negara-negara berkembang harus mengelola perubahan struktural secara hati-hati. Diperlukan kebijakan publik yang mendukung agar proses transformasi berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting. Tenaga kerja yang terampil menjadi kunci agar suatu negara tidak hanya menjadi basis produksi berbiaya murah, tetapi juga pusat inovasi dan nilai tambah.

Kedua, penguatan infrastruktur dasar—seperti transportasi, listrik, air bersih, dan internet—harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi, serta menarik investasi.

Ketiga, kebijakan industri yang inklusif perlu dirancang agar pertumbuhan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga menciptakan rantai pasok yang melibatkan usaha kecil dan menengah.

Keempat, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan. Regulasi lingkungan, investasi dalam energi terbarukan, dan perencanaan kota berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan jangka panjang.

Menuju Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dengan strategi yang tepat, perubahan struktural dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Artinya, manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir elite perkotaan. Negara yang berhasil melakukan transformasi struktural secara seimbang biasanya memperlihatkan pola pembangunan yang stabil, ketahanan ekonomi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup yang berkesinambungan. Perubahan struktural pada akhirnya bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang membangun fondasi sosial, politik, dan lingkungan yang memungkinkan pembangunan berlangsung dalam jangka panjang. Bagi negara-negara berkembang, keberhasilan dalam mengelola proses ini dapat menjadi tiket menuju status negara maju di masa depan.





BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Pengertian Kebijakan Fiskal dan Moneter

Filosofi kebijakan fiskal didasarkan pada teori Keynes yang muncul sebagai respon terhadap *Great Depression* yang melanda perekonomian Amerika pada tahun 1930-an. Keynes mengkritik pandangan para ekonom Klasik yang berpendapat bahwa perekonomian akan selalu mencapai full employment, di mana setiap penambahan belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta (*crowding out*) dalam jumlah yang sama, sehingga tidak mempengaruhi pendapatan agregat. Menurut Keynes, pasar bebas sendiri tidak mampu melakukan penyesuaian untuk mencapai full employment. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal dan moneter. Keynes juga menyatakan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah, tetapi juga memiliki efek pengganda fiskal (*multiplier effect*) atas belanja tersebut (Mankiw, 2013:303).

Dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang di dalamnya tersirat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang akan dibahas

di buku ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang dimana kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa, sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pasar uang.

Mankiw (2013:68) menjelaskan kebijakan fiskal sebagai “kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik atau sesuai keinginan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.” Secara umum, ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat pengangguran, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dimaksudkan untuk menurunkan inflasi dan mengurangi defisit neraca pembayaran luar negeri (Mankiw, 2013:392).

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral yang berkaitan dengan pengelolaan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi variabel-variabel dalam perekonomian (Mishkin, 2010:10). Secara umum, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, yang tercermin dalam stabilitas harga (pengendalian inflasi), peningkatan pendapatan per kapita, dan tersedianya peluang kerja yang luas (Mishkin, 2010:11).

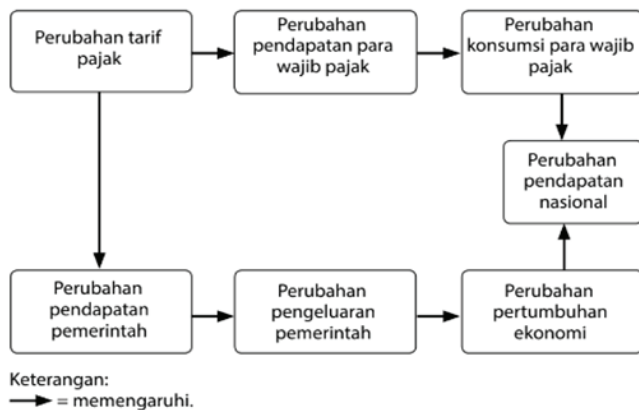
Kebijakan fiskal ditentukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cara mengubah besarnya penetapan pajak kepada para wajib pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh wajib pajak dan pemungutan serta pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah, seperti yang diatur dalam APBN, dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang diinginkan, yang biasanya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Oleh karena itu, wajar jika kebijakan fiskal berubah dari tahun ke tahun. Begitu juga kebijakan moneter ditetapkan oleh otoritas moneter, yaitu bank sentral melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, serta dilaksanakan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan, kedua kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi atau bahkan

mendorong pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut bisa dijalankan bersamaan atau secara terpisah.

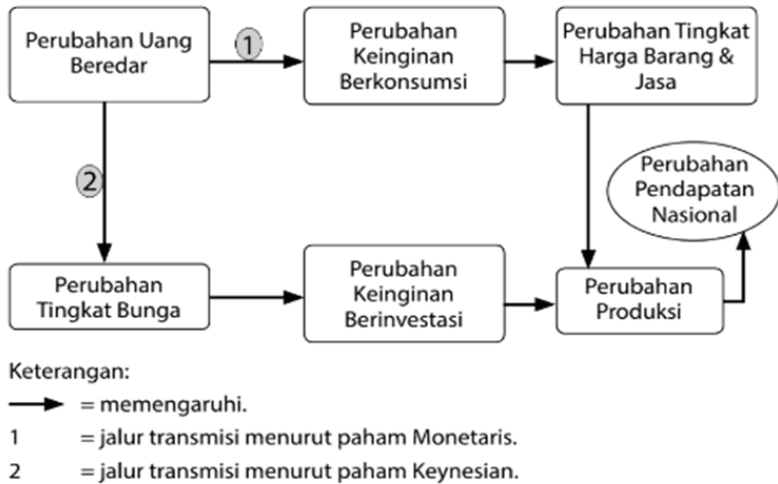
Peranan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dari penjelasan diatas, tampak jelas bahwa kebijakan fiskal dan moneter adalah dua elemen yang sangat krusial dalam keseluruhan kebijakan ekonomi, atau dapat dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, diakui bahwa penerapan kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak signifikan terhadap perubahan keseimbangan internal dan eksternal perekonomian suatu negara. Keseimbangan internal, yang sering disebut sebagai keseimbangan domestik, merujuk pada keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Sementara itu, keseimbangan eksternal, atau keseimbangan luar negeri, merujuk pada keseimbangan dalam neraca pembayaran.

Kebijakan fiskal itu penting karena ada pandangan yang menyatakan bahwa dengan menerapkan pajak pada masyarakat, pendapatan pemerintah akan bertambah. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah bisa lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu meratakan distribusi pendapatan. Pajak ini nantinya bisa digunakan untuk berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat terjadi karena dorongan pemerintah yang memacu peningkatan produksi nasional.



Peningkatan pajak yang dikenakan pada wajib pajak bisa menyebabkan pendapatan mereka berkurang, yang pada akhirnya bisa menurunkan konsumsi mereka atau mungkin tetap sama. Di sisi lain, pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan ekonomi secara luas, sehingga pendapatan nasional pun meningkat. Dalam kondisi ekonomi tertentu, kebijakan fiskal sering diterapkan bersamaan dengan kebijakan moneter untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, ada kalanya hanya salah satu dari kedua kebijakan tersebut yang diterapkan. Kebijakan moneter sangat penting karena terkait dengan pandangan bahwa jumlah uang beredar memiliki kaitan erat dengan sektor barang dan jasa, atau sektor riil. Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat mempengaruhi berbagai variabel ekonomi di sektor riil, seperti harga, investasi, dan produksi. Proses ini dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:



Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa pengendalian pajak dan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, kebijakan moneter tidak bisa dipisahkan dari kebijakan lain, karena jika dipisahkan, dampaknya seringkali tidak sesuai dengan harapan terhadap keseimbangan ekonomi. Jika terjadi efek yang tidak diinginkan dari kebijakan moneter, biasanya akan diatasi dengan kebijakan lain untuk menjaga keseimbangan ekonomi makro.

B. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Perdagangan internasional dan Penanaman Modal Asing (PMA) saling berkaitan erat. Bagi para investor, PMA merupakan cara untuk masuk ke pasar suatu negara tanpa harus menghadapi berbagai hambatan perdagangan atau untuk mendirikan fasilitas produksi yang barang-barangnya bisa diekspor ke luar negeri. Sementara itu, bagi negara yang menerima investasi, PMA memainkan peran penting dalam menyediakan modal yang sering kali kurang di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memberi kesempatan bagi industri lokal untuk mendapatkan teknologi yang lebih canggih. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menentukan seberapa terbuka suatu negara terhadap perdagangan internasional dan

investasi asing. Di Indonesia, kebijakan terkait terus berkembang, dipengaruhi oleh perubahan situasi politik dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.

Pada awal masa Orde Baru tahun 1967, Indonesia masih menjadi negara yang mengandalkan ekspor komoditas pertanian dan minyak bumi, mirip dengan kondisi sebelum kemerdekaan (K. W. Thee, 2006). Untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan masalah lonjakan inflasi yang sangat tinggi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang perdagangan dan investasi, dengan membuka kembali perekonomian Indonesia ke pasar global. Pada awal dekade 1970-an, terbentuknya kartel OPEC dan embargo minyak akibat konflik di Timur Tengah (Radetzki, 2006) memicu krisis minyak yang menyebabkan harga minyak melonjak drastis selama sekitar satu dekade. Indonesia, sebagai salah satu eksportir minyak terbesar dunia, diuntungkan oleh krisis ini karena harga minyak, komoditas ekspor utama negara Indonesia meningkat tajam. Akibatnya, ekspor Indonesia semakin didominasi oleh minyak, sementara ekspor komoditas lain menurun.

Ketergantungan Indonesia pada ekspor minyak membuat beberapa ekonom khawatir tentang dampak *Dutch disease*, yaitu ketika sektor-sektor lain yang diperdagangkan melambat, seperti manufaktur. Untuk itu, pemerintah saat itu meningkatkan anggaran untuk pembangunan, termasuk infrastruktur, sektor pertanian, dan memberi subsidi pada industri berat (Gelb, 1988). Selain itu, pemerintah juga mengubah kebijakan perdagangan dari yang awalnya terbuka menjadi lebih proteksionis untuk mendukung industrialisasi dengan menggantikan impor (Basri & Hill, 2004; Pangestu et al., 2015). Basri dan Hill (2004) berpendapat bahwa kebijakan perdagangan selama masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang dekat dengan Presiden Suharto.

Mereka mengidentifikasi empat kelompok utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut: Teknokrat, Nasionalis Ekonomi, pengejar rente, dan institusi asing. Pengaruh masing-masing kelompok ini dalam pengambilan kebijakan berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi global dan domestik. Karena pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatnya pendapatan negara dari ekspor minyak dan gas, kebutuhan

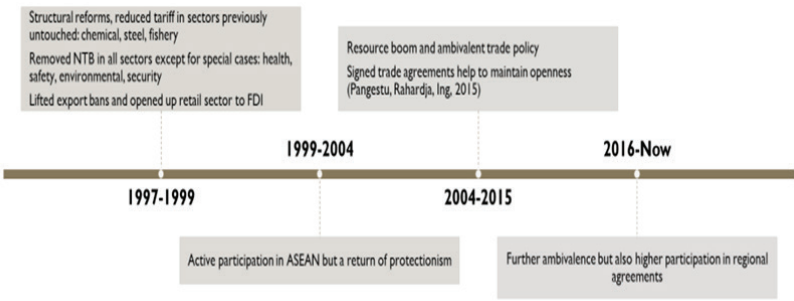
untuk melakukan reformasi perdagangan dan investasi menjadi kurang mendesak. Sebaliknya, pemerintah lebih fokus pada kebijakan substitusi impor dengan memberi subsidi pada industri, didanai oleh pendapatan dari sektor migas. Selain itu, kebijakan investasi juga cenderung tertutup selama masa “bonanza minyak”. Meskipun demikian, ada tanda-tanda masuknya investasi asing di sektor substitusi impor untuk menghindari tarif yang tinggi (Kinoshita, 1986; K.-W. Thee, 1984). Kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi industri berat, meskipun sebagian besar terkait dengan sektor migas.

Pada pertengahan 1980-an, era keuntungan besar dari minyak berakhir seiring dengan turunnya harga minyak. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat secara drastis pada periode 1983-1985. Perlambatan ini mendorong pemerintah untuk mencari sumber pertumbuhan baru dan mengganti strategi substitusi impor dengan promosi ekspor. Strategi promosi ekspor dilakukan dengan membuka perekonomian Indonesia lebih luas untuk perdagangan dan investasi asing, serta meningkatkan peran sektor swasta. Pendekatan ini cukup berhasil dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi.

Deregulasi memudahkan masuknya investasi asing ke sektor manufaktur non-migas, terutama dari negara-negara Asia yang baru terindustrialisasi (KW. Thee, 1991). Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat delapan kali lipat antara 1986 dan 1991. Bersamaan dengan itu, sektor manufaktur non-migas tumbuh lebih dari 10 persen per tahun dari 1986 hingga 1996, sementara ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh 7,1 persen per tahun. Porsi ekspor migas dalam total ekspor juga turun drastis, dari lebih dari 90 persen pada 1981 menjadi kurang dari 40 persen pada 1998. Pertumbuhan ekspor ini terutama didorong oleh ekspor barang-barang manufaktur seperti tekstil, mesin, dan perabotan.

Pertumbuhan yang didorong oleh fokus pada ekspor mendadak terhenti pada tahun 1998 ketika terjadi Krisis Finansial Asia, yang juga menandai berakhirnya masa Orde Baru. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh hingga -13,6 persen, dan nilai tukar Rupiah merosot drastis dari Rp 2.500 per US dolar pada Juli 1997 menjadi Rp 17.500

per US dolar pada Mei 1998. Masa reformasi ditandai dengan perubahan menuju sistem politik yang lebih demokratis dan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Sebagai syarat untuk menerima pinjaman dari IMF, Indonesia juga menerapkan reformasi ekonomi, termasuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan internasional dan investasi asing.



Gambar diatas menunjukkan garis waktu perubahan kebijakan perdagangan internasional sejak era Reformasi. Sebelumnya, pembuatan kebijakan perdagangan sangat bergantung pada kedekatan dan pengaruh kelompok tertentu terhadap presiden, tetapi setelah reformasi, hal ini berubah. Dengan adanya demokratisasi, kebijakan perdagangan juga mulai dipengaruhi oleh pandangan publik dan kepentingan politik, yang membuat proses pembuatannya menjadi lebih kompleks. Risiko munculnya proteksionisme, terutama melalui hambatan perdagangan untuk bahan pangan dan produk industri, meningkat seiring dengan tekanan politik untuk menerapkan kebijakan yang lebih populer (Basri & Patunru, 2012). Namun, pembuatan kebijakan dan respons dari aktor ekonomi domestik tetap dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di ekonomi global. Setelah Krisis 1998, Indonesia aktif berpartisipasi dalam komunitas regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN dan komitmen Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) membuat Indonesia tetap terbuka untuk perdagangan internasional (Pangestu et al., 2015). Hal ini menjadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan perdagangan selama era Reformasi.

C. KEBIJAKAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Kebijakan sosial dan kesejahteraan merupakan serangkaian tindakan, program, dan regulasi yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi warga, terutama kelompok rentan. Kebijakan ini bertujuan menyediakan perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Secara umum, kebijakan sosial mencakup berbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan sosial. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang adil terhadap layanan publik yang esensial. Dalam hal ini, kebijakan kesejahteraan berfokus pada penyediaan jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, pensiun, bantuan tunai, subsidi pangan, dan bantuan perumahan, yang dirancang untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko sosial dan ekonomi seperti penyakit, pengangguran, atau masa tua.

Beberapa bidang utama dalam kebijakan sosial dan kesejahteraan meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan sosial. Di bidang kesehatan, kebijakan ini memastikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam bidang pendidikan, kebijakan sosial berusaha menjamin akses terhadap pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua kelompok masyarakat, dengan menyediakan program beasiswa atau bantuan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Di sektor perumahan, kebijakan ini bertujuan menyediakan akses terhadap perumahan layak dan terjangkau, serta mengatasi masalah tunawisma dan permukiman kumuh. Selain itu, kebijakan keamanan sosial menyediakan berbagai bentuk jaminan sosial seperti pensiun, tunjangan pengangguran, dan bantuan bagi penyandang disabilitas, guna melindungi individu dari risiko keuangan dan sosial.

Terdapat beberapa jenis kebijakan sosial yang meliputi kebijakan redistributif, protektif, promotif, dan preventif. Kebijakan redistributif berusaha mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan sumber daya

dari kelompok kaya ke kelompok miskin, misalnya melalui pajak progresif dan program bantuan sosial. Kebijakan protektif bertujuan melindungi individu dari risiko ekonomi melalui program jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan tunjangan pengangguran. Kebijakan promotif dirancang untuk memberdayakan kelompok masyarakat rentan agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, misalnya dengan program pelatihan keterampilan dan akses pendidikan. Sedangkan kebijakan preventif berfokus pada pencegahan masalah sosial seperti kemiskinan melalui investasi di bidang pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Tujuan utama kebijakan sosial dan kesejahteraan adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan keadilan sosial. Dengan mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan tunai, layanan kesehatan, dan program pendidikan, kebijakan ini dapat membantu kelompok masyarakat rentan. Di sisi lain, kebijakan kesejahteraan bertujuan meningkatkan standar hidup dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Selain itu, kebijakan sosial bertujuan menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan publik dan kesempatan ekonomi.

Meskipun kebijakan sosial dan kesejahteraan memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti pendanaan yang terbatas, efektivitas program, ketergantungan masyarakat pada bantuan, dan ketidakmerataan akses. Pendanaan menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki anggaran terbatas, sedangkan efektivitas program bergantung pada manajemen yang baik dan minimnya korupsi. Tantangan lainnya adalah menciptakan ketergantungan pada bantuan sosial, yang dapat mengurangi insentif individu untuk bekerja atau meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik sering kali muncul, terutama di daerah terpencil atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Sebagai contoh, beberapa program kebijakan sosial dan kesejahteraan yang sukses antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia,

yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin, serta Universal Health Coverage (UHC) yang bertujuan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Di Amerika Serikat, Social Security memberikan tunjangan pensiun, disabilitas, dan kematian kepada pekerja dan keluarga mereka berdasarkan kontribusi yang mereka berikan selama masa kerja. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dan kesejahteraan dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan keadilan sosial. Namun, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.





BAB V

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA MENENGAH

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan bangsa, serta turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam pengertian yang luas adalah suatu proses yang sistematis untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan demi mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Hal ini melibatkan melihat ke depan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan, sambil terus memantau agar pelaksanaan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan suatu mekanisme terpadu dalam merencanakan pembangunan. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengedepankan demokrasi, serta prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kemandirian, sambil menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun dengan cara yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas ketertiban dalam penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Mendorong koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Memastikan adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan, serta antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Menjamin keterhubungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Memaksimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan.

Tahapan Perencanaan dan Kelembagaan dalam SPPN. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :

Proses Penyusunan Rencana

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - › Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - › Musyawarah perencanaan pembangunan;
 - › Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
2. Penyusunan RPJM Nasional/Daerah serta RKP/RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - › Persiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - › Persiapan rancangan rencana kerja;
 - › Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - › Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penetapan Rencana

1. Penetapan Pembangunan Jangka Panjang
 - › RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang.
 - › RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penetapan Pembangunan Jangka Menengah
 - › RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
 - › Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.
 - › RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
 - › Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.
3. Penetapan Pembangunan Tahunan
 - › RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - › RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

- › Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh setiap pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- › Menteri atau Kepala Bappeda mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- › Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga pada periode sebelumnya.
- › Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada periode sebelumnya.
- › Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari pimpinan Kementerian/Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- › Hasil evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah pada periode berikutnya.

Kelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

meliputi :

- Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.
- Pimpinan Kementerian/ Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan pendirian pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 adalah kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam dua dekade ke depan, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan lembaga-lembaganya, agar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan memiliki posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di kancah masyarakat internasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang mencakup periode 20 tahun, mulai dari tahun 2005 hingga 2025. Dokumen ini ditetapkan untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi semua komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan akan bersifat sinergis, kooperatif, dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan tindakan.

Menjelang krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia berada dalam optimisme tinggi berkat keberhasilan pembangunan jangka panjang pertama. Namun, krisis tersebut menghentikan upaya pencapaian sasaran pembangunan, menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih rapuh dan rentan terhadap gejolak eksternal. Pertumbuhan yang dicapai



selama ini lebih dipicu oleh akumulasi modal dan pengurusan sumber daya alam daripada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Krisis 1997 meruntuhkan perekonomian nasional, menyebabkan nilai tukar jatuh drastis dan utang pemerintah serta swasta meningkat, sehingga permintaan domestik menurun dan PDB mengalami kontraksi sekitar 13 persen. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin meningkat tajam, dengan kemiskinan mencapai sekitar 53 juta orang pada tahun 1998. Namun, sejak tahun 2000, berbagai program penanganan krisis mulai menunjukkan hasil, terlihat dari perbaikan indikator ekonomi seperti penurunan defisit anggaran, penurunan stok utang pemerintah, dan peningkatan cadangan devisa.

Meskipun ada perbaikan, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum krisis, dengan konsumsi masih menjadi motor utama pertumbuhan. Sektor produksi menghadapi berbagai tantangan, termasuk lingkungan usaha yang tidak kondusif, praktik KKN, dan rendahnya daya saing nasional akibat rendahnya produktivitas dan teknologi. Masalah kemiskinan tetap tinggi, terutama di sektor pertanian dan kelautan, dan bersifat multidimensi, mencakup kerentanan dan kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, serta perbedaan perlakuan terhadap kelompok masyarakat. Keberagaman kondisi sosial budaya dan pengalaman kemiskinan di Indonesia menjadikan tantangan ini semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dalam pembangunan 20 tahun mendatang.

C. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020–2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) untuk periode 2020-2024 merupakan dokumen yang merinci perencanaan pembangunan nasional selama lima tahun, dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. RPJM Nasional mencakup strategi pembangunan, kebijakan umum, proyek-proyek prioritas strategis, serta program-program dari kementerian dan lembaga, baik secara individual maupun lintas sektoral. Dokumen ini juga menggambarkan arah pembangunan wilayah dan antar wilayah, menetapkan prioritas pembangunan, serta menyajikan kerangka ekonomi makro

yang mencakup gambaran menyeluruh tentang perekonomian, termasuk kebijakan fiskal. Selain itu, terdapat juga rencana kerja yang berisi kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Nasional memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- Sebagai panduan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun Rencana Strategis
- Sebagai referensi untuk penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional
- Sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah; Sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, karena berdampak pada pencapaian target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN. Pada periode tersebut, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan akan masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas, dengan peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, tujuan pembangunan jangka menengah untuk 2020-2024 adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Fokus utamanya adalah membangun struktur perekonomian yang kuat, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 juga telah mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya telah menjadi bagian integral dari tujuh agenda pembangunan Indonesia ke depan.



D. PERENCANAAN SEKTOR DAN PROYEK

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers HM.4.6/607/SET.M.EKON.3/10/2022 mengenai upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah terus mengupayakan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional baik untuk saat ini maupun masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi berbasis wilayah, terutama transformasi infrastruktur, adalah dengan memprioritaskan program atau proyek infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, pemerintah saat ini berfokus menyelesaikan 200 proyek PSN dan 12 program strategis nasional dengan total investasi mencapai Rp5.481,4 triliun, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. PSN ini mencakup berbagai proyek bernilai investasi tinggi dan memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, dan telekomunikasi. PSN tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 14 sektor dan 12 program, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga mengedepankan pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, teknologi, hingga pendidikan.

Pemerintah menilai pentingnya mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menindaklanjuti kebijakan ini, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 pada 8 Januari 2016, yang bertujuan mempercepat pelaksanaan PSN. Dalam peraturan ini, Proyek Strategis Nasional diartikan sebagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 3 dalam Perpres tersebut, menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota berwenang memberikan berbagai perizinan

dan non-perizinan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PSN. Sebagai penanggung jawab PSN, menteri atau kepala lembaga terkait bertugas mengurus segala izin yang diperlukan agar PSN dapat dimulai segera setelah Perpres ini diberlakukan. Untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), diperlukan perizinan dan non-perizinan tertentu, antara lain: a. Penetapan Lokasi; b. Izin Lingkungan; c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau d. Izin Mendirikan Bangunan. Ketentuan ini juga berlaku bagi gubernur atau bupati/walikota yang bertindak sebagai penanggung jawab PSN di daerah, yang wajib memberikan perizinan dan non-perizinan sesuai dengan kewenangannya sejak Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku.

Bagi Badan Usaha yang berperan sebagai penanggung jawab PSN, sesuai Pasal 6 ayat (1) Perpres, mereka mengajukan izin prinsip pelaksanaan PSN kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pusat. PTSP akan menerbitkan izin prinsip tersebut dalam waktu maksimal satu hari kerja, setelah permohonan yang lengkap dan benar diterima (vide Pasal 6 ayat (2) Perpres). Setelah izin prinsip diperoleh, Badan Usaha selanjutnya mengajukan penyelesaian perizinan dan non-perizinan yang diperlukan kepada PTSP Pusat, meliputi:

- Izin Lokasi
- Izin Lingkungan
- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Izin Mendirikan Bangunan
- Fasilitas fiskal dan nonfiskal.

Namun, terdapat pengecualian dalam waktu penyelesaian untuk beberapa izin:

- Izin Lingkungan diselesaikan paling lambat dalam 60 hari kerja
- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam 30 hari kerja
- Non-perizinan terkait fasilitas perpajakan, seperti Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, dalam 28 hari kerja
- sesuai dengan waktu yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam praktiknya, terdapat tiga tantangan utama dalam pelaksanaan PSN, yaitu:



- › Kendala dalam memperoleh lahan
- › Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
- › Kebutuhan pendanaan yang melebihi empat ribu triliun rupiah.

E. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

Implementasi dan evaluasi program pembangunan adalah dua aspek penting dalam siklus kebijakan publik yang memastikan keberhasilan serta keberlanjutan proyek-proyek pembangunan. Implementasi program pembangunan mengacu pada tahap di mana rencana dan kebijakan pembangunan diubah menjadi tindakan nyata. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas seperti alokasi sumber daya, penugasan tanggung jawab, serta koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu komponen kunci dalam implementasi yang efektif adalah perencanaan yang matang, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan. Partisipasi ini bukan hanya untuk mendukung penerimaan publik terhadap program, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kondisi lokal di setiap daerah dapat diakomodasi dengan lebih baik.

Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga pelaksana di tingkat lokal. Mekanisme pemantauan yang kuat juga diperlukan agar setiap tahap implementasi berjalan sesuai rencana, dengan tujuan untuk mendeteksi potensi masalah secara dini dan menyesuaikan langkah-langkah pelaksanaan jika diperlukan. Namun, implementasi program pembangunan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti birokrasi yang lambat, korupsi, ketidaksesuaian alokasi sumber daya, serta ketidakmampuan manajemen dalam merespons perubahan situasi di lapangan. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pelaksanaan dan adanya mekanisme pengawasan yang transparan sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Setelah program pembangunan diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi program pembangunan dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai metode analisis, seperti analisis kuantitatif dan kualitatif, serta survei lapangan untuk mengukur dampak program terhadap masyarakat. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan, apakah sumber daya digunakan secara efisien, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi juga berperan penting dalam mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Proses evaluasi dibagi menjadi beberapa tahapan, seperti evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Evaluasi proses menilai bagaimana program dilaksanakan, termasuk apakah semua prosedur diikuti dengan benar dan apakah ada kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan. Evaluasi hasil fokus pada pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti jumlah infrastruktur yang dibangun atau jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau. Sementara itu, evaluasi dampak menilai sejauh mana program pembangunan memberikan perubahan nyata terhadap masyarakat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi, pengurangan kemiskinan, maupun perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan. Misalnya, program pembangunan infrastruktur seperti jalan atau jembatan dapat dievaluasi dampaknya dengan melihat seberapa besar peningkatan mobilitas dan akses ekonomi yang dialami masyarakat setempat.

Evaluasi juga memberikan umpan balik yang sangat berharga bagi perumusan kebijakan pembangunan di masa depan. Dengan analisis yang komprehensif, pemerintah dapat belajar dari kesalahan yang terjadi, memperbaiki kelemahan, dan menyempurnakan pendekatan mereka dalam mengelola program pembangunan berikutnya. Selain itu, evaluasi memberikan legitimasi kepada program pembangunan karena memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar dan memberikan manfaat yang nyata.

Akuntabilitas ini juga penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga pelaksana pembangunan.

Secara keseluruhan, implementasi dan evaluasi program pembangunan adalah dua tahap yang tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Implementasi yang baik memungkinkan program berjalan lancar, sementara evaluasi yang efektif memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan dan inovasi di masa mendatang. Kedua aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.



BAB VI

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

A. FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah jangka panjang yang menjadi perhatian banyak negara. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output perkapita dalam jangka panjang, yang berarti seiring waktu kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena output perkapita yang lebih tinggi, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan konsumsi barang dan jasa dengan daya beli yang juga bertambah. Pertumbuhan ekonomi juga terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi berfokus pada satu aspek, yaitu peningkatan produksi dan pendapatan. Hal ini terlihat dari kenaikan pendapatan nasional, yang diukur dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, sebagai negara berkembang pemerintah berfokus pada pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan terencana serta tetap memperhatikan pemerataan dan stabilitas. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah proses berkembangnya aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, serta berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Arifin & Gina (2009:11), indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan mengapa PDB dipilih sebagai indikator, adalah sebagai berikut:

- PDB dihitung berdasarkan nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari semua kegiatan produksi dalam perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan PDB mencerminkan peningkatan imbalan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses tersebut.
- PDB dihitung menggunakan konsep aliran siklus (circular flow concept), di mana perhitungan hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan dalam periode tertentu tanpa memasukkan periode sebelumnya. Penggunaan konsep ini memungkinkan perbandingan output antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
- PDB dihitung berdasarkan batas wilayah suatu negara (perekonomian domestik), sehingga memudahkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi pemerintah dan aktivitas ekonomi dalam negeri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rudiger (2006:112), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga bisa digunakan untuk menganalisis perekonomian dari waktu ke waktu atau membandingkan beberapa negara pada periode yang sama. Dengan kata lain, PDB mencakup pendapatan dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. PDB mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB suatu negara, semakin baik pula kinerja ekonominya. Karena pentingnya peran PDB dalam suatu

perekonomian, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDB (Arsyad, 2004:45).

1. Ekspor

Ekspor dan impor dilakukan karena tidak ada negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Negara-negara saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sumber daya alam, iklim, letak geografis, struktur ekonomi, dan sosial. Perbedaan ini mengakibatkan variasi dalam komoditas yang dihasilkan, biaya produksi, serta kualitas dan kuantitas produk. Karena adanya ketergantungan kebutuhan antarnegara, terjadilah perdagangan internasional. Setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sukirno (2006:173) menyebutkan beberapa ciri khas dari kegiatan ekspor, yaitu:

- a. Penjual (eksportir) dan pembeli (importir) dipisahkan oleh batas-batas negara yang berbeda.
- b. Mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan biasanya berbeda antara negara penjual dan pembeli, dan sering kali menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika, poundsterling Inggris, atau yen Jepang.
- c. Hubungan antara pembeli dan penjual mungkin belum terjalin lama dan akrab. Kedua belah pihak seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kualifikasi mitra dagang mereka, termasuk kemampuan membayar atau memasok komoditas sesuai kesepakatan.
- d. Sering kali terdapat perbedaan kebijakan pemerintah negara penjual dan pembeli dalam hal perdagangan internasional, moneter, pengaturan devisa, pelabelan, embargo, atau perpajakan.
- e. Kadang-kadang terdapat perbedaan dalam penguasaan teknik, terminologi perdagangan internasional, dan bahasa asing yang digunakan dalam transaksi, seperti bahasa Inggris.

Seiring perputaran ekonomi adalah menjadi penting bagi kelompok perusahaan manapun untuk mampu memperoleh penjualan ekspor atau untuk bersaing secara efektif dengan impor yang tidak lagi harus melompati



penganut proteksionisme. Ini secara luas dapat diterima bagi UKM bahwa untuk berhasil dalam ekspor mereka harus mempunyai beberapa cara menekan biaya-biaya transaksi yang mana cenderung untuk mempunyai suatu komponen biaya tetap, memperbaiki daya saing ekspor, melakukan pemasaran yang baik dan lain sebagainya.

Corak perdagangan Indonesia terus berkembang seiring waktu dan dapat dibagi menjadi dua sektor utama: migas dan nonmigas. Ekspor sektor migas mencakup minyak bumi dan hasil minyak, LNG (Gas Alam Cair), LPG (Gas Minyak Cair), dan lainnya. Sementara itu, ekspor komoditas non-migas terutama terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu barang manufaktur, komoditas pertanian, dan komoditas pertambangan.

Barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang manufaktur meliputi tekstil, kayu, produk kayu, kertas, produk elektronik, minyak kelapa sawit, kerajinan tangan, dan produk kimia. Komoditas pertanian mencakup hewan dan produk hewani seperti ikan tuna, sapi, dan udang, serta tanaman seperti karet alam, coklat, lada, kopi, tembakau, cengkeh, rempah-rempah, dan kopra. Sedangkan komoditas pertambangan non-migas meliputi tembaga, emas, timah, nikel, aluminium, dan hasil tambang lainnya (Untoro, 2010:71).

2. Pajak

Menurut Waluyo (2009:2), pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan ditetapkan berdasarkan peraturan umum (undang-undang). Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung yang dapat ditentukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sukardji, 2005:4) Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berperan untuk membiayai pengeluaran negara. Negara memerlukan biaya untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan, dan biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk membiayai pembangunan, dana diambil dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah harus ditingkatkan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, terutama melalui sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, untuk mendorong investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi pada produk impor.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan yang membuka kesempatan kerja. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Nilai Tukar

Nilai tukar menjadi sangat penting ketika suatu negara melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh penggunaan mata

uang yang berbeda, seperti antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika harus membeli rupiah untuk mendapatkan barang atau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Secara sederhana, nilai tukar (kurs) dapat diartikan sebagai harga mata uang domestik terhadap mata uang negara lain. Harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar (exchange rate).

Kurs adalah salah satu aspek terpenting dalam perekonomian terbuka, karena memiliki dampak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan serta variabel makroekonomi lainnya. Kurs mencerminkan harga suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang negara lain dan juga dapat dianggap sebagai harga dari suatu aset (Krugman, 2005:40). Pergeseran permintaan dan penawaran pada nilai tukar disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat persisten. Faktor tersebut antara lain (Winardi, 2006:115):

- **Kenaikan Harga Domestik Produk Ekspor**
Kenaikan harga produk domestik dapat mempengaruhi nilai tukar, tergantung pada elastisitas permintaan. Jika permintaan bersifat elastis, kenaikan harga akan menurunkan permintaan, sehingga permintaan terhadap mata uang domestik (rupiah) juga menurun, menyebabkan nilai tukar rupiah terdepresiasi. Sebaliknya, jika permintaan inelastis karena keunikan produk domestik, permintaan terhadap rupiah meningkat, yang akan menyebabkan kurs rupiah mengalami apresiasi.
- **Kenaikan Harga Luar Negeri Produk Impor**
Kenaikan harga produk luar negeri juga dipengaruhi oleh elastisitas permintaan terhadap barang impor. Jika permintaan bersifat elastis karena adanya substitusi dengan produk lain atau produk domestik, permintaan mata uang domestik akan meningkat, sehingga nilai tukar mengalami apresiasi. Namun, jika permintaan inelastis, permintaan terhadap mata uang domestik akan menurun, yang menyebabkan depresiasi mata uang tersebut.
- **Perubahan Tingkat Harga Keseluruhan**
Perubahan harga tidak hanya terjadi pada produk ekspor atau impor, tetapi juga mencakup semua harga barang di suatu negara, yang dapat

menyebabkan inflasi. Ketika tingkat harga di suatu negara berubah, inflasi akan membuat harga barang di negara tersebut lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di negara lain. Akibatnya, harga barang domestik akan meningkat, sedangkan harga barang asing yang masuk ke pasar domestik akan lebih murah, menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap mata uang domestik menurun dan permintaan terhadap mata uang asing meningkat, sehingga nilai tukar mata uang domestik akan melemah atau terdepresiasi.

- **Arus Modal**

Peningkatan arus modal dapat mempengaruhi nilai tukar, dimana investasi yang masuk ke suatu negara dapat menyebabkan apresiasi nilai mata uang negara tersebut, sedangkan negara pengekspor modal mengalami depresiasi. Hal ini berlaku untuk arus modal jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada motif investor. Untuk arus modal jangka pendek, motivasi sering dipengaruhi oleh suku bunga dan spekulasi nilai tukar, sedangkan untuk arus modal jangka panjang, faktor yang lebih berpengaruh adalah harapan keuntungan dan proyeksi nilai mata uang di masa depan.

- **Perubahan-perubahan struktural**

Perubahan struktural sendiri merupakan perubahan pada struktur biaya, penemuan produk baru, atau hal lain yang dapat mempengaruhi keunggulan komparatif dari suatu negara.

B. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara, karena mencerminkan kemajuan dan kesejahteraan perekonomian melalui perubahan output nasional. Perubahan output ini menjadi fokus dalam analisis ekonomi jangka pendek. Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian, yaitu menjaga keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, serta menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Untuk menjalankan

fungsi ini, pemerintah memerlukan anggaran yang dikelola melalui kebijakan fiskal.

Menurut Todaro menyebutkan bahwa ada tiga faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk yang menambah angkatan kerja, dan kemajuan teknologi. Sementara itu, Kuznets menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi bagi masyarakatnya, yang dipengaruhi oleh penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: teori klasik dan teori modern. Teori klasik, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, percaya pada mekanisme pasar bebas, sementara teori modern, seperti Harrod-Domar, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar bebas.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori ini juga dikenal sebagai teori pertumbuhan baru, memiliki kemiripan dengan teori pertumbuhan neoklasik, tetapi berbeda dalam asumsi dan kesimpulannya. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa beberapa negara mengalami pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda dan adanya skala hasil yang meningkat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1989). Menurut Salvatore (1997), teori pertumbuhan endogen memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa mengurangi hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam jangka panjang.

Romer (2001) dan Lucas (1988) memperkenalkan teori pertumbuhan endogen sebagai langkah baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mereka menekankan pentingnya perkembangan teknologi modern dalam proses produksi. Teori ini juga mengkritik teori Neoklasik yang dianggap tidak mampu menjelaskan beberapa hal penting, seperti penurunan hasil dari modal (*decreasing*

return to capital), persaingan sempurna, dan peran teknologi yang dianggap eksternal dalam teori neoklasik. Teori pertumbuhan endogen, sebaliknya, menyatakan bahwa pertumbuhan jangka panjang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang sebelumnya dianggap eksternal.

Menurut Romer (1994), ada tiga elemen dasar dalam teori ini: (1) perubahan teknologi terjadi secara internal melalui akumulasi pengetahuan; (2) penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan terjadi karena adanya transfer pengetahuan (knowledge spillover); dan (3) produksi barang-barang konsumsi akan terus tumbuh tanpa batas dengan menggunakan pengetahuan sebagai faktor produksi utama.

Model pertumbuhan endogen digambarkan dengan fungsi produksi: $Y = F(R, K, H)$, di mana Y adalah total output, R adalah penelitian dan pengembangan (R&D), K adalah modal fisik, dan H adalah akumulasi modal manusia. Perubahan dalam fungsi produksi ini dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara lebih signifikan. Dalam model Solow, tabungan hanya mendorong pertumbuhan sementara karena adanya pengembalian yang semakin menurun (diminishing marginal return) dari investasi modal. Pada akhirnya, perekonomian akan mencapai keadaan stabil (steady state), dimana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi yang datang dari luar (eksogen). Namun, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Eksogen

Pertumbuhan ekonomi dalam teori ini bergantung pada fungsi produksi. Karena kemajuan teknologi dianggap datang dari luar atau ditentukan secara eksternal, model ini dikenal sebagai model pertumbuhan eksogen, seperti yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Teori pertumbuhan NeoKlasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari peningkatan dan pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori ini juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi.

C. MASALAH KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN UPAYA REDUKSINYA

Masalah ketimpangan pendapatan adalah salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, baik maju maupun berkembang. Ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau kelompok dalam suatu negara, yang menghasilkan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Ketimpangan ini dapat dilihat melalui perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya mobilitas sosial, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, ketimpangan yang tinggi dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan sumber daya manusia yang potensial tidak dimanfaatkan secara optimal, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

Salah satu penyebab utama ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan keterampilan yang lebih baik cenderung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, sementara mereka yang kurang berpendidikan sering terjebak dalam pekerjaan berupah rendah dengan sedikit peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, ketimpangan juga sering kali dipicu oleh konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang kaya, terutama melalui warisan, investasi, atau monopoli sektor ekonomi tertentu. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh faktor-faktor seperti globalisasi, yang memberikan keuntungan besar kepada kelompok dengan keterampilan tinggi dan modal, serta kebijakan ekonomi yang tidak mendukung redistribusi pendapatan.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan, upaya reduksi yang komprehensif perlu dilakukan melalui berbagai kebijakan ekonomi dan sosial. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui kebijakan redistributif, seperti penerapan sistem pajak progresif yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan redistribusi pendapatan melalui

program-program bantuan sosial, seperti bantuan tunai bagi masyarakat miskin, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan gratis. Pajak progresif memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari kelompok kaya dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan. Selain itu, program jaminan sosial seperti pensiun, tunjangan pengangguran, dan asuransi kesehatan juga penting untuk melindungi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dari guncangan ekonomi yang dapat memperburuk ketimpangan.

Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga merupakan strategi kunci dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan di pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpendapatan lebih tinggi. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah tersedia secara gratis dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, serta memberikan akses yang lebih luas kepada pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi. Program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) juga penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan permintaan pasar yang terus berkembang.

Selain itu, pembangunan ekonomi yang inklusif juga penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur yang merata, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Pemerintah juga perlu mendorong kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM) yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, serta mengembangkan sektor informal dengan memberikan akses terhadap permodalan dan pelatihan.

Di samping langkah-langkah tersebut, reformasi kebijakan ketenagakerjaan juga penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan upah minimum yang memadai dapat membantu meningkatkan standar hidup pekerja berupa rendah dan mencegah eksploitasi tenaga kerja. Perlindungan hak-hak pekerja, termasuk jaminan atas kondisi kerja yang layak dan akses terhadap perlindungan sosial, juga perlu diperkuat untuk melindungi mereka dari ketidakpastian ekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan-kebijakan ini dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih adil dan merata.

Namun, upaya reduksi ketimpangan pendapatan tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial dan politik yang kuat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan politik dan memperburuk ketegangan sosial, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan redistributif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kesadaran publik tentang dampak negatif dari ketimpangan dan pentingnya kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Dengan pendekatan yang terkoordinasi antara kebijakan fiskal, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, masalah ketimpangan pendapatan dapat direduksi, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.



BAB VII

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Ini berarti bahwa pembangunan saat ini harus dilakukan tanpa merugikan kesejahteraan sosial generasi yang akan datang. Kesejahteraan sosial merujuk pada kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan. Pilar-pilar pembangunan berkelanjutan termasuk ekonomi berkelanjutan, sosial berkelanjutan, dan lingkungan berkelanjutan, harus berkembang secara seimbang. Jika tidak, pembangunan akan terjebak pada model konvensional yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan perkembangan sosial dan lingkungan. Sutarni (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi (intergenerational equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta

- diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
2. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
 3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
 4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (intertemporal).
 5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang maupun lestari antargenerasi.
 6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari segi ekonomi, Fauzi (2004) menyebutkan tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertimbangan pertama adalah alasan moral. Generasi saat ini menikmati barang dan jasa yang berasal dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga penting secara moral untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam tersebut bagi generasi mendatang. Kewajiban moral itu termasuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga tidak merampas kesempatan generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, terkait dengan alasan ekologi, misalnya Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, sehingga aktivitas ekonomi sebaiknya tidak difokuskan hanya pada eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang pada akhirnya dapat membahayakan fungsi ekologi. Alasan ketiga mengapa perlu memperhatikan aspek keberlanjutan adalah faktor ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi masih menjadi topik perdebatan karena belum jelas apakah aktivitas ekonomi saat ini telah memenuhi standar keberlanjutan. Dimensi ekonomi berkelanjutan sangat kompleks dan

seringkali aspek keberlanjutan ekonomi hanya terbatas pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi.

Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan kebutuhan sosial dan budaya yang wajar, serta menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda sesuai dengan batas kemampuan lingkungan. Hal ini harus dapat diakses oleh semua orang. Namun, seringkali pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pertumbuhan ekonomi atau produksi yang maksimal. Pembangunan berkelanjutan memang memerlukan pertumbuhan ekonomi di tempat-tempat di mana kebutuhan utama belum dapat terpenuhi dengan baik. Yang penting adalah pertumbuhan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun, kenyataannya, produksi yang tinggi bisa terjadi bersamaan dengan banyaknya kemiskinan, yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan potensi produksi mereka, sambil menjamin kesempatan yang sama untuk semua orang.

1. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan diakui sebagai sesuatu yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan memiliki banyak dimensi dan interpretasi. Menurut Heal (dalam Fauzi, 2004), konsep ini mencakup setidaknya dua dimensi. Pertama, dimensi waktu, yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Kedua, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dengan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey (1992) melihat keberlanjutan dari perspektif yang berbeda, membedakan antara aspek statik dan dinamik. Keberlanjutan secara statik berarti pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan tingkat teknologi yang tetap. Sementara itu, keberlanjutan secara dinamik berarti pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah.

2. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan berbagai konsep yang ada, dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Ada empat komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

- **Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial**
Pembangunan yang fokus pada pemerataan dan keadilan sosial perlu didasarkan pada beberapa aspek, seperti distribusi sumber lahan dan faktor produksi yang merata, peran dan kesempatan perempuan yang setara, serta keseimbangan dalam distribusi kesejahteraan ekonomi. Namun, pemerataan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara langsung. Ini adalah konsep yang relatif dan tidak dapat diukur secara langsung.
- **Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman**
Memelihara keanekaragaman hayati adalah syarat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersedia secara berkelanjutan, baik untuk sekarang maupun di masa depan. Keanekaragaman hayati juga merupakan fondasi bagi keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang adil terhadap semua orang dan meningkatkan pemahaman tentang tradisi berbagai masyarakat.
- **Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif**
Pembangunan berkelanjutan menekankan hubungan antara manusia dan alam. Manusia dapat mempengaruhi alam baik secara positif maupun negatif. Pemahaman mengenai kompleksitas hubungan antara sistem alam dan sistem sosial sangat penting. Dengan memahami hal ini, pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif menjadi mungkin. Ini merupakan tantangan utama dalam pengelolaan kelembagaan.
- **Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang**
Masyarakat cenderung lebih fokus pada kondisi saat ini dibandingkan masa depan, yang menjadi tantangan bagi implementasi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan penilaian yang berbeda dari asumsi umum dalam prosedur diskonto. Pandangan

jangka panjang merupakan perspektif utama dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak pengambil keputusan ekonomi yang masih didominasi oleh kerangka jangka pendek, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian lebih.

3. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Secara ideal, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan untuk mencapai kesinambungan di berbagai aspek kehidupan, termasuk keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta aspek pertahanan dan keamanan.

- **Keberlanjutan Ekologis**
Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi.
- **Keberlanjutan Ekonomi**
Keberlanjutan ekonomi dalam konteks pembangunan memiliki dua aspek utama yang saling terkait dengan tujuan keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro memastikan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen penting untuk mencapai keberlanjutan ekonomi makro adalah efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan pemerataan serta distribusi kemakmuran. Untuk mencapainya, diperlukan kebijakan makroekonomi yang mencakup reformasi fiskal, peningkatan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, penggunaan pasar yang tepat, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan distribusi pendapatan dan aset.
- **Keberlanjutan Ekonomi Sektoral**
Penyesuaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro dalam jangka pendek dapat menyebabkan distorsi di berbagai sektor, sehingga mengabaikan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, hal ini perlu diatasi melalui kebijakan sektoral yang

spesifik dan terarah. Penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas dan ekonomi di setiap sektor. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi di tingkat sektoral, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Pertama, sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur harus diperlakukan sebagai modal berwujud dalam kerangka akuntansi ekonomi. Kedua, secara prinsip, harga sumber daya alam harus mencerminkan biaya ekstraksi, ditambah dengan biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan sumber daya tersebut.

- Keberlanjutan Sosial Budaya

Keberlanjutan sosial dan budaya mencakup keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup. Ada empat sasaran utama untuk mencapai keberlanjutan ini:

- › Stabilitas Penduduk: Memerlukan komitmen politik yang kuat, partisipasi masyarakat, peningkatan peran wanita, dan lingkungan keluarga yang berkualitas.
- › Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi kemakmuran, dengan memastikan semua kelas sosial memiliki akses pendidikan dan perbaikan lahan.
- › Pelestarian Keanekaragaman Budaya: Mengakui dan menghargai sistem sosial dan budaya, serta memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk pembangunan.
- › Partisipasi Masyarakat: Mendorong masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memastikan program sosial memberikan manfaat bersama. Keberlanjutan sosial memerlukan investasi dalam sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta perhatian terhadap kesenjangan antara daerah.

- Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik berfokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, dan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Proses demokrasi yang diterapkan harus

transparan dan akuntabel, serta menjamin ketersediaan pangan, air, dan tempat tinggal.

- Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan
Keberlanjutan keamanan berkaitan dengan menghadapi dan menangani tantangan, ancaman, serta gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan negara serta bangsa.

B. ISU LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan perubahan pola cuaca jangka panjang yang terjadi secara global. Dampak dari perubahan iklim ini meluas ke berbagai sektor, memengaruhi kualitas hidup manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah adanya perubahan dalam keseimbangan antara energi yang masuk dan keluar di permukaan bumi. Berikut ini akan disajikan hasil kajian literatur mengenai penanganan perubahan iklim secara teoritis. (Leontinus, 2022). Perubahan iklim akibat pemanasan global, yang disebabkan oleh peningkatan gas-gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO₂) dan metana (CH₄), menyebabkan dua dampak utama pada lapisan atmosfer: fluktuasi curah hujan yang ekstrim dan kenaikan permukaan laut. Data suhu global sejak abad ke-19 menunjukkan adanya kenaikan rata-rata suhu sebagai indikator perubahan iklim. Suhu rata-rata global telah naik sekitar 0,74°C dari tahun 1906 hingga 2005 dan diproyeksikan akan terus meningkat sebesar 1,8-4,0°C selama abad ini, bahkan menurut kajian lain oleh IPCC bisa mencapai 1,1-6,4°C.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) kini telah memasuki tahun keenam sejak disepakati pada September 2015 dalam Sidang Umum PBB, dihadiri oleh 159 kepala negara. SDGs menjadi Agenda Global 2030 dengan 17 tujuan dan 169 target untuk periode 2015-2030. Indonesia aktif dalam forum internasional dalam perumusan SDGs, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024. Sebanyak 124 target SDGs telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024, menunjukkan komitmen



Indonesia untuk mendukung Agenda Pembangunan Nasional serta pencapaian Agenda 2030 di tingkat global.

1. Implementasi SDGs dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Paradigma pembangunan dalam SDGs seharusnya sudah mempertimbangkan variabel perubahan iklim. Hal ini karena SDGs mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait. Meskipun perubahan iklim merupakan fenomena fisik, dampaknya juga sangat berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Perubahan iklim yang tiba-tiba dapat merusak pencapaian pembangunan dan menghambat tujuan SDGs. Dari 17 tujuan SDGs, ada 12 yang terkait dengan perubahan iklim, termasuk energi, kehutanan, ketahanan pangan, dan pendidikan. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa kelompok termiskin paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tanpa tindakan cepat dan inklusif, lebih dari 100 juta orang diperkirakan akan jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun 2030. Laporan UNDP juga menyebutkan bahwa kurangnya tindakan terhadap perubahan iklim akan mengurangi pendapatan dan peluang bagi populasi rentan. Dampak perubahan iklim yang luas terhadap berbagai sektor menjadikannya masalah mendesak yang perlu segera ditangani. Kesepakatan Paris menjadi tonggak penting dalam upaya melawan perubahan iklim, meningkatkan aksi dan investasi menuju masa depan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

2. Memperkuat Ketahanan Sosial dalam Merespons Perubahan Iklim

Ketahanan sosial mengacu pada bagaimana individu, komunitas, dan masyarakat beradaptasi, berubah, dan menjadi lebih kuat saat menghadapi tantangan lingkungan, sosial, ekonomi, atau politik. Konsep ini pertama kali muncul di literatur ekologi pada 1970-an untuk memahami bagaimana sistem ekologi yang kompleks beradaptasi di bawah tekanan. Dalam konteks perubahan iklim global, meningkatkan ketahanan sosial sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan

iklim terhadap sumber daya alam, ekonomi, permukiman, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar respons perubahan iklim saat ini masih berfokus pada solusi teknis, sementara aspek sosial sering diabaikan, meskipun perubahan iklim adalah masalah sosial yang besar. Untuk mengatasi hal ini, Dale (2011) mengembangkan kerangka kerja untuk menilai ketahanan sosial, yang meliputi kelayakan ekonomi, pengetahuan, kapasitas masyarakat, vitalitas komunitas, dan tata kelola.

3. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi dan adaptasi adalah dua pendekatan utama dalam menghadapi perubahan iklim. Mitigasi berfokus pada mengurangi penyebab perubahan iklim, seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Langkah-langkah mitigasi mencakup penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon melalui reboisasi atau penyimpanan karbon.

Sementara itu, adaptasi bertujuan untuk mempersiapkan dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat dan ekosistem. Adaptasi bisa berupa tindakan yang dilakukan sebelum atau setelah terjadinya perubahan iklim, seperti perencanaan iklim, pengelolaan sumber daya alam, atau kebijakan yang mendukung penelitian dan inovasi. Tindakan adaptasi ini juga mencakup investasi dalam infrastruktur dan kebijakan baru yang mendukung pengelolaan sumber daya, serta penyesuaian mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak. Beberapa langkah penting dalam adaptasi adalah:

- › Pemantauan iklim dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran.
- › Kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan kapasitas untuk melindungi usaha.
- › Investasi dalam teknologi baru untuk menghadapi tantangan iklim.
- › Pelatihan dan dukungan bagi masyarakat yang terkena dampak, seperti dalam hal perubahan penggunaan lahan atau migrasi.
- › Peningkatan infrastruktur, kebijakan, dan institusi yang mendukung pengelolaan lahan dan sumber daya air yang efisien.



C. STRATEGI UNTUK PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN

Pembangunan yang ramah lingkungan atau pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Salah satu strategi utamanya adalah penerapan ekonomi sirkular, di mana produk didesain agar bisa digunakan kembali, didaur ulang, atau dipulihkan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi bersih seperti matahari dan angin, serta peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, memainkan peran penting dalam pembangunan hijau.

Di sektor pertanian dan kehutanan, praktik berkelanjutan seperti pertanian organik dan reboisasi dapat menjaga kesuburan tanah dan melestarikan hutan. Sementara itu, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana, melalui penggunaan air secara efisien dan pengolahan air limbah yang baik, dapat mencegah pencemaran dan menjaga ketersediaan air bersih. Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur hijau dan peningkatan transportasi publik ramah lingkungan, juga penting untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan kota yang lebih hijau.

Inovasi juga memainkan peran penting dalam pembangunan ramah lingkungan melalui teknologi hijau, seperti kendaraan listrik dan bangunan hemat energi. Selain itu, kesadaran dan edukasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan dan regulasi yang ketat serta memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, pembangunan dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.



BAB VIII

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

A. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN

Pada tingkat mikro, baik individu maupun keluarga, kesehatan merupakan pondasi penting untuk produktivitas kerja dan kemampuan belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih berenergi dan tangguh, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Pada tingkat makro, populasi yang memiliki kesehatan yang baik menjadi faktor penting dalam mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Bukti-bukti makro ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang setara kepada semua warganya dalam pelayanan kesehatan dan layanan publik lainnya. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga

tercipta masyarakat yang sehat secara keseluruhan. Pembangunan sosial dan ekonomi harus berjalan beriringan, karena peningkatan kesehatan masyarakat tanpa upaya untuk mengatasi kemiskinan dapat menghambat penurunan angka kematian di masa depan yang sangat terkait dengan isu kesehatan.

1. Arti Penting Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi

Tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, nilai ekonomi pendidikan terletak pada kontribusinya dalam menyediakan tenaga kerja yang terdidik, terampil, berpengetahuan, dan kompeten, sehingga mereka dapat lebih produktif. Jika struktur sosial dan ekonomi masyarakat sangat tidak merata, sistem pendidikan akan mencerminkan ketidakmerataan tersebut. Hal ini terlihat dari kelompok-kelompok masyarakat yang terus bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, pendidikan juga akan mempengaruhi bagaimana masyarakat berkembang di masa depan. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi bersifat saling mempengaruhi. Pendidikan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara perkembangan ekonomi yang baik juga dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

2. Arti Penting Kesehatan Dalam Pembangunan Ekonomi

Pengukuran dan distribusi tingkat kesehatan dapat dilakukan menggunakan indikator seperti angka kematian bayi dan angka harapan hidup, yang sering digunakan sebagai estimasi. Selain itu, perlu dipertimbangkan beban penyakit, di mana negara berkembang biasanya menghadapi lebih banyak tantangan, termasuk penyakit menular, AIDS, malaria, dan infeksi parasit. Penting untuk diingat bahwa kesehatan dan gizi berpengaruh pada kesempatan kerja, produktivitas, serta upah di kalangan masyarakat miskin.

Negara maju cenderung lebih mampu mengatasi masalah penyakit dibandingkan dengan negara berkembang, yang menghadapi beban lebih

berat dalam hal ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penyakit terkait kemiskinan, yang membuat orang lebih rentan terhadap masalah kesehatan. Ada banyak penyakit yang dapat berakibat fatal, terutama jika penyakit tersebut terjadi bersamaan dengan penyakit lain, yang dapat meningkatkan risiko kematian. Tiga penyakit utama yang menjadi perhatian di negara berkembang adalah AIDS, malaria, dan infeksi cacing parasit.

B. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL

Kemiskinan merupakan masalah yang telah ada sejak lama, namun solusi yang benar-benar efektif belum juga ditemukan, sehingga upaya untuk mengatasinya terus dilakukan. Definisi dan konsep kemiskinan sangat beragam. Menurut World Bank (2002), kemiskinan terbagi dalam empat dimensi utama: keterbatasan kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low capabilities), kurangnya keamanan (low security), dan keterbatasan kapasitas (low capacity). Selain itu, kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak sosial, ekonomi, dan politik, yang meningkatkan kerentanan dan ketidakberdayaan individu. Jeffrey Sachs (2005) menyatakan bahwa masyarakat miskin umumnya kekurangan enam jenis modal penting: 1) Modal manusia yang mencakup kesehatan, nutrisi, dan keterampilan; 2) Modal usaha seperti alat produksi; 3) Infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air; 4) Modal alam, yaitu tanah yang subur dan ekosistem yang baik; 5) Modal institusional, seperti regulasi dan layanan publik; dan 6) Modal pengetahuan, yang mencakup ilmu dan teknologi.

Secara umum, teori kemiskinan terbagi menjadi dua paradigma besar: liberal dan demokrasi sosial. Karena kompleksitasnya, kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pertumbuhan ekonomi, upah, kesempatan kerja, inflasi, jumlah anggota keluarga, kesehatan, pendidikan, akses modal, dan lokasi tempat tinggal. Maka, untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan analisis dan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan absolut. Kemiskinan relatif merujuk pada standar hidup yang ditentukan masyarakat setempat, sedangkan kemiskinan



absolut adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimal yang disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*). Terdapat pula teori “lingkaran kemiskinan” yang menyatakan bahwa rendahnya investasi dan pembentukan modal mempengaruhi produktivitas, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang menyebabkan kemiskinan berkelanjutan. Di sisi lain, garis kemiskinan mencakup kebutuhan pangan dan non-pangan dasar untuk hidup layak.

Secara umum, kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: 1) Kemiskinan kultural, akibat faktor budaya seperti malas dan boros; 2) Kemiskinan natural, karena keterbatasan fisik atau bencana alam; dan 3) Kemiskinan struktural, akibat ketidakadilan ekonomi dan distribusi aset. Pandangan sosio-antropologis melihat kemiskinan sebagai akibat dari faktor budaya yang melanggengkan kemiskinan, sementara pandangan ekonomi menekankan pada faktor alam dan struktural yang mempengaruhi distribusi kekayaan. Menurut David Cox, kemiskinan juga dapat dilihat dari beberapa dimensi lain: 1) Dampak globalisasi, 2) Terkait pembangunan, 3) Sosial, dan 4) Konsekuensial. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor dan dimensi yang saling mempengaruhi.

1. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan strategi dan intervensi yang tepat serta efektif. Ada tiga pilar utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat miskin, (2) pemerintahan yang baik, dan (3) pembangunan sosial (Prayitno, 1996). Tambunan, dkk. (2006) menyebutkan bahwa agar strategi ini berhasil, intervensi pemerintah perlu sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan:

1. **Kondisi Stabilitas :** Program pengentasan kemiskinan hanya akan efektif jika terdapat suasana yang stabil dan kondusif. Stabilitas politik, ekonomi, dan sosial sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. Pertumbuhan Penduduk yang Terkendali : Pengendalian pertumbuhan penduduk penting untuk mencapai keluarga kecil yang sejahtera, yang merupakan faktor kondusif dalam mengurangi kemiskinan.
3. Kepedulian terhadap Lingkungan : Program penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik memungkinkan kesejahteraan yang merata antar masyarakat.
4. Keberlanjutan Program: Program pengentasan kemiskinan perlu dirancang agar berkelanjutan dan mandiri. Program ini harus meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Ada empat akses yang harus diperbaiki:
 - › Sumber daya : Akses terhadap sumber daya untuk memproduksi.
 - › Teknologi : Penggunaan cara dan alat yang lebih baik dan efisien.
 - › Pasar : Produk harus memiliki akses ke pasar agar dapat dijual dan menghasilkan nilai tambah.
 - › Sumber pembiayaan : Memudahkan masyarakat miskin memperoleh pembiayaan untuk usahanya.
5. Desentralisasi dan Pendelegasian Wewenang : Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan harus melibatkan pemerintahan daerah, karena mereka lebih memahami kondisi masyarakat lokal. Pendelegasian wewenang ke tingkat daerah juga akan meningkatkan efektivitas program karena pelaksanaannya lebih dekat dengan sasaran.
6. Peningkatan SDM : Fokus utama harus diberikan pada peningkatan kualitas manusia, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, untuk menciptakan akses dan mutu layanan yang lebih baik.
7. Pelayanan Sosial Khusus : Dukungan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. Langkah ini perlu dilakukan dengan lebih efisien dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Sejalan dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap juga harus terus ditingkatkan (Murdiansyah, 2014).

2. Model Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pengalaman dari negara-negara Asia menunjukkan berbagai model pemberdayaan ekonomi pedesaan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya adalah “Model Mobilisasi Tenaga Kerja”, yang berfokus pada pemanfaatan tenaga kerja di desa untuk pembentukan modal. Tenaga kerja yang belum dimanfaatkan di rumah tangga petani kecil bisa menjadi sumber daya tersembunyi dan potensi tabungan. Dalam penerapannya, negara seperti Jepang menerapkan “Pajak Langsung atas Tanah” untuk pengumpulan dana di pedesaan, sementara Cina menggunakan “Kelembagaan di Desa”. Di sana, sistem kerja kelompok atau “brigade” di tingkat komunitas mengarahkan tenaga kerja yang belum termanfaatkan untuk membentuk modal tanpa kenaikan upah, yang terbukti efektif meningkatkan produktivitas.

Model yang lain, “Transfer Tenaga Kerja ke Industri”, mengandalkan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri melalui mekanisme pasar, memungkinkan tenaga kerja dari petani kecil menjadi sumber tabungan dan modal. Selain itu, “Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi” atau “Rural-Led Development” mempercepat pertumbuhan sektor pertanian dengan kemajuan teknologi, mendorong sektor ini sebagai penggerak utama. “Model Dimensi Spasial” menekankan aksesibilitas bagi masyarakat desa ke bidang “Ekonomi”, seperti pasar dan pekerjaan, serta “Sosial”, seperti layanan kesehatan dan pendidikan (Kuncoro, 2000). Dengan pendekatan ini, ekonomi pedesaan dapat diberdayakan untuk mengurangi kemiskinan.

C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEADILAN SOSIAL

Kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan merujuk pada pencapaian kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Ini berarti bahwa pembangunan yang ideal harus meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga secara sosial dan fisik. Dalam konteks ini, pembangunan harus menciptakan lapangan kerja yang layak dan menyediakan layanan publik yang berkualitas, sehingga masyarakat memiliki kemampuan

untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat juga terkait erat dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), yang mengukur pencapaian dalam tiga dimensi dasar—umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan akan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesehatan, memperluas akses pendidikan, dan memastikan ketersediaan hunian yang layak.

Di sisi lain, keadilan sosial dalam pembangunan menekankan pada distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi yang adil dan merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan, di mana ada kelompok masyarakat yang tertinggal akibat akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Keadilan sosial memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti mereka yang miskin, terpinggirkan, atau tinggal di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat dari pembangunan. Prinsip ini mengedepankan distribusi kekayaan yang lebih adil, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Keadilan sosial dalam pembangunan juga melibatkan redistribusi ekonomi, di mana pemerintah dapat menggunakan kebijakan seperti pajak progresif, jaminan sosial, dan program kesejahteraan untuk mendistribusikan sumber daya secara lebih merata. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa hasil pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok kaya atau wilayah tertentu saja, tetapi tersebar secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dari kelompok ekonomi rendah.

Pembangunan yang seimbang antara kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial akan menghasilkan pembangunan yang inklusif, di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan merasakan manfaatnya. Ini adalah model

pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas hidup dan kesetaraan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.



BAB IX

GLOBALISASI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN

A. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Globalisasi ekonomi bukanlah fenomena yang baru dalam sejarah peradaban dunia. Sejak sebelum adanya negara-bangsa, perdagangan dan migrasi antar benua telah terjadi sejak lama. Seiring dengan perkembangan yang ada, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan terutama sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke 20. Globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum. Proses globalisasi, yang ditandai oleh perkembangan informasi, mengharuskan adanya nilai-nilai dan norma-norma baru baik dalam konteks nasional maupun internasional. Pada bidang ekonomi, faktor utama yang mendorong globalisasi adalah peningkatan arus informasi, uang, dan barang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Menanggapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, kita sebagai bangsa yang berdaulat tidak dapat tetap diam tanpa melakukan perubahan dan pembaruan. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara semakin berat, karena kemajuan global telah membuat negara-negara di dunia menjadi lebih dekat dan hampir tanpa batas. Kondisi

ini, bagi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, bukan hanya merupakan tantangan, tetapi juga ancaman dan peluang besar yang tidak bisa dihindari atau diabaikan. Dengan kata lain, suka atau tidak, kita harus menghadapi masyarakat global. Ini mengharuskan kita untuk beradaptasi dan mengambil langkah-langkah strategis agar dapat bersaing dan berkontribusi secara efektif di panggung internasional. Keberanian untuk menghadapi perubahan dan inovasi menjadi kunci dalam meraih manfaat dari dinamika global tersebut.

Dua faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu:

1. Kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan transformasi kebudayaan telah memperpendek jarak antar negara. Inovasi teknologi memudahkan transportasi di seluruh dunia, memungkinkan transaksi ekonomi melintasi batas negara, menciptakan kesamaan dalam selera, dan mempermudah komunikasi. Dengan kemajuan ini, hambatan jarak untuk semua aktivitas berskala global dapat diminimalkan, sehingga membuka peluang untuk menciptakan saling ketergantungan antara berbagai aktor di arena global.
2. Terjadi konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan antarnegara. Dari perspektif kebijakan ekonomi, kecenderungan konvergensi ini sebenarnya sudah dapat dilihat sejak dua dekade terakhir, yang dikenal sebagai fenomena kejayaan aliran ekonomi neoklasik.

Dua ciri utama globalisasi (Endang, 2007:107) :

1. Terjadi peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya serta kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga keuangan global. Dulu, sebuah perusahaan multinasional biasanya hanya mendominasi satu produk, tetapi sekarang perusahaan transnasional besar memproduksi dan menjual berbagai macam produk serta layanan di berbagai bidang. Diprediksi bahwa keberagaman produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini akan semakin meningkat, tergantung pada permintaan pasar di negara-negara tempat mereka beroperasi.

2. Dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi kini tidak hanya berada dalam yurisdiksi pemerintah dan masyarakat di suatu wilayah negara, tetapi juga semakin dipengaruhi atau diproses oleh badan-badan internasional, perusahaan besar, serta pelaku ekonomi dan keuangan global.

Secara ekonomi, negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi dan finansial internasional. Oleh karena itu Negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional atau globalisasi. Globalisasi ekonomi telah mendorong integrasi ekonomi global melalui aliran uang, informasi, dan investasi yang semakin meningkat. Pusat-pusat keuangan dunia, seperti pasar interbank di London, kini menangani volume uang yang jauh melebihi kebutuhan untuk mendukung ekonomi nyata. Sementara itu, kemajuan dalam teknologi komunikasi dan transportasi telah menurunkan biaya dan menghilangkan hambatan perdagangan, menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan dinamis. Namun, aliran uang transnasional yang tidak terkontrol oleh kekuatan negara nasional mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi yang membuat kebijakan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari konteks global. Krisis ekonomi di Asia Timur dan Tenggara pada tahun 1997 menjadi contoh nyata dari dampak integrasi ini.

Dalam konteks ini, Garrett menyatakan bahwa dampak integrasi ekonomi global terhadap ekonomi nasional terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan. Kompetisi perdagangan yang semakin tajam merupakan elemen utama dalam globalisasi konvensional, dan hal ini telah diakui secara luas. Namun, kompetisi tidak hanya terjadi dalam perdagangan, tetapi juga dalam perebutan investasi. Perusahaan-perusahaan transnasional dan investasi modal global akan mencari wilayah yang menguntungkan dan menawarkan insentif yang lebih baik. Oleh karena itu, di era ekonomi global saat ini, tugas pemerintah negara nasional adalah menciptakan kondisi yang mendukung investasi. Berbagai teori telah dikembangkan mengenai reformasi birokrasi publik dan redefinisi peran negara dalam ekonomi, dengan tujuan untuk menghadapi tantangan yang

muncul akibat integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Hanya ekonomi yang efisien yang dapat bertahan dalam kompetisi, dan hal ini hanya mungkin jika mereka memiliki sistem pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, responsif, dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Dengan kata lain, pandangan ini berargumen bahwa pemerintah yang besar dianggap tidak kompetitif.

Dampak lain dari globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan multinationalisasi produksi dan ancaman yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksi mereka ke negara lain demi meraih keuntungan maksimal. Pengaruh dari multinationalisasi produksi ini terlihat dalam biaya produksi dan peran pemerintah yang intervensionis. Agar dapat bersaing dalam menarik investasi dan penyediaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan multinasional, pemerintah nasional harus menerapkan kebijakan pasar bebas. Selain itu, dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional juga tercermin dalam integrasi pasar keuangan global. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, integrasi pasar keuangan ini telah mengurangi otonomi ekonomi nasional secara signifikan, karena aliran uang tersebut tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan negara mana pun, termasuk negara superpower.

B. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI ASING

1. Pengertian perdagangan internasional

Perdagangan internasional adalah proses jual beli barang atau jasa antar negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses ini, pedagang memainkan peran penting karena mereka membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kini, perdagangan tidak hanya terbatas dalam satu negara, tetapi telah meluas hingga antarnegara. Kegiatan jual beli yang berlangsung antara dua atau lebih negara inilah yang disebut perdagangan internasional, di mana peran eksportir dan importir menjadi penting.

Alasan Terjadinya Perdagangan Internasional

Beberapa ahli ekonomi, seperti Adam Smith dan David Ricardo, memiliki teori yang menjelaskan alasan terjadinya perdagangan antarnegara. Adam Smith, melalui Theory of Absolute Advantage (Teori Keunggulan Mutlak), menyatakan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan mutlak jika mampu memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Misalnya, Indonesia memproduksi gas alam cair yang dibutuhkan oleh Jepang, sementara Jepang, meski tidak memiliki sumber gas alam, mampu menghasilkan mobil yang diimpor oleh Indonesia. Sementara itu, David Ricardo dengan Theory of Comparative Advantage (Teori Keunggulan Komparatif) menjelaskan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, Korea Selatan dapat memproduksi komputer dengan harga lebih murah dibandingkan Indonesia. Hal ini menjadikan Korea Selatan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komputer, sehingga Indonesia akan lebih diuntungkan jika mengimpor komputer dari Korea Selatan. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain:

- **Perbedaan Hasil Produksi**
Setiap negara memiliki sumber daya alam, modal, teknologi, dan budaya yang berbeda. Akibatnya, tiap negara menghasilkan barang dan jasa yang berbeda pula. Ada negara yang memiliki surplus pada produksi tertentu, sementara negara lain kekurangan dan membutuhkan barang tersebut. Misalnya, Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi pertanian, sedangkan Korea Selatan dan Jepang lebih unggul dalam produksi barang elektronik.
- **Perbedaan Harga Barang**
Harga barang bervariasi antara negara satu dengan yang lain. Perbedaan harga ini menjadi pendorong perdagangan antarnegara, karena orang dapat membeli barang di negara lain yang harganya lebih murah dan menjualnya di dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, harga komputer di Korea Selatan dan Jepang lebih murah dibandingkan

di Indonesia, sehingga pedagang Indonesia akan membeli komputer dari kedua negara tersebut untuk dijual kembali di dalam negeri.

- **Dorongan untuk Meningkatkan Produktivitas**
Setiap negara memiliki kebutuhan yang beragam. Namun, dari sisi ekonomi, lebih efisien jika suatu negara fokus memproduksi barang-barang tertentu saja dan kemudian melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan cara ini, negara dapat meningkatkan produktivitasnya melalui spesialisasi.

Faktor-Faktor Penghambat Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional, seringkali ada berbagai kendala yang dapat menghalangi kelancaran aktivitas jual beli antar negara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini adalah beberapa hambatan tersebut:

- **Keamanan Negara yang Tidak Stabil**
Ketika sebuah negara tidak aman, para pedagang cenderung mengalihkan perdagangan mereka ke negara lain yang lebih stabil dan aman. Sebaliknya, semakin aman situasi suatu negara, semakin besar daya tariknya bagi pelaku perdagangan internasional.
- **Kebijakan Ekonomi yang Menghambat**
Kebijakan ekonomi tertentu yang diterapkan pemerintah dapat menjadi penghalang bagi perdagangan internasional. Contohnya adalah kebijakan pembatasan impor, pajak yang tinggi untuk barang impor atau ekspor, dan proses perizinan yang rumit.
- **Ketidakstabilan Nilai Tukar Mata Uang Asing**
Kurs mata uang asing yang tidak stabil menyebabkan kesulitan bagi eksportir dan importir dalam menentukan harga jual atau beli. Ketidakpastian ini mempengaruhi penawaran dan permintaan serta dapat mengurangi minat pedagang untuk melakukan ekspor dan impor.

Perbedaan Perdagangan Dalam Negeri dan Internasional

Ada beberapa perbedaan penting antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, antara lain:

- **Jangkauan Wilayah**
Perdagangan dalam negeri terbatas pada wilayah satu negara, sementara perdagangan internasional melibatkan beberapa negara.
- **Cara Pembayaran**
Dalam perdagangan domestik, pembayaran biasanya dilakukan dengan mata uang negara tersebut, sedangkan perdagangan antar negara memerlukan transaksi dalam berbagai mata uang (valuta asing).
- **Sistem Distribusi**
Distribusi dalam perdagangan domestik sering dilakukan secara langsung, sementara perdagangan internasional biasanya memerlukan sistem distribusi yang lebih kompleks dan tidak langsung.
- **Peraturan yang Diterapkan**
Peraturan dalam perdagangan internasional lebih rumit dibandingkan perdagangan dalam negeri, karena melibatkan lebih dari satu negara. Oleh karena itu, aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional harus dipatuhi di negara-negara yang terlibat.
- **Tingkat Persaingan**
Persaingan dalam perdagangan internasional lebih ketat, karena melibatkan penjual dan pembeli dari berbagai negara, berbeda dengan perdagangan domestik yang persaingannya lebih terbatas.
- **Standar Ukuran untuk Berat, Panjang, dan Volume**
Perdagangan dalam negeri menggunakan satuan ukuran yang berlaku di negara tersebut. Namun, dalam perdagangan internasional, satuan ukuran harus disesuaikan dengan standar internasional.
- **Biaya Pengiriman**
Biaya transportasi dalam perdagangan internasional biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan domestik, mengingat jarak dan prosedur administrasi yang lebih kompleks.

Dampak Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional membawa berbagai dampak bagi negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, dan memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian negara.

Dampak Positif Perdagangan Internasional

Baik negara pengekspor maupun pengimpor mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Bagi negara pengekspor, ini menjadi kesempatan untuk memperluas pasar, sedangkan negara pengimpor memperoleh kemudahan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Berikut beberapa dampak positif lainnya:

- **Meningkatkan Persahabatan Antar Negara**
Perdagangan antarnegara menciptakan rasa saling membutuhkan dan keinginan untuk menjalin hubungan yang baik. Hal ini memperkuat persahabatan antara negara-negara yang terlibat.
- **Meningkatkan Kemakmuran Negara**
Dengan perdagangan internasional, pendapatan negara bisa meningkat. Negara yang memiliki surplus barang dapat menjualnya ke negara lain, yang mendorong pengembangan ilmu dan teknologi agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional.
- **Sumber Pemasukan Bagi Negara**
Perdagangan internasional dapat meningkatkan devisa negara melalui pajak ekspor dan impor. Banyak negara yang sangat mengandalkan pendapatan dari perdagangan internasional untuk menambah kas negara.
- **Mendorong Efisiensi dan Spesialisasi**
Perdagangan antarnegara memungkinkan setiap negara untuk fokus pada produksi barang atau jasa yang dapat mereka hasilkan dengan lebih efisien dibanding negara lain, menciptakan spesialisasi produk dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
- **Memperluas Pilihan Konsumsi**
Melalui perdagangan internasional, penduduk suatu negara dapat mengakses produk berkualitas tinggi yang mungkin tidak diproduksi di dalam negeri, memperluas pilihan barang konsumsi bagi masyarakat.

Dampak Negatif Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional juga membawa sejumlah dampak negatif bagi negara-negara yang terlibat. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi

- Ketergantungan pada Negara Lain Perdagangan antarnegara bisa menyebabkan ketergantungan, di mana suatu negara menjadi sangat bergantung pada negara lain untuk barang atau jasa tertentu.
- Persaingan Tidak Sehat Persaingan di pasar internasional kadang menjadi tidak sehat, terutama jika negara-negara menggunakan praktik yang tidak adil untuk memenangkan pasar.
- Usaha Kecil Sulit Bertahan Industri kecil seringkali kesulitan untuk bersaing dengan produk asing yang mungkin lebih murah atau berkualitas lebih tinggi, sehingga banyak usaha kecil yang terpaksa gulung tikar.
- Pola Konsumsi yang Meniru Negara Maju Masyarakat cenderung meniru gaya hidup dan pola konsumsi negara-negara maju, yang dapat mengubah preferensi lokal dan mengurangi minat terhadap produk dalam negeri.
- Penurunan Tabungan untuk Investasi Dengan meningkatnya pola konsumsi, masyarakat lebih cenderung untuk membelanjakan uang daripada menabung untuk investasi, yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Dominasi Ekonomi oleh Negara Maju Negara-negara maju seringkali memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar, sehingga mereka bisa mempengaruhi atau bahkan mengendalikan ekonomi negara lain yang lebih lemah.
- Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran Setiap negara mencatat transaksi ekonomi dengan negara lain, yang disebut neraca. Jika pencatatan ini khusus untuk perdagangan barang, maka disebut neraca perdagangan. Jika mencakup semua transaksi keuangan, termasuk jasa, investasi, dan transfer, maka disebut neraca pembayaran.

Investasi Asing/Penanaman Modal Asing (PMA)

Perusahaan yang melakukan investasi lintas negara memiliki tujuan beragam dan karakteristik yang berbeda-beda. Agar dapat menarik investor untuk menanamkan modal di dalam negeri, pembuat kebijakan perlu memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan terkait investasi

luar negeri. Bagian ini membahas teori-teori akademis yang mendasari PMA.

Teori PMA dalam Bisnis Internasional

Secara umum, teori PMA dibagi menjadi dua kelompok utama: teori bisnis internasional dan teori ekonomi. Meski ekonomi telah lama berusaha menjelaskan PMA, teori yang mempertimbangkan proses pengambilan keputusan investor baru dikembangkan oleh Dunning pada tahun 1973 dalam bidang bisnis internasional. Dunning menciptakan paradigma eclectic, atau sering disebut sebagai model Uppsala, yang memberikan kerangka tiga langkah untuk membantu perusahaan memutuskan apakah PMA menguntungkan.

Model ini dikenal sebagai teori OLI (*Ownership, Location, dan Internalization*), yang terdiri dari tiga keunggulan utama yang harus dimiliki perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan PMA. Berdasarkan teori internalisasi, perusahaan akan melakukan suatu aktivitas secara internal jika biaya melakukannya lebih rendah dibanding membeli dari pasar (*outsourcing*). Dalam hal ini, PMA dianggap sebagai bentuk internalisasi di mana perusahaan memilih untuk memproduksi barang atau jasa di negara lain alih-alih membelinya dari produsen di negara tersebut. Langkah ini diambil jika perusahaan mampu memenuhi ketiga keunggulan: kepemilikan (*Ownership*), lokasi (*Location*), dan internalisasi (*Internalization*).

Keunggulan Kepemilikan (*Ownership Advantages*)

Keunggulan ini mengacu pada aset tak berwujud yang hanya dimiliki perusahaan, seperti teknologi, merek dagang, atau paten, yang bisa dengan mudah dipindahkan antar-unit perusahaan multinasional. Keunggulan ini merupakan sumber daya atau kemampuan unik perusahaan yang tidak dimiliki pesaing, dan memberikan nilai lebih dalam kompetisi pasar. Contohnya, monopoli atau akses terbatas ke bahan baku, serta kemampuan belajar dan inovasi. Skala keekonomian juga termasuk keunggulan ini, karena perusahaan bisa memanfaatkan ukuran, pengalaman, dan modal untuk meningkatkan efisiensi.

Keunggulan Lokasi (*Location Advantages*)

Keunggulan lokasi terkait manfaat yang diperoleh dari negara tujuan investasi. Terdapat tiga aspek utama keunggulan ini, yaitu ekonomi, politik, dan sosial. Keunggulan ekonomi meliputi kualitas dan kuantitas tenaga kerja, bahan baku, dan potensi pasar di negara tersebut. Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, serta kualitas hukum dan lembaga negara yang bisa mendukung keberhasilan PMA. Sementara itu, keunggulan sosial mencakup aspek kedekatan budaya, bahasa, atau agama antara negara asal dan tujuan investasi, yang dapat mempermudah adaptasi bisnis di negara tersebut.

Keunggulan Internalisasi (*Internalization Advantages*)

Keunggulan internalisasi diperhitungkan jika kedua keunggulan sebelumnya telah terpenuhi. Keunggulan ini tercapai jika perusahaan dapat memadukan keunggulan kepemilikan dengan manfaat lokasi untuk melakukan produksi di negara tujuan secara efisien. Internal produksi dinilai lebih menguntungkan dibandingkan outsourcing, terutama jika perusahaan bisa mengontrol kualitas dan biaya produksi lebih baik serta menghindari risiko pelanggaran kontrak atau peniruan produk oleh pihak lokal. Untuk mencapai ini, perusahaan perlu memahami kondisi negara tujuan dan memiliki akses terhadap sumber daya lokal. Jika ketiga keunggulan ini tidak terpenuhi, perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif seperti kontrak outsourcing, lisensi, atau kerja sama waralaba dengan pihak lokal.

Teori PMA dalam Ilmu Ekonomi

Penelitian tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dalam ilmu ekonomi telah berlangsung lama, namun pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan karakter perusahaan dalam pengambilan keputusan masih tertinggal dibandingkan studi di bidang bisnis internasional. PMA sendiri dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu PMA horizontal, ekspansi vertikal, dan PMA hybrid.



PMA Horizontal

PMA horizontal, atau disebut juga hipotesis kedekatan-konsentrasi (*proximity-concentration hypothesis*), adalah ketika perusahaan menduplikasi proses produksi yang sama di berbagai lokasi atau negara. Jenis PMA ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara tujuan sehingga perusahaan tidak perlu mengekspor barang dari negara asal. Menurut Brainard (1993; 1997), PMA menjadi lebih menarik dibandingkan ekspor jika pasar negara tujuan besar dan biaya ekspor, seperti tarif dan hambatan perdagangan lainnya, cukup tinggi. Sebaliknya, jika biaya produksi di negara tujuan terlalu mahal, perusahaan cenderung lebih memilih ekspor. Skala keekonomian yang lebih tinggi pada satu lokasi produksi bisa membuat PMA tidak efisien, terutama jika biaya transportasi meningkat atau permintaan akan barang tersebut lebih elastis.

Helpman, Melitz, dan Yeaple (2004) mengembangkan teori PMA horizontal dengan melihat perbedaan produktivitas perusahaan. Mereka berargumen bahwa hanya perusahaan yang paling efisien yang akan melakukan PMA karena biaya tetap PMA tinggi tetapi biaya variabelnya rendah. Hal ini berarti PMA lebih menarik ketika biaya transportasi tinggi dan produksi di berbagai lokasi bisa dilakukan secara efisien.

Ekspansi Vertikal

PMA vertikal adalah ketika perusahaan membagi proses produksi di berbagai negara sesuai dengan keunggulan masing-masing, misalnya, penelitian dan pengembangan dilakukan di negara asal yang lebih maju, sedangkan produksi di negara berkembang yang biaya produksinya lebih rendah. Head dan Ries (2003) mengemukakan bahwa selain akses pasar, perusahaan mempertimbangkan biaya produksi, yang sering lebih rendah di negara berkembang. Dengan demikian, PMA jenis ini bisa memadukan pendekatan horizontal dan vertikal.

Bernard et al. (2010) mengamati bahwa hanya perusahaan yang paling produktif yang melakukan ekspansi vertikal. Mereka mencatat bahwa di Amerika Serikat, perusahaan yang mengimpor bahan baku sendiri atau melakukan ekspansi vertikal biasanya lebih produktif daripada yang tidak. Penelitian ini konsisten dengan teori Helpman et al. (2004), yang

menunjukkan bahwa hanya perusahaan dengan produktivitas tinggi yang memilih PMA vertikal karena mereka mampu mengelola biaya dan mempertahankan standar kualitas secara efektif.

Model Hybrid dan Export Platform

Selain jenis horizontal dan vertikal, PMA juga dapat dilakukan sebagai strategi ekspor. Banyak perusahaan mendirikan fasilitas di negara lain untuk memproduksi barang yang kemudian diekspor ke negara lain, bukan untuk pasar lokal. Strategi ini disebut export platform. Penelitian oleh Kneller dan Pisu (2004) menemukan bahwa perusahaan yang masuk melalui PMA lebih cenderung melakukan ekspor daripada perusahaan lokal. Strategi ini bisa menjadi saling melengkapi, dimana ekspor dan PMA diatur berdasarkan kecocokan proses produksi yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Beberapa perusahaan mengkombinasikan PMA dan ekspor dengan lebih kompleks, terutama perusahaan yang lebih produktif. Menurut Grossman dan Helpman (2003), perusahaan yang lebih besar dan efisien cenderung memilih strategi yang menggabungkan PMA dengan ekspor untuk memaksimalkan keuntungan dan akses pasar.

Dampak Perjanjian Dagang pada PMA

Perjanjian perdagangan juga mempengaruhi pilihan bentuk PMA. Ekholm, Forslid, dan Markusen (2007) mencontohkan situasi dengan tiga negara: Negara A dan B yang maju, serta Negara C yang berkembang. Jika Negara A dan C menandatangani perjanjian perdagangan bebas, maka perusahaan di Negara A mungkin akan memindahkan produksi ke Negara C untuk mengekspor kembali ke Negara A. Sementara perusahaan di Negara B memiliki tiga pilihan: tetap berproduksi di Negara B, melakukan PMA di Negara C untuk memenuhi pasar A dan C, atau sepenuhnya memindahkan produksi ke Negara C untuk melayani ketiga pasar. Pilihan ini tergantung pada besarnya keunggulan biaya di Negara C dan biaya perdagangan yang ada.

C. PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN

Organisasi internasional memainkan peran krusial dalam pembangunan global dengan berbagai cara, mulai dari memberikan bantuan hingga memfasilitasi kerjasama antarnegara. Berikut adalah beberapa peran utama organisasi internasional dalam konteks pembangunan:

Pemberian Bantuan Keuangan dan Teknis

Organisasi seperti Bank Dunia dan United Nations Development Programme (UNDP) memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk mendukung proyek-proyek pembangunan. Bantuan ini sering kali difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Kemdikbud, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Promosi Pembangunan Berkelanjutan

Organisasi internasional berupaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Misalnya, melalui Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP), negara-negara didorong untuk mengadopsi kebijakan yang mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi terbarukan. Hal ini penting agar “pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi” (Makro Ekonomi GNG).

Fasilitasi Kerjasama Multilateral

Melalui platform seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), organisasi internasional memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara. Ini membantu menciptakan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan serta kolaborasi dalam isu-isu global seperti kesehatan dan keamanan.

Pengawasan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Organisasi seperti Amnesty International berperan dalam memantau pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara. Mereka melakukan advokasi untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar individu, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

Penanganan Krisis Global

Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis kemanusiaan, organisasi internasional memberikan bantuan darurat dan koordinasi respons. WHO, misalnya, berperan aktif dalam menangani wabah penyakit global, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, peran organisasi internasional dalam pembangunan sangat luas dan mencakup berbagai aspek mulai dari pemberian bantuan hingga promosi kerjasama multilateral. Dengan pendekatan yang holistik ini, mereka membantu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.





BAB X

KASUS STUDI PEMBANGUNAN EKONOMI

A. STUDI KASUS NEGARA BERKEMBANG

Daya Saing (Competitiveness) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara

Pertumbuhan pesat suatu negara dan kinerja perdagangan yang lebih baik dibandingkan negara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor krusial dan pemerintah dapat mengejar kebijakan tertentu untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Daya saing merupakan konsep yang memiliki banyak dimensi dan dapat dianalisis dari tiga tingkatan, yaitu negara, industri, dan perusahaan. Istilah ini berasal dari kata Latin *competere* yang mengacu pada partisipasi dalam pasar yang kompetitif. Secara umum, daya saing menggambarkan kekuatan ekonomi suatu entitas saat berhadapan dengan pesaing di pasar global.

Studi kasus yang diangkat berfokus pada 135 negara berkembang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing serta pertumbuhan ekonomi. Menggunakan kerangka kerja Fragenberg (2004) dan data panel dari tahun 2003 hingga 2012, studi ini mengeksplorasi hubungan antara berbagai variabel, seperti pengeluaran untuk Riset dan Pengembangan, angka masuk sekolah tertier, dan akses internet per kapita,

dengan pertumbuhan PDB per kapita. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menegaskan pentingnya investasi dalam pendidikan dan inovasi.

Salah satu temuan utama dari studi ini adalah bahwa setiap peningkatan 1% dalam pengeluaran untuk Riset dan Pengembangan berkontribusi pada peningkatan PDB sebesar sekitar 806,94 Dolar AS per tahun. Selain itu, peningkatan angka masuk sekolah tertier juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dampak yang bervariasi tergantung pada metode analisis yang digunakan. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa negara-negara berkembang cenderung menjadi importir neto dalam hal royalti dan lisensi yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Negara-negara berkembang perlu meningkatkan pengeluaran untuk Riset dan Pengembangan, memperbaiki akses pendidikan tinggi, dan meningkatkan akses internet untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada dorongan untuk berusaha menjadi eksportir neto dalam bidang royalti dan lisensi yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada peningkatan daya saing melalui inovasi dan pendidikan, negara-negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan mereka dari negara maju dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara keseluruhan.

Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Ketidaksetaraan Sosial

Studi ini menyoroti dampak signifikan dari globalisasi ekonomi terhadap ketidaksetaraan sosial di negara-negara berkembang. Meskipun globalisasi menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi melalui integrasi pasar dan arus modal, efek yang tidak merata mengakibatkan peningkatan ketidaksetaraan dalam akses pendapatan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berdasarkan analisis berbagai faktor ekonomi dan kebijakan, ditemukan bahwa ketidaksetaraan sosial berpotensi memicu ketegangan dan konflik, menghambat pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perubahan struktur pekerjaan dan peningkatan eksklusi digital menambah kompleksitas

tantangan yang dihadapi masyarakat di negara berkembang. Studi ini juga mengungkap dampak globalisasi terhadap nilai-nilai budaya dan identitas nasional, yang dapat menciptakan ketegangan antara modernitas dan tradisi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya, untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi ini memberikan wawasan mendalam mengenai dampak globalisasi ekonomi terhadap ketidaksetaraan sosial di sejumlah negara berkembang, dengan menyoroti faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang berperan penting dalam proses ini. Berikut adalah ringkasan dari temuan utama yang diperoleh dari analisis kualitatif dan kuantitatif:

1. **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidaksetaraan**
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak positif terhadap pengurangan ketidaksetaraan sosial. Meskipun pendapatan nasional meningkat, distribusi kekayaan yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan ekonomi.
2. **Perdagangan Internasional dan Lapangan Pekerjaan**
Integrasi dalam perdagangan internasional menciptakan peluang ekonomi, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta tidak selalu tersebar merata. Beberapa sektor mungkin berkembang pesat, sementara yang lain stagnan, menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses kerja.
3. **Investasi Asing dan Eksploitasi Sumber Daya**
Dampak investasi asing bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada. Beberapa negara berhasil memanfaatkan investasi asing untuk pembangunan berkelanjutan, sedangkan negara lain mengalami eksploitasi sumber daya tanpa memperoleh manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
4. **Perubahan Nilai dan Identitas Budaya**
Ditemukan bahwa globalisasi ekonomi dapat memicu transformasi nilai dan identitas budaya di masyarakat. Modernisasi dan penetrasi

budaya global sering kali menciptakan ketidaksetaraan budaya, menimbulkan konflik identitas, serta meningkatkan polarisasi sosial.

5. Teknologi dan Ketidaksetaraan Digital

Perkembangan teknologi berdampak signifikan pada ketidaksetaraan, terutama terkait akses dan pemanfaatan teknologi. Kelompok tertentu dalam masyarakat dapat terpinggirkan secara digital, menciptakan kesenjangan dalam akses informasi dan peluang ekonomi.

6. Pengaruh Kebijakan Publik

Kebijakan publik berperan penting dalam mengatasi dampak globalisasi. Negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan inklusif, pendidikan yang merata, dan perlindungan sosial cenderung lebih efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan yang timbul akibat globalisasi ekonomi.

7. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Pengelolaan dampak globalisasi ekonomi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sektor ekonomi, pendidikan, budaya, dan kebijakan sosial. Kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan kunci untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari globalisasi.

Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa pemahaman dampak globalisasi ekonomi terhadap ketidaksetaraan sosial sangat penting bagi negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan distribusi yang merata dapat memperburuk ketidaksetaraan, sehingga diperlukan model pertumbuhan yang inklusif dan penyesuaian kebijakan yang fokus pada pemerataan manfaat. Selain itu, regulasi investasi asing dan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal serta akses teknologi yang merata juga krusial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Terakhir, kolaborasi internasional dalam aspek perdagangan dan pembangunan dapat mempercepat upaya untuk mencapai inklusivitas dan keadilan sosial dalam konteks globalisasi.

B. STUDI KASUS NEGARA MAJU

Penerapan Model Kapitalisme Negara sebagai Strategi Ekonomi Singapura

Setiap negara menerapkan model state capitalism yang berbeda-beda. Singapura dikenal memiliki model kapitalisme negara yang ideal: pemerintah tidak langsung membatasi aktivitas produsen dan konsumen di pasar melalui kebijakan yang ketat, tetapi memberikan insentif bagi perusahaan domestik agar dapat bersaing secara sehat sekaligus mendukung agenda negara. Melalui pendekatan ini, pemerintah berperan dalam memperkuat daya saing industri Singapura di pasar internasional melalui BUMN (SOEs) dan Perusahaan Milik Pemerintah (GLCs). Operasional SOEs dan GLCs dikelola oleh teknokrat, sehingga tetap profesional dan efektif. Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa model kapitalisme negara merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Singapura, meskipun fitur unik dari Singapura membuat model ini sulit direplikasi.

Salah satu kunci keberhasilan kapitalisme negara Singapura adalah pembatasan intervensi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendukung aktivitas bisnis melalui insentif dan dukungan, dengan berinvestasi untuk mendorong ekspansi ekonomi melalui GLCs yang berkompetisi di tingkat domestik dan internasional. GLCs berperan sebagai landasan ekonomi Singapura dalam bersaing di pasar global. Pemerintah juga mendorong bisnis untuk terus berinovasi demi mencapai prioritas negara tanpa pendekatan intervensionis atau koersif. Kebebasan ini memungkinkan terciptanya inovasi dan kompetisi yang sehat di antara pelaku bisnis.

Pengaruh kehadiran SOEs dalam ekonomi, terutama di sektor-sektor penting, yang berdampak positif: Rasio RoA, D/E, dan aset menunjukkan bahwa GLCs tampil lebih baik daripada non-GLCs. Pengelolaan perusahaan yang sehat meningkatkan optimisme investor, yang membuka peluang ekonomi lainnya. Model kapitalisme negara Singapura berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dibagi dalam tiga periode: pra-state capitalism (1965-1990), masa state capitalism (1965-1998) dan pasca-krisis finansial (1999-2022). Pada masa pra-state capitalism, pertumbuhan

ekonomi Singapura stagnan. Namun, sejak 1965 ketika Lee Kuan Yew menerapkan model ini, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan signifikan. Selama krisis finansial 1997-1998, ekonomi Singapura turun tetapi tetap terkendali, dan pada periode pasca-krisis (1998-2022), terjadi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin signifikan.

Disini juga membandingkan penerapan state capitalism di Singapura, Tiongkok, dan Indonesia. Model Singapura yang mengedepankan non-intervention dan non-preference dianggap efektif karena luas wilayah yang kecil memudahkan pengawasan. Keterkaitan antara stabilitas sosial-politik dan kesejahteraan ekonomi juga memberi insentif bagi pemerintah untuk menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Sementara itu, faktor geografis dan dinamika politik yang kompleks di negara lain membuat model ini sulit diterapkan. Dengan demikian, model kapitalisme negara Singapura menantang asumsi bahwa peran pemerintah tidak efektif dalam pertumbuhan ekonomi. Singapura menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam sektor penting mampu mempercepat pemulihan ekonomi, seperti saat krisis 1998, sepanjang perusahaan diarahkan secara sinergis dengan agenda negara. Kesuksesan model ini ditentukan oleh batasan yang jelas tentang sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi dan memberi kebebasan pada aktor bisnis untuk menciptakan iklim ekonomi yang kompetitif namun kondusif.

C. PELAJARAN DARI KESUKSESAN DAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari kesuksesan dan kegagalan pembangunan.

Perencanaan yang Matang

Kesuksesan pembangunan sering kali dimulai dengan perencanaan yang baik. Program-program pembangunan yang terencana dengan baik, seperti

inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan, menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Rustan dalam bukunya *Pusaran Pembangunan Ekonomi* (2019), “pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan per kapita” yang memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi.

Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap proyek tersebut dan memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Seperti yang dinyatakan dalam artikel di Gramedia, “pembangunan ekonomi didukung oleh penggunaan teknologi, penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan organisasi.

Pendekatan Berkelanjutan

Kesuksesan pembangunan juga terkait dengan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan. Proyek yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang cenderung lebih berhasil dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa “pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi” (Gramedia).

Ketergantungan pada Teori Barat

Banyak kegagalan pembangunan disebabkan oleh penerapan teori-teori Barat yang tidak sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, penerapan model pertumbuhan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat sering kali menghasilkan hasil yang tidak diharapkan.

Kurangnya Koordinasi

Kegagalan dalam pembangunan infrastruktur sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menekankan perlunya sistem manajemen proyek

yang terintegrasi untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan dikelola secara efektif.

Minimnya Pemahaman tentang Konteks Sosial

Banyak program pembangunan gagal karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat setempat. Ketidakmampuan untuk memahami dinamika sosial dapat menyebabkan konflik dan resistensi terhadap program-program tersebut.

Kegagalan Mengatasi Masalah Struktural

Kegagalan dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa tanpa penanganan masalah struktural seperti akses ke teknologi dan pelatihan petani, hasil yang diinginkan sulit dicapai. Ini menunjukkan bahwa solusi jangka pendek tidak cukup; diperlukan pendekatan holistik. Pelajaran dari kesuksesan dan kegagalan pembangunan menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Mengintegrasikan perencanaan matang, keterlibatan masyarakat, serta pemahaman kontekstual dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Di sisi lain, menghindari ketergantungan pada teori asing dan memperhatikan faktor-faktor sosial serta struktural akan membantu mencegah kegagalan di masa depan.



BAB XI

INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN

A. PERAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam era globalisasi dan kompetisi internasional yang sengit, inovasi menjadi faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan potensi ekonomi yang luas, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan investasi cerdas dalam teknologi dan infrastruktur, serta reformasi sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Di bidang ekonomi, inovasi teknologi dan model bisnis baru telah menciptakan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Misalnya, digitalisasi telah membawa dampak besar pada cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi di pasar, yang berpotensi meningkatkan PDB nasional. Sementara itu, pendidikan, sebagai dasar dari sumber daya manusia, perlu mengalami transformasi agar sesuai dengan kebutuhan industri modern. Diperlukan kurikulum inovatif yang mengintegrasikan keterampilan digital dan kemampuan berpikir kritis untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan industri 4.0.

Inovasi merupakan pembaruan terhadap berbagai sumber daya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi manusia. Proses inovasi

sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang memungkinkan penciptaan produk baru yang berbeda. Manfaat utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya, sehingga manusia dapat meraih keuntungan lebih. Inovasi dapat ditemukan di berbagai sektor kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan komunikasi.

Dampak Inovasi pada Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan

1. **Peningkatan produktivitas dan efisiensi**
Inovasi, terutama dalam teknologi dan proses bisnis, telah secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Penggunaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi memungkinkan perusahaan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan output dengan lebih cepat.
2. **Penciptaan Lapangan Kerja**
Sektor-sektor seperti teknologi informasi dan komunikasi, yang didorong oleh inovasi, sering kali memerlukan tenaga kerja terampil, sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Di banyak negara, termasuk Indonesia, industri teknologi tinggi dan startup telah menjadi sumber utama pekerjaan baru dan sering kali menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
3. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**
Inovasi berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut World Bank (2019), inovasi teknologi dapat meningkatkan daya saing suatu negara, membuka akses ke pasar baru, dan memperbaiki standar hidup masyarakat.
4. **Keberlanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya**
Inovasi dalam teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan memiliki pengaruh besar dalam mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas industri. Teknologi seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah memungkinkan perusahaan dan negara untuk meminimalkan jejak karbon mereka.

5. Resiliensi dan Adaptasi

Inovasi memungkinkan perusahaan dan masyarakat untuk lebih tangguh menghadapi perubahan dan tantangan, termasuk krisis ekonomi atau perubahan iklim. Penerapan solusi berbasis teknologi dapat meningkatkan kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar atau lingkungan yang dinamis.

B. TEKNOLOGI DAN TRANSFORMASI DIGITAL

Masyarakat kini mulai memanfaatkan teknologi ini dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Beberapa poin penting mengenai teknologi informasi dan digital juga dibahas untuk menjelaskan betapa pentingnya teknologi ini serta dampaknya bagi masyarakat global. Teknologi Digital mengacu pada sistem informasi yang lebih mengandalkan komputer dibandingkan tenaga manusia. Teknologi ini ditandai dengan sistem otomatis dan canggih yang dapat diproses oleh komputer. Intinya, teknologi digital memproses informasi dalam bentuk angka dengan cepat. Perkembangan teknologi ini meningkatkan kualitas dan efisiensi data yang dihasilkan dan dikirim, seperti gambar yang semakin jelas, kapasitas yang lebih efisien, dan proses pengiriman yang lebih cepat. Teknologi digital menggunakan sistem bit dan byte untuk menyimpan dan memproses data. Sistem ini melibatkan banyak saklar listrik kecil yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1 (sistem biner). Dengan sistem ini, telah terjadi kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, pengolahan informasi, keamanan data, dan manajemen kegiatan yang kompleks. Kemajuan komunikasi sangat pesat dengan adanya jaringan seperti HSDPA, 2G, 3G, 4G, dan kini 5G. Kecepatan perkembangan jaringan ini sangat cepat, bahkan melebihi kemajuan perangkat keras, sehingga pengguna teknologi harus terus mengikuti perkembangan terbaru agar dapat memanfaatkannya. Di saat kita masih menggunakan 4G, sudah ada jaringan yang lebih cepat dan memiliki kapasitas lebih besar.

Di masa depan, teknologi digital akan terus berkembang, dipengaruhi oleh tiga hal utama: transisi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital. Konvergensi jaringan adalah kemampuan jaringan komunikasi yang



dapat mengintegrasikan berbagai layanan seperti telepon, video, dan komunikasi, baik di rumah maupun di perusahaan. Kebutuhan akan konvergensi jaringan yang meningkat akan mendorong perubahan teknologi sesuai kebutuhan tersebut. Transisi teknologi dari metode lama ke teknologi digital, baik bagi produsen maupun konsumen, menunjukkan pergeseran ke teknologi yang lebih sederhana. Dalam konteks gaya hidup, semakin banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dan dalam perjalanan, menggabungkan antara bekerja dan bersantai. Produsen produk digital harus memahami kecenderungan ini dan menyesuaikan penawaran mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.

Transformasi digital adalah perubahan cara kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, perbankan, dan pemerintahan telah menerapkan transformasi ini. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dengan menggunakan database, sehingga dokumen fisik berkurang dan semua transaksi menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Perubahan ini membawa dampak positif dan negatif bagi individu dan perusahaan yang terlibat. Dalam dunia bisnis, transformasi digital memudahkan pelanggan untuk memesan produk secara online tanpa perlu bertransaksi secara langsung. Semua proses, dari pemesanan hingga pembayaran dan pelacakan pengiriman, dapat dilakukan secara digital. Hal ini berpotensi menurunkan harga produk karena biaya pemasaran dan administrasi yang lebih rendah. Akibatnya, pelaku bisnis tradisional mungkin mengalami kerugian karena pelanggan beralih ke metode transaksi digital yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Kehadiran teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0, di mana ruang dan waktu semakin terpadu. Internet menjadi kekuatan utama dalam revolusi digital, mengubah cara kolaborasi dan komunikasi di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, metode bisnis harus berubah agar tetap relevan. Kemudian, lahirlah generasi baru, yaitu Revolusi Industri 4.0, yang menghadirkan perubahan teknologi yang cepat. Di sisi lain, tidak ada jaminan kesuksesan bagi perusahaan besar di era ini. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott pada tahun 1997.

Menurutnya, ekonomi digital adalah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi. Fenomena ini menggambarkan ruang informasi yang berisi berbagai pendekatan alat informasi, kapasitas, dan pengolahan data. Untuk pertama kalinya, industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), aktivitas e-commerce, serta penjualan barang dan jasa digital diakui sebagai bagian dari ekonomi digital. Zimmerman (2000) menyebutkan bahwa konsep ekonomi digital digunakan untuk menggambarkan dampak global dari perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi terhadap kondisi sosial ekonomi. Tujuan dari ekonomi digital adalah memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar untuk masuk tanpa hambatan eksternal. Dalam konteks ini, ekonomi digital mendorong inovasi dan kompetisi, yang dapat dimanfaatkan oleh startup yang fokus pada kolaborasi dan sinergi. Dengan demikian, ekonomi digital dapat dipandang sebagai “ekonomi berbagi,” yang mengajak usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkolaborasi dengan perusahaan besar.

Di Indonesia, terdapat beberapa sektor yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dalam era digital. Pertama, sektor keuangan yang sangat adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi. Industri perbankan, misalnya, telah mengadopsi teknologi seperti perbankan SMS, seluler, dan online, yang banyak digunakan oleh masyarakat karena manfaatnya. Kedua, sektor budaya, pariwisata, dan industri kreatif. Sektor ini sangat berkaitan dengan budaya lokal, dimana atraksi budaya dapat menarik wisatawan baik domestik maupun asing. Contohnya adalah produksi batik yang dapat dijadikan daya tarik wisata dan dipasarkan secara online melalui platform e-commerce. Ketiga, sektor pertanian juga mengalami kemajuan teknologi yang pesat. Banyak petani yang beralih dari model pertanian tradisional ke model pertanian digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan interaksi digital, pemangku kepentingan di sektor pertanian dapat terhubung, mulai dari konsumen, pedagang, hingga pemasok. Sistem kontrol dapat digunakan untuk memantau dan memprediksi semua aktivitas ekonomi, yang akan memudahkan proses pertanian. Namun, dalam penerapan teknologi, para petani menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan geografis dan kurangnya pengetahuan serta pengalaman.

Meskipun demikian, jika teknologi diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Indonesia.

Di sisi lain, dampak digitalisasi terhadap perekonomian Indonesia tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga kerugian. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari digitalisasi bagi perekonomian Indonesia :

1. Peningkatan Akses Pasar : Ekonomi digital membantu pengusaha, konsumen, dan pemasok untuk lebih mudah ditemukan, berkat pangsa pasar yang besar. Dengan adanya perdagangan elektronik, jaringan pasar kini berkembang tanpa batasan waktu dan tempat, menghilangkan kebutuhan akan cara jual beli tradisional. Pada tahun 2019, pendapatan e-commerce di Indonesia mencapai \$6 miliar dan diperkirakan tumbuh 18% setiap tahun, yang berkontribusi hingga \$35 miliar terhadap PDB.
2. Transaksi yang Lebih Mudah : Sektor keuangan telah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Layanan mobile banking dan internet banking kini banyak digunakan. Bank berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa harus melalui layanan tradisional yang mengharuskan tatap muka. Masyarakat mencari layanan yang dapat diakses secara online dengan persyaratan yang lebih sederhana.
3. Kemudahan Pembayaran : Dengan terhubung ke internet, pembayaran menjadi lebih mudah. Sektor perbankan berfungsi sebagai pintu gerbang untuk berbagai layanan pembayaran, sehingga pelaku ekonomi tidak perlu bertemu langsung dengan konsumen atau mitra bisnis.
4. Periklanan yang Kreatif dan Beragam : Dengan memanfaatkan internet, bisnis dapat mempromosikan dengan menggunakan iklan dengan lebih kreatif dan sepanjang waktu, tidak terikat oleh jam kerja seperti perusahaan tradisional. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif yang lebih baik.

Namun, disisi lain, ada beberapa masalah yang muncul akibat digitalisasi:

1. Kerentanan Terhadap Penipuan : Penipuan digital sering terjadi akibat penyalahgunaan informasi pribadi dengan teknologi yang canggih. Contohnya termasuk survei yang bertujuan mengumpulkan data

pribadi dan penawaran produk dengan diskon besar di situs e-niaga yang tidak resmi.

2. Plagiarisme : Meskipun plagiarisme telah ada sejak lama, kini menjadi lebih mudah dilakukan karena dukungan teknologi. Dengan berbagai sumber referensi seperti teks, gambar, dan musik yang tersedia secara online, tindakan seperti pembajakan dan pencurian konten menjadi lebih umum. Konten generik membuatnya lebih sulit untuk mendeteksi plagiarisme.

C. DAMPAK TEKNOLOGI PADA PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

Negara-Negara di dunia mengalami telah mengalami pertumbuhan pesat terhadap kemajuan teknologi, hal ini terjadi di negara maju maupun negara berkembang, termasuk indonesia. Kemajuan teknologi ini tentunya berpengaruh terhadap sosial dan ekonomi di indonesia, dengan kemudahan akses untuk melakukan kontak sosial secara jarak jauh yang pada akhirnya membuat perekonomian semakin bertumbuh.

1. Dampak Teknologi Pada Pembangunan Sosial
Syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial adalah interaksi sosial. Menurut Soekanto (1974), terdapat dua syarat utama dalam sebuah interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Perkembangan teknologi menyebabkan seseorang tidak harus melakukan interaksi secara bertemu, akan tetapi bisa dilakukan dari jarak jauh yang difasilitasi melalui media komunikasi seperti berbagai platform media sosial ataupun platform lainnya. Kehadiran teknologi informasi memberi dampak perubahan terhadap struktur sosial yang mana hal ini dapat dilihat dari perubahan ciri hubungan dan bagian bagian dari struktur sosial yang ada. Adanya perubahan hubungan yang menyebabkan seseorang lebih tidak menghargai orang lain yang ada di dekatnya hanya demi berkomunikasi dengan teman yang jauh secara fisik. Hal ini disebabkan oleh adanya kemunculan media sosial online yang akhirnya menjadi penyebab utama masyarakat pada saat ini lebih cenderung

menyukai menjalin pertemanan yang lebih erat di dunia maya dibandingkan pertemanan yang dijalin secara langsung di dunia nyata.

Teten dan Scott (2005) menguraikan definisi komunitas dunia maya sebagai sekumpulan dari orang-orang yang berada di ruang online dimana secara individu datang bersama untuk melakukan koneksi, interaksi, dan saling mengenal lebih dalam seiring dengan waktu. Metode kehidupan pada dunia maya dikembangkan dari model kehidupan nyata dibentuk dengan Perubahan sosial dalam masyarakat maya. Teknologi memiliki dampak yang signifikan pada interaksi sosial kita. Sementara ia menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan komunikasi dan penguatan hubungan, teknologi juga membawa tantangan seperti isolasi sosial dan gangguan digital. Kunci untuk memanfaatkan teknologi secara efektif adalah penggunaan yang seimbang dan bijaksana, serta kesadaran akan dampak potensialnya terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkaya kehidupan sosial kita tanpa mengorbankan kualitas hubungan tatap muka yang penting.

2. Dampak Teknologi Pada Pembangunan Ekonomi

Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat tiga komponen utama yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara mutualisme ekonomi yang terus tumbuh menciptakan kebutuhan akan teknologi yang baru. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang (Waverman et al. 2005; Kim et al. 2021). Poin utama kemajuan teknologi informasi dalam peranannya menunjang pertumbuhan ekonomi adalah pentingnya teknologi ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), wilayah pembangunan Indonesia dibagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan barat (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI). Secara

umum, pembangunan teknologi baik di KBI maupun KTI cenderung meningkat selama periode 2016-2020. KBI memiliki rata-rata IP-TIK yang selalu lebih tinggi dibandingkan KTI bahkan berada di atas angka nasional. Berbeda dengan KTI yang selalu memiliki rata-rata indeks paling rendah. Selain itu terdapat upaya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui kemajuan teknologi dapat dirasakan oleh Kawasan Barat Indonesia dan kurang merata di Kawasan Bagian Timur Indonesia. Dengan ini dapat dilakukan peningkatan variabel telepon kabel, telepon seluler, dan belanja TIK pemerintah signifikan dan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur.





BAB XII

TANTANGAN DAN MASA DEPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. TANTANGAN GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya, yang mencakup baik dampak positif maupun negatif. Proses globalisasi yang berlangsung ditunjang oleh kemajuan cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan besar dalam lingkungan strategis yang berpengaruh pada eksistensi dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sudut pandang eksternal, globalisasi menciptakan interaksi antarbudaya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan demikian, globalisasi berkontribusi pada terjadinya perubahan sosial yang signifikan, meskipun tidak semua perubahan tersebut sejalan dengan kemajuan sosial. Untuk menghadapi globalisasi, penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi. Beberapa langkah strategis yang perlu diambil oleh Indonesia dalam aspek ekonomi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Untuk meningkatkan daya saing, industrialisasi perlu diterapkan di semua sektor. Hanya melalui industrialisasi, penerapan teknologi produksi yang lebih canggih dapat terlaksana. Teknologi produksi merupakan syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Umumnya, industrialisasi dikelola oleh investor besar yang memiliki kekuatan pendanaan dan kemampuan kewirausahaan yang baik. Namun, menarik investor besar untuk berinvestasi di Indonesia tidaklah mudah. Banyak faktor, baik eksternal maupun internal, yang perlu diperbaiki, seperti stabilitas politik, praktik pungutan liar, penegakan hukum, infrastruktur, dan lainnya.

Mengundang investor asing perlu terus dilakukan untuk mengeksplorasi potensi ekonomi yang masih belum dimanfaatkan dan menciptakan lapangan kerja. Tidak bisa dipungkiri, investor besar dapat dengan cepat mengubah wajah ekonomi suatu daerah. Namun, penguatan ekonomi kerakyatan juga harus diperhatikan. Meskipun perubahan yang dibawa mungkin tidak secepat itu, memperkuat perekonomian masyarakat bawah dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Ekonomi rakyat cenderung lebih padat karya, sehingga dengan investasi yang sama, jumlah lapangan kerja yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan dengan industri yang padat modal. Memperkuat usaha rakyat juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan ini akan menjadi pasar potensial bagi investor, yang akan lebih tertarik untuk berinvestasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Laju Ekspor

Indonesia perlu berupaya lebih keras untuk menjadi pemain dalam perdagangan global. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik yang besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), harus memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kualitas produk dan layanan harus menjadi prioritas utama agar dapat diterima di pasar

internasional. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pelaku industri.

Menurut laporan tahunan dari World Trade Organization (WTO), Indonesia saat ini tidak termasuk dalam kategori negara-negara eksportir utama untuk sebagian besar barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar global. Dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia berperan sebagai price taker, bukan penentu harga. Pemerintah hanya dapat mempengaruhi nilai produk ekspor Indonesia dalam mata uang asing melalui fluktuasi nilai tukar rupiah, baik melalui devaluasi maupun revaluasi.

Diperlukan langkah-langkah cerdas dari pemerintah untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada para pelaku industri. Ini termasuk mengurangi beban pajak yang berat, menyederhanakan proses pengurusan usaha agar tidak melibatkan banyak birokrasi yang rumit, serta menghilangkan praktik korupsi dalam pengelolaan usaha. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam menciptakan ekonomi kreatif yang kompetitif dan meningkatkan laju ekspor.

Dalam sektor jasa, peran pemerintah sangat krusial, seperti melalui program peningkatan kemampuan bahasa asing agar tenaga kerja di Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja lokal di negara lain. Selain itu, proses pengurusan sertifikasi keahlian juga harus dipercepat agar tidak memakan waktu yang lama.

Peran pemerintah dalam menciptakan produk dalam negeri yang berkualitas sangat krusial. Dalam sektor industri, beberapa tantangan yang perlu diatasi meliputi ketersediaan modal yang memadai, akses terhadap teknologi informasi, dan tenaga kerja yang terampil, serta dukungan dari pengusaha, organisasi, dan manajemen perusahaan. Penggunaan teknologi modern dan sumber daya lainnya juga berkontribusi besar dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dari perusahaan.

3. Pemberdayaan UMKM

Fundamental perekonomian Indonesia yang belum kokoh saat ini mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini memiliki kemampuan yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang serta bersaing dengan perusahaan yang lebih bergantung pada modal besar. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan, karena telah terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi.

Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, dan minimnya pengetahuan serta penguasaan teknologi. Selain itu, UMKM seringkali terjebak dalam prospek usaha yang tidak jelas dan perencanaan, visi, serta misi yang belum matang. Hal ini disebabkan oleh karakteristik UMKM yang cenderung fokus pada peningkatan pendapatan, dengan ciri-ciri seperti: merupakan usaha keluarga, menggunakan teknologi yang relatif sederhana, kurangnya akses terhadap permodalan, serta tidak adanya pemisahan antara modal usaha dan kebutuhan pribadi.

Pemberdayaan UMKM dalam menghadapi arus globalisasi dan persaingan yang semakin ketat memerlukan kemampuan untuk menanggapi tantangan global. Ini termasuk peningkatan inovasi dalam produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan pasar. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan nilai jual UMKM, terutama agar dapat bersaing dengan produk asing yang semakin banyak memasuki sentra industri dan manufaktur di Indonesia.

UMKM muncul sebagai salah satu solusi bagi Indonesia untuk pulih dari krisis ekonomi. Selain itu, UMKM berkembang dengan mendasarkan diri pada ekonomi domestik, yang juga menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh UMKM di tanah air, dengan jumlahnya yang terus meningkat. Dalam konteks pasar bebas, UMKM tidak perlu

khawatir akan tersaingi oleh barang impor, karena nilai-nilai lokal yang diusungnya menjadi kekuatan utama dalam menghadapi produk asing.

Nilai kelokalan adalah kekuatan yang harus diandalkan oleh setiap UMKM di Indonesia. Local is the new power. Keunikan dalam karakteristik lokal setiap produk UMKM adalah yang membuatnya dapat bertahan. Produk lokal, masyarakat lokal, dan segmen pasar lokal saling berhubungan. Dengan mengedepankan nilai kelokalan ini, tidak mustahil bahwa segmen pasar lokal UMKM dapat menarik perhatian pasar global. Keunikan ini berpotensi membawa produk lokal UMKM Indonesia untuk bersaing dengan merek-merek ternama di pasar internasional.

UMKM sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, tetapi masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengembangkan kapasitas dan akses terhadap sumber daya produktif. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM antara lain:

Pertama, produktivitas yang rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran.

Kedua, keterbatasan akses terhadap permodalan. Kondisi ini sangat menyulitkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha atau mengembangkan produk yang kompetitif. Meskipun pemerintah telah mencoba mengatasi masalah ini dengan kebijakan kredit yang murah dan mudah, akses tersebut tetap sulit dijangkau oleh UMKM.

Ketiga, penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar yang masih kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan biaya yang cukup besar, terutama jika dikelola secara mandiri oleh UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.

4. Perbaikan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek krusial yang penting untuk mempercepat pembangunan nasional. Infrastruktur berperan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, karena laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada

ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi selanjutnya.

Namun, selama bertahun-tahun, perkembangan infrastruktur yang diharapkan di Indonesia justru menunjukkan kekhawatiran. Misalnya, pergerakan barang sering terhambat akibat kondisi infrastruktur yang buruk dan sistem logistik yang lemah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir meningkat sekitar 6 persen dan diakui sebagai salah satu negara yang mampu melewati krisis global, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur. Sebaliknya, perkembangan infrastruktur justru mengalami kemunduran akibat kerusakan yang ada, diperburuk oleh kondisi alam yang tidak mendukung.

Daya saing produk Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang kurang optimal dapat menghambat laju ekspor berbagai produk, yang berdampak pada penurunan kepercayaan dari pasar luar negeri terhadap produk kita. Selain itu, produk yang memerlukan waktu lama dalam perjalanan berisiko mengalami penurunan kualitas. Hal ini juga berlaku untuk permintaan jasa, seperti tenaga kerja kita di luar negeri, yang memerlukan infrastruktur yang baik agar pengiriman tenaga kerja dapat dilakukan tepat waktu.

Sadarilah bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia masih jauh dari harapan. Masalah infrastruktur menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah, antara lain dengan: 1) Memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan raya yang berlubang dan tidak rata, banyak di antaranya rusak akibat tanah longsor; 2) Membangun jalan tol atau jalur kereta api yang menghubungkan ke pelabuhan serta memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak, yang menjadi pintu utama keluar masuk barang dalam beberapa tahun mendatang; 3) Meningkatkan akselerasi penyediaan listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak langkah lainnya.

Semua ini sangat penting untuk mempermudah aliran logistik, yang merupakan bagian vital dari perdagangan, khususnya dalam pengiriman produk dari pabrik ke pelabuhan, maupun sebaliknya, atau dari pelabuhan ke pusat distribusi.

Tantangan dalam membangun infrastruktur di Indonesia sangat signifikan, mengingat adanya jarak yang besar antara kondisi saat ini dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan luas wilayah yang besar, Indonesia memerlukan infrastruktur dalam skala besar yang melebihi kebutuhan di banyak negara lain. Oleh karena itu, berbagai upaya yang serius perlu dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas tinggi.

5. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dinamis dalam kehidupan perekonomian bangsa yang mencerminkan ketahanan dan keuletan. Ini mencakup kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi perekonomian bangsa, yang menunjukkan kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi. Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang sehat, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan barang dan jasa, perlindungan fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing di tingkat global. Usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan dalam beberapa aspek, yaitu:

6. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh nusantara, melalui ekonomi kerakyatan yang mendukung keberlanjutan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - a. Struktur ekonomi harus diperkuat secara seimbang dan saling menguntungkan, dengan keselarasan antara sektor pertanian, industri, dan jasa.
 - b. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan, di bawah pengawasan masyarakat, dengan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak. Kemitraan antara pemerintah, BUMN, koperasi, sektor swasta, dan informal perlu diwujudkan untuk mencapai pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.
 - c. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya harus dilakukan dengan keseimbangan dan keserasian antara wilayah dan sektor.
 - d. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis, dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta menggunakan teknologi yang tepat guna, sambil tetap memperhatikan kesempatan kerja.

B. PERSOALAN EKONOMI DAN SOSIAL KONTEMPORER

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menjadi narasumber dalam acara Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk “Reformasi dan Transformasi Ekonomi” pada Selasa, 11 November, melalui video konferensi. Acara ini diorganisir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan tujuan untuk menyebarluaskan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada media dan masyarakat. Febrio menekankan bahwa transformasi ekonomi Indonesia bertujuan untuk mencapai perekonomian yang lebih tahan banting, serta menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi di masa depan. Ia merujuk pada cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia dalam bidang ekonomi pada tahun 2045.

Dia juga menegaskan pentingnya tidak hanya fokus pada skala ekonomi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan per kapita yang lebih merata. Untuk mencapai hal tersebut, perekonomian harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan untuk menyerap perkembangan teknologi yang cepat, tata ruang yang baik, serta dukungan kebijakan dari aspek ekonomi, politik, dan hukum. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir cukup stabil dengan angka sekitar 5%. Perbaikan yang dicapai Indonesia telah terlihat, di mana berdasarkan klasifikasi Bank Dunia pada tahun 2019, Indonesia mulai berstatus sebagai negara berpendapatan menengah atas. Namun, Febrio mengingatkan tantangan selanjutnya adalah berapa lama Indonesia bisa beralih dari status negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Ia menyatakan bahwa ini dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi terus dipercepat.

Beberapa tantangan perekonomian Indonesia meliputi produktivitas yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam tiga sumber pertumbuhan: modal, tenaga kerja, dan total produktivitas pabrik. Kemudahan berusaha juga masih perlu ditingkatkan, dan modal demografi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia perlu mengoptimalkan tenaga kerja yang menganggur untuk mendorong pertumbuhan jangka pendek. Selain itu, mayoritas produk ekspor nasional didukung oleh teknologi yang relatif rendah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan kurang optimal. Di luar isu domestik, tantangan ekonomi juga datang dari faktor eksternal, seperti pandemi Covid-19 yang memberikan guncangan pada sisi permintaan dan penawaran, serta efek domino yang mempengaruhi berbagai aspek.

Febrio menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk menanggapi dampak pandemi, mendukung pemulihan, dan menjaga reformasi ke depan. Oleh karena itu, APBN 2021 dirancang untuk mendukung percepatan pemulihan dan transformasi menuju Indonesia Maju. Namun, untuk mencapai tujuan strategis pembangunan, yaitu mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, APBN saja tidak cukup. Indonesia memerlukan reformasi yang lebih menyeluruh. Salah satu langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan

reformasi struktural adalah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang mencakup penyederhanaan regulasi, pengurangan birokrasi, mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi, dan insentif perpajakan. Tantangan sosial kontemporer dalam pembangunan ekonomi mencakup berbagai isu yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi di suatu negara. Berikut adalah beberapa tantangan utama :

1. Ketimpangan Ekonomi : Ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara kelompok sosial dapat menciptakan ketegangan sosial dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Menurut Piketty (2014), ketidaksetaraan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menimbulkan instabilitas sosial.
2. Pengangguran dan Keterampilan yang Tidak Sesuai : Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan pemuda, serta kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja merupakan tantangan besar. Menurut International Labour Organization (2021), pandemi Covid-19 telah memperburuk kondisi pasar kerja global, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.
3. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan : Perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi produktivitas dan ketersediaan sumber daya alam. Menurut Stern (2007), dampak perubahan iklim terhadap ekonomi global bisa sangat merugikan, dan tindakan segera diperlukan untuk mitigasi.
4. Migrasi dan Urbanisasi: Peningkatan urbanisasi dan migrasi dapat menimbulkan tantangan bagi infrastruktur dan layanan publik, terutama di kota-kota besar. Menurut UN-Habitat (2020), urbanisasi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan layanan dasar, yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan kota dan kekurangan perumahan.
5. Pendidikan dan Akses terhadap Teknologi: Kesenjangan dalam akses pendidikan dan teknologi juga menjadi tantangan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut World Bank (2020), pendidikan

- yang berkualitas dan akses terhadap teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.
6. Krisis Kesehatan dan Pandemi : Krisis kesehatan, seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19, menunjukkan bagaimana kesehatan masyarakat dapat langsung mempengaruhi ekonomi. Menurut Barro et al. (2020), dampak ekonomi dari pandemi dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan dan peningkatan ketidakpastian.
 7. Stigma Sosial dan Diskriminasi : Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti minoritas etnis atau perempuan, dapat menghalangi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi. Menurut Kabeer (2016), ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang kerja sangat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi.
 8. Krisis Kepercayaan Publik : Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi publik dapat mengakibatkan krisis kepercayaan yang berdampak negatif pada investasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Putnam (2000), kepercayaan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintah dan partisipasi warga.

C. VISI DAN PROYEKSI PEMBANGUNAN EKONOMI MASA DEPAN

Menurut Buku Putih Strategi Nasional Dalam Pengembangan Ekonomi digital Indonesia tahun 2030, Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saat ini, jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta orang, dengan lebih dari 78% populasi Indonesia telah memiliki akses ke internet, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang. Selain itu, pada tahun 2030, negara juga akan mengalami puncak bonus demografi. Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi ini guna memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa langkah, yang pertama ialah menciptakan lapangan dan peluang usaha yang luas, perkembangan industri teknologi yang pesat diikuti dengan perusahaan startup yang berkembang akan menjadi potensi utama dalam perluasan lapangan kerja untuk generasi muda untuk berkesempatan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi pada indonesia. setelah itu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital akan mempercepat transformasi sektor-sektor ekonomi. Adopsi teknologi digital dalam sektor ekonomi dan industri, seperti sektor manufaktur, pertanian, dan logistik berdampak pada meningkatnya produktivitas dan daya saing di pasar global. Hal ini akan membantu Indonesia menjadi pemain utama dalam perekonomian regional dan global. Selain itu langkah yang dapat dilakukan adalah ekonomi digital akan membuka pintu bagi inklusi finansial dengan layanan perbankan digital, penduduk dapat memiliki akses yang lebih mudah dan lebih baik dalam layanan keuangan dibanding dengan cara yang tradisional. hal ini tentunya dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, seperti melakukan investasi dan perencanaan masa depan.



Daftar Pustaka

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.

Rodrik, D. (2003). *In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth*. Princeton University Press.

World Bank. (2002). *Building Institutions for Markets*. World Development Report.

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). "Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development." *Journal of Economic Growth*, 9(2), 131-165.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). "Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth." *Handbook of Economic Growth, Volume 1A*. Elsevier.

[https://repositori.kemdikbud.go.id/20742/1/Kelas%20XI_Ekonomi_KD%203.2%20\(1\).pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/20742/1/Kelas%20XI_Ekonomi_KD%203.2%20(1).pdf)

<https://www.medcom.id/ekonomi/makro/GNG10Pdk-pengertian-pembangunan-ekonomi-tujuan-dan-faktor-yang-memengaruhi>

<https://feb.umsu.ac.id/strategi-pengembangan-ekonomi-pembangunan-berkelanjutan-kampus-terbaik-di-medan/>

<https://an-nur.ac.id/ekonomi-pembangunan-definisi-konsep-dan-indikator-pembangunan-ekonomi/>
<https://publikasi.abidan.org/index.php/benefit/article/download/20/49>
https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3644-strategi-mengembangkan-potensi-dan-investasi-di-daerah-dalam-rangka-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan.html>
<https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/>
<https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/>
<https://an-nur.ac.id/ekonomi-pembangunan-definisi-konsep-dan-indikator-pembangunan-ekonomi/>
<https://publikasi.abidan.org/index.php/benefit/article/download/20/49>
https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia [https://repositori.kemdikbud.go.id/20742/1/Kelas%20XI_Ekonomi_KD%203.2%20\(1\).pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/20742/1/Kelas%20XI_Ekonomi_KD%203.2%20(1).pdf) <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3644-strategi-mengembangkan-potensi-dan-investasi-di-daerah-dalam-rangka-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan.html> <http://repo.uinbukittinggi.ac.id/388/1/EKONOMI%20PEMBANGUNAN%201%20CETAK.pdf> <https://media.neliti.com/media/publications/57333-ID-kegagalan-pembangunan-ekonomi-indonesia.pdf>
<file:///Users/mac/Downloads/48702-Article%20Text-253285-4-10-20231229.pdf>
<https://fisipol.uma.ac.id/dampak-teknologi-terhadap-interaksi-sosial-apa-kah-kita-semakin-terisolasi/>
<https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2023/12/Buku-Putih-Strategi-Nasional-Ekonomi-Digital-Indonesia.pdf>



Tentang Penulis



Mokhamad Natsir, lahir di Malang Jawa Timur 11 April 1962, Pendidikan S1, S2, dan S3 dengan disiplin Ilmu Ekonomi Sumberdaya Manusia diselesaikan dengan baik di Malang. Sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Pascasarjana pada Universitas Merdeka Malang. Beberapa buku dan jurnal telah dipublikasikan baik dalam skala nasional dan internasional. Beberapa kedudukan dalam organisasi juga telah di lalui baik organisasi formal maupun informal konsisten dengan keilmuan yang kami miliki yaitu mengelola bidang sumber daya manusia, aktif sebagai nara sumber pada acara seminar baik lingkup regional, nasional, dan internasional, selain itu juga aktif sebagai konsultas pada perusahaan swasta.



Andik Pratama, S.E., M.E. lahir di Malang, 14 April 1998. Menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Negeri Malang dengan program studi ilmu ekonomi. Saat ini penulis juga telah aktif mengabdikan sebagai dosen di Universitas Merdeka Malang pada program studi ekonomi pembangunan. Penulis juga pernah mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kemendikti Saintek di tahun 2024

dan di tahun 2025. Selain hibah pengabdian kepada masyarakat penulis juga menerima hibah pendanaan penelitian fundamental dari Kemendikti Saintek tahun 2025. Terdapat karya tulis buku dan artikel diantaranya ; Gerakan Membangun Desa Dengan Ekonomi Sirkuler, Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi – Revolusi Industri 4.0 , The Dynamic of Exports , Imports, Labor and Indonesian Government Expenditure Period 1990 – 2019, Circular Economy Business Model in The Covid – 19 Pandemic Era in Local Communities Dll.



Lutfi Asnan Qodri, S.E., M.E lahir di Malang pada tanggal 14 Februari 1995. Berprofesi sebagai Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Selain mengajar juga sedang menjalankan studi Doktorat Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang. Mata Pelajaran yang diampu adalah Ekonomi Moneter dan Masalah Kebijakan

Pembangunan Ekonomi. Beberapa karya artikel yang telah di publikasikan yaitu: Nexus between production input and price commodity: An integration analysis of rice barns in East Java of Indonesia dan The Dynamic Impact of Rice Production and Harvested Area on Agricultural Product Prices During COVID-19.



Ega Efriandini, lahir di Kota Pekanbaru, 3 Juli 2004. Saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Merdeka Malang. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan serta terlibat pada kegiatan penelitian bersama dosen. Penulis juga berpartisipasi dalam kompetisi business plan tingkat internasional dan berhasil meraih penghargaan Best Team Work II. Selain itu, penulis juga pernah menjadi presenter pada International Conference.



Lutfi Hidayati Fauziah, S.Psi, M.Si, Lahir di Samarinda, Kalimantan -Timur pada 23 Juni 1990 dan saat ini berdomisili di Malang. Fifi sapaan penulis telah menempuh jenjang Pendidikan S1 di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lulus tahun 2012, menempuh Pendidikan S2 di Magister Sains Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2019. Saat ini berkarir sebagai Dosen dengan peminatan di bidang Psikologi Pendidikan, Psikologi Positif, Psikologi Keluarga dan Kemasyarakatan. Karya tulis buku diantaranya : Perbedaan Peserta Didik, Psikologi Keluarga, Keluarga Tangguh Menghadapi Ancaman *Bullying* di Era Digital. Artikel ilmiah diantaranya : *Can Self-Compassion Improve Adolescents Psychological Well-Being?*, Fenomena Trend Judi Online Pada Remaja, Dampak Teknologi Dan Gadget Pada Perkembangan Sosial – Emosional Pada Anak-Anak, Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Problematic Internet Use Pada Mahasiswa, Pengaruh *Self Compassion* Terhadap Kesejahteraan Psikologis Santri. Penulis dapat dihubungi melalui: fauziah.hidayati@unmer.ac.id



Renaldi lahir di Belitung, 10 Oktober 2004. Saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana pada program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Merdeka Malang. Selama menjalani studi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan kampus, baik dalam organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan akademik seperti penelitian bersama dosen. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, di antaranya: Kompleksitas Permasalahan Ekonomi, Analisis Pengaruh FDI, Ekspor, dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan VECM (1998–2024), serta US Influence on Indonesia's Macroeconomic Fluctuations